

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi TA 2017 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2017. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit - LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.4. Entitas

Untuk TA 2017, entitas dalam Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Provinsi, Badan, Dinas dan Badan Layanan Umum Daerah.

1. Badan

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Badan Keuangan Daerah
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Badan Kepegawaian Daerah
- 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7) Badan Penghubung Daerah
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Dinas

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 7) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- 8) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 10) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
 - 11) Dinas Perkebunan
 - 12) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 13) Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
 - 14) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 15) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - 17) Dinas Kominfo
 - 18) Dinas Lingkungan Hidup
 - 19) Dinas Ketahanan Pangan
 - 20) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - 21) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 22) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Badan Layanan Umum Daerah.
- 1) Akademi Farmasi.
 - 2) Akademi Analisis Kesehatan (AAK)
 - 3) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
 - 4) Rumah Sakit Daerah
 - 5) Rumah Sakit Jiwa.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2017 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di susun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Provinsi Jambi TA 2017 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

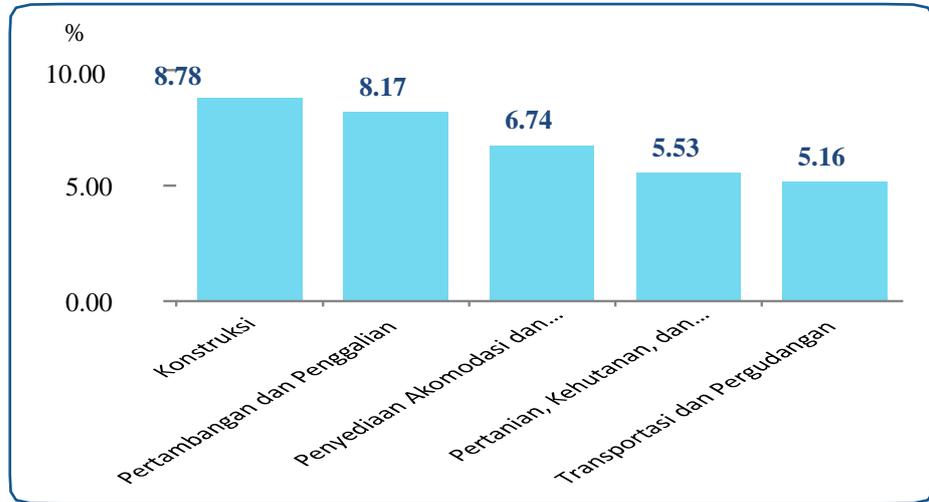
Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2017 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2017 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017.

2.1.1. Kondisi Perekonomian.

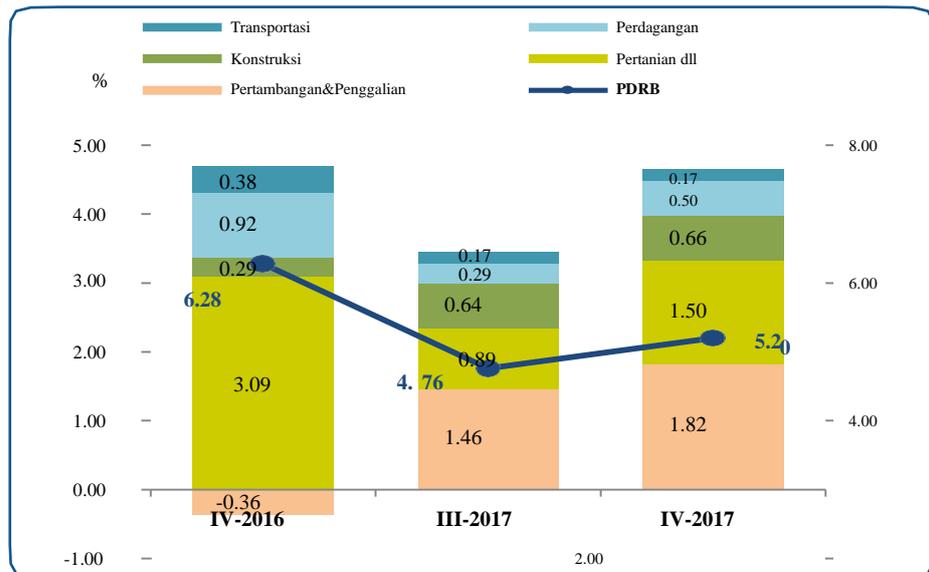
Perekonomian Jambi pada tahun 2017 yang di ukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp191.009.000.000.000,00. Perekonomian Jambi pada Triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 5,20% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya (4,76% yoy), dan relatif lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan IV 2017 (5,19% yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2017 didorong oleh perbaikan kinerja hampir seluruh sektor lapangan usaha, terutama konstruksi sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek fisik pemerintah dan swasta sesuai pola siklikal pada akhir tahun. Perekonomian Jambi pada Triwulan IV 2017 juga ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian pengaruh kenaikan produksi migas dan batu bara dibandingkan triwulan sebelumnya yang didukung tren peningkatan harga komoditas migas dan batu bara internasional.

Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV 2017 bila dibandingkan Triwulan yang sama Tahun sebelumnya (ctc) tumbuh 4,64%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,95%, sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 7,95%. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Triwulan IV 2017 dibandingkan Triwulan IV 2016 (yoy) tumbuh 5,20%. Pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Konstruksi sebesar 8,78%, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,17%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,74%.



Grafik 1
Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (y-on-y)



Grafik 2
Sumber Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2017 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan IV 2017 disebabkan meningkatnya ekspor barang dan jasa sebesar 10,34% (yoy) terutama di topang oleh ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan perbaikan harga batu bara internasional dan peningkatan produksi baik dari batu bara maupun minyak dan gas bumi. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang relatif cukup baik dapat menopang

perekonomian Jambi dengan laju pertumbuhan masing-masing 21% (yoy) dan 2,33% (yoy).

Menurut andil terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2017, sektor pertambangan dan penggalan menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,82 % diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,50%, sektor konstruksi sebesar 0,66% serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,50%.

Prospek perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalan didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2017 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha disektor pertambangan dan penggalan, sementara dari sisi pengeluaran, sentimen peningkatan harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi komoditas karet, migas, dan batu bara sehingga pada gilirannya akan berdampak pada membaiknya kinerja ekspor, serta terjaganya daya beli (konsumsi) masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah. Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diperkirakan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan kelompok konsumsi Lembaga Non Provit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi masih bersumber dari sektor utama Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalan, serta sektor reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan akan didorong kenaikan permintaan bahan mentah sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan terutama prospek negara tujuan utama ekspor seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang.

1. Neraca Perdagangan.

Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi tumbuh 7,29% (yoy) pada Triwulan IV 2017, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 48,73% (yoy). Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring membaiknya harga komoditas di pasar internasional.

Sementara impor (dari luar daerah dan luar negeri) pada triwulan berjalan mengalami kontraksi sebesar 68,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 43,80% (yoy). Dengan komoditas impor non migas terbesar disumbangkan oleh kelompok kertas dan bubur kertas serta mesin industri dan perlengkapannya.

1.1. Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Data perkembangan ekspor dan impor luar negeri non migas Provinsi Jambi menunjukkan terjaganya pertumbuhan ekspor dibandingkan triwulan sebelumnya disertai pelemahan kinerja impor yang mengalami kontraksi pada Triwulan IV 2017.

Pertumbuhan ekspor pada triwulan laporan terutama bersumber dari peningkatan ekspor batu bara sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia. Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), nilai ekspor luar negeri non migas Jambi pada Triwulan IV 2017 tercatat sebesar USD346,163 juta atau tumbuh 7,29% (yoy), meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 48,73% (yoy).

Sementara, nilai impor luar negeri non migas mencapai USD 19,593 juta pada triwulan laporan, atau mengalami kontraksi yang lebih dalam sebesar 68,92% dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 43,80% (yoy). Dengan kondisi tersebut, Provinsi Jambi mencatat net ekspor sebesar USD 326,57 juta.

Nilai ekspor terbesar masih disumbangkan oleh komoditas karet mentah (*crude rubber*) sebesar USD145,484 juta atau 42% dari total ekspor luar negeri non migas, diikuti oleh komoditas *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya sebesar USD78,583 juta atau 23% dari total ekspor. Komoditas minyak dan lemak mencatat *share* 9% dengan nilai ekspor sebesar USD31,718 juta. Sementara, nilai ekspor komoditas buah-buahan dan sayuran mencapai USD30,677 juta atau 9% dari total ekspor. Terakhir adalah ekspor komoditas batu bara, kokas dan briket sebesar USD27,427 juta atau 9% dari total nilai ekspor.

Ekspor komoditas karet mentah mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan IV 2017 sebesar 37,79% (yoy). Namun, nilai ekspor mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

12,16% (qtq) yang disebabkan masih lemahnya harga karet internasional pada triwulan laporan. Tingginya jumlah persediaan karet di negara importir utama seperti Tiongkok dan Jepang menjadi salah satu faktor yang menahan kenaikan harga karet internasional sehingga kinerja ekspor komoditas karet mentah relatif terbatas pada Triwulan IV 2017. Namun demikian, harga karet lokal masih mengalami peningkatan sebesar 1,05% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, nilai ekspor komoditas minyak dan lemak meningkat dibanding triwulan sebelumnya didukung stabilnya harga CPO, diikuti oleh komoditas batu bara seiring membaiknya harga komoditas di pasar internasional. Di sisi lain, ekspor komoditas pulp dan olahannya juga tercatat masih dalam tren pertumbuhan positif pada triwulan IV 2017.

Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama untuk ekspor komoditas unggulan Jambi, dengan nilai USD84,59 juta (24% dari total ekspor), diikuti oleh Amerika Serikat sebesar USD46,34 juta (13% dari total ekspor) dan Jepang sebesar USD37,58 juta (11% dari total ekspor).

1.2. Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Perkembangan impor non migas pada Triwulan IV 2017 sebesar USD 19,593 juta menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, atau mengalami kontraksi 68,92% (yoy). Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,129 juta yang mengalami kontraksi 43,80% (yoy). Pelemahan kinerja impor pada triwulan laporan bersumber dari menurunnya impor mesin pembangkit tenaga, pupuk dan mineral alam lainnya, kertas dan dan lain-lainnya. Penurunan tersebut sejalan dengan kontraksi pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan pada triwulan laporan sebesar 0,29% (yoy) mengakibatkan turunnya permintaan terhadap bahan baku dan pengadaan mesin penunjang produksi.

Berdasarkan pangasanya, kelompok kertas dan bubur kertas tercatat menjadi penyumbang terbesar impor non migas 2017 dengan nilai sebesar USD 7,013 juta atau 36% dari total nilai impor non migas. Kertas dan bubur kertas dibutuhkan digunakan sebagai bahan baku

penolong untuk kegiatan produksi produk jadi kertas, bubur kertas dan olahan kertas.

Kontributor impor berikutnya berasal dari kelompok mesin industri dan perlengkapannya sebesar USD6,082 juta atau 31% terhadap total impor non migas, serta alat pengangkut lainnya sebesar USD2,014 juta dengan pangsa 10% dari total nilai impor.

2. Laju inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain *supply* barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga.

Pada Triwulan IV 2017, inflasi Provinsi Jambi tercatat 2,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,49% yoy) dibandingkan dengan inflasi nasional 3,61% (yoy). Inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,68% (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 4,25% (yoy).

Inflasi di Provinsi Jambi terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok *administered prices* sebesar 5,71% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,56% (yoy). Inflasi juga terjadi pada komoditas inti (*core inflation*) sebesar 2,90% (yoy). Sementara inflasi bahan pangan bergejolak (*volatile foods*) masih tercatat mengalami deflasi 0,32% (yoy) setelah triwulan sebelumnya juga tercatat deflasi sebesar 1,83% (yoy).

Tingkat inflasi tahunan (yoy) di Kota Jambi berada di urutan ke-5 (lima) terendah dari 23 (dua puluh tiga) kota yang dihitung tingkat inflasinya di Sumatera. Sementara Bungo menempati urutan ke-5 (lima) tertinggi. Inflasi tertinggi pada Triwulan IV 2017 terjadi di Banda Aceh (4,86% yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Bukit tinggi (1,37% yoy).

Berdasarkan penghitungan triwulanan, perkembangan harga di Provinsi Jambi pada triwulan laporan tercatat inflasi 2,30% (qtq), meningkat bila dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (deflasi 0,22% qtq) dan triwulan yang sama tahun sebelumnya (1,96% qtq). Berdasarkan kelompoknya, inflasi di Kota Jambi utama disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 5,36% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 1,17%, dari sebelumnya mengalami inflasi

6,12% (yoy) pada Triwulan I 2017, serta secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 0,90% (qtq). Tingginya inflasi kelompok tersebut dipicu oleh inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air yang mengalami inflasi sebesar 11,83% (yoy) atau 1,55% (qtq).

Inflasi Kota Jambi juga didorong oleh inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau yang mencapai 3,68% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,64% dan secara triwulanan mengalami inflasi 0,40% (qtq). Inflasi pada kelompok ini utama dipicu oleh inflasi sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 9,63% (yoy) dan secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 1,99% (qtq), serta inflasi sub kelompok makanan jadi sebesar 1,95% (yoy) dan secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 0,18% (qtq). Berdasarkan kelompoknya, inflasi di Kota Jambi utama disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 5,36% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 1,17%, dari sebelumnya mengalami inflasi 6,12% (yoy) pada Triwulan I 2017, serta secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 0,90% (qtq). Tingginya inflasi kelompok tersebut dipicu oleh inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan, dan air yang mengalami inflasi sebesar 11,83% (yoy) atau 1,55% (qtq).

Kelompok sandang mengalami inflasi 3,82% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,24% namun secara triwulanan mengalami deflasi sebesar 0,05% (qtq). Inflasi kelompok ini didominasi inflasi sub kelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 5,52% (yoy) dan sub kelompok sandang anak – anak sebesar 5,23% (yoy).

Kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,72% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,08% dan secara triwulanan mengalami inflasi 0,76% (qtq) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,03%. Inflasi kelompok ini didominasi inflasi sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika sebesar 3,74% (yoy) meskipun secara triwulanan mengalami deflasi 0,04% (qtq).

Sementara itu, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,37% (yoy) dengan kontribusi sebesar 0,25% dan secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 2,77% (qtq) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,50%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh inflasi pada sub kelompok saranadan penunjang transpor yang mengalami inflasi

sebesar 5,97% (yoy) dan secara triwulanan mengalami inflasi sebesar 1,06%(qtq).

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 0,09% (yoy) dengan kontribusi deflasi sebesar 0,02%, setelah pada triwulan sebelumnya kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,34% (yoy). Secara triwulanan, kelompok ini mengalami inflasi 6,81% (qtq) dengan kontribusi inflasi sebesar 1,56%. Inflasi dipicu oleh sub kelompok ikan segar yang mengalami inflasi 10,93% (yoy) dengan inflasi triwulanan 10,80% (qtq).

Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada Triwulan IV 2017 (Oktober, November, dan Desember 2017) terutama disumbangkan oleh inflasi cabe merah, cabai rawit, udang basah, beras, bahan bakar rumah tangga, bayam, nila dan angkutan udara. Sedangkan penyumbang deflasi adalah daging ayam ras, bawang merah, tomat buah, gula pasir, wortel dan minyak goreng.

2.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi 0,09% (yoy) dengan sumbangan deflasi 0,02%. Pada triwulan sebelumnya, kelompok ini mengalami deflasi sebesar 1,34% (yoy). Secara triwulanan, kelompok bahan makanan mengalami inflasi 6,81% (qtq), pada triwulan sebelumnya mengalami deflasi 2,68% (qtq). Meningkatnya inflasi bahan makanan dipicu inflasi pada sub kelompok daging dan hasil-hasilnya (11,26% yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi (3,25% yoy). Hal ini sejalan dengan pemantauan harga oleh Disperindag Provinsi Jambi yang mencatat kenaikan harga rata-rata daging ayam broiler dan daging sapi, masing-masing dari Rp27.367/kg dan Rp120.000/kg pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp33.806/kg dan Rp120.645/kg pada triwulan laporan. Melanjuti periode sebelumnya, sub kelompok bumbu-bumbuan tercatat mengalami deflasi yang menurun dari 18,34% (yoy) menjadi 25,33 % (yoy). Masih terjadinya deflasi pada sub kelompok ini akibat menurunnya harga rata-rata cabai merah keriting dan bawang merah di pasaran, masing-masing dari Rp51.311/kg dan Rp27.244/kg pada bulan Desember 2016 menjadi Rp41.806/kg dan Rp20.000/kg pada bulan Desember 2017.

Sub kelompok ikan segar mengalami inflasi sebesar 10,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (3,92% yoy). Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga dencis (31,83% yoy), ikan nila (9,76% yoy), dan udang basah (20,56% yoy). Sama halnya dengan sub kelompok ikan segar, pada sub kelompok ikan diawetkan juga mengalami inflasi sebesar 14,48% (yoy), sedikit menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 14,96% (yoy). Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga ikan teri sebesar 19,63% (yoy).

Sub kelompok padi - padian, umbi – umbian dan hasilnya mengalami inflasi sebesar 2,46% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (0,17% yoy). Inflasi pada sub kelompok ini terutama disebabkan inflasi beras sebesar 2,38% (yoy). Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) oleh pemerintah untuk beras itu, kenaikan harga beras juga diakibatkan oleh masuknya masa tanam padi sehingga pasokan beras di pasaran berkurang yang mengakibatkan harga gabah kering petani mengalami peningkatan.

Sementara itu, mie kering instan sebagai komoditas lain penyumbang inflasi pada sub kelompok bahan makanan lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 2,80% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 2,61% (yoy). Hal ini sejalan dengan meningkatnya harga gandum internasional sebagai bahan baku utama pembuat mie menjadi sebesar USD 3,31/*bushel* atau meningkat sebesar 17,58% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

Sub kelompok lemak dan minyak mengalami deflasi 2,28% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,33% yoy, deflasi pada sub kelompok tersebut terutama disebabkan komoditas minyak goreng sebesar 5,01% (yoy). Deflasi dalam komoditas ini sejalan dengan pemantauan harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya penurunan harga minyak goreng dari rata-rata Rp11.103/liter pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya menjadi Rp10.000/liter pada Triwulan IV 2017.

Tren penurunan harga ini juga sejalan dengan penurunan harga rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO) internasional dari USD719 per *metric*

ton pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi USD 589 *per metric ton* pada Triwulan IV 2017.

2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi 3,68% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,64%, sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya 3,70% (yoy). Apabila dilihat secara triwulanan, inflasi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau tercatat 0,40% (qtq), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (1,08% qtq).

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 63% (yoy) dan secara triwulanan mengalami inflasi 1,99% (qtq) disebabkan kenaikan harga produk rokok kretek filter sebesar 8,39% (yoy) seiring penyesuaian harga produk rokok secara bertahap. Sub kelompok makanan jadi juga mengalami inflasi sebesar 1,95% (yoy) atau secara triwulanan sebesar 0,18% {qtq makanan jadi berupa mie 6,27% (yoy). Sementara itu, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi sebesar 0,19% (yoy) atau secara triwulanan deflasi sebesar 1,65% (qtq) didorong oleh penurunan harga gula pasir deflasi 12,17% (yoy) dan air kemasan deflasi 2,46% (yoy).

2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada Triwulan IV 2017 mengalami inflasi sebesar 5,36% (yoy) dengan sumbangan 1,17%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 6,12% (yoy). Secara triwulanan, kelompok ini mengalami inflasi 0,90% (qtq)

Tingginya inflasi tahunan terutama disebabkan inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air sebesar 11,83% (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya 12,59% (yoy). Inflasi tersebut terutama didorong kenaikan tarif listrik sebesar 16,64% (yoy) sebagai dampak kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu yang dilakukan secara bertahap pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2017.

Sub kelompok biaya tempat tinggal mengalami penurunan dari inflasi 3,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 2,03% (yoy) pada triwulan laporan seiring inflasi pada komoditas batu bata/batu tela 10,76% (yoy) dan kontrak rumah 0,74% (yoy).

2.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada Triwulan IV-2017 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,82% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,24%, tidak berubah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 3,82% (yoy), namun secara triwulanan, kelompok sandang mengalami deflasi 0,05% (qtq).

Secara sub kelompok, kenaikan inflasi kelompok ini didorong inflasi sub kelompok barang pribadi dan sandang lain sebesar 5,52% (yoy) yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 5,42% (yoy). Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga emas perhiasan sebesar 5,91% (yoy). Kenaikan dalam komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga rata-rata emas internasional dari USD1.150,0 *pertroyounce* diakhir Triwulan IV 2016 menjadi USD1.267,0 *pertroyounce* di triwulan laporan.

Sub kelompok sandang anak-anak mengalami inflasi sebesar 5,23% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 5,53% (yoy). Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga baju anak stelan 12,94% (yoy). Sub kelompok sandang laki-laki juga mengalami inflasi sebesar 2,13% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 2,33% (yoy) yang terutama disebabkan kenaikan harga t-shirt pria 5,74% (yoy). Sub kelompok sandang wanita mengalami inflasi sebesar 1,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 1,27% (yoy). Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga pembalut wanita 9,08% (yoy).

2.5. Kelompok Kesehatan

Komoditi yang tergabung dalam kelompok kesehatan mengalami inflasi tahunan sebesar 1,72% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,08%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 2,24% (yoy).

Sementara itu, secara triwulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,76% (qtq) dengan sumbangan inflasi sebesar 0,03%. Inflasi terutama bersumber dari sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika 3,74% (yoy) meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 5,63 % (yoy). Inflasi sub kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga sabun mandi 12,07% (yoy). Sub kelompok jasa perawatan jasmani mengalami inflasi sebesar 0,88% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,23% (yoy), dengan inflasi triwulanan sebesar 0,88% (qtq). Sub sektor jasa kesehatan juga mengalami inflasi sebesar 2,22% (yoy) tidak berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya 2,22% (yoy). Secara triwulanan, sub sektor jasa kesehatan tidak mengalami inflasi atau sebesar 0,00% (qtq). Inflasi sub sektor ini terutama disebabkan kenaikan tarif rumah sakit sebesar 3,67%(yoy).

Sementaraitu, sub kelompok obat-obatan mengalami deflasi 2,47% (yoy), lebih rendah dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya 3,43% (yoy) yang di picu deflasi obat dengan resep 5,28% (yoy).

2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga.

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi tahunan sebesar 4,70% (yoy) dengan sumbangan inflasi 0,32% menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 5,72% (yoy). Sementara itu, inflasi secara triwulanan sebesar 0,65% (qtq) dengan sumbangan inflasi 0,05%. Inflasi terutama disumbangkan oleh sub kelompok kursus-kursus/pelatihan sebesar 7,38% (yoy) yang didorong kenaikan biaya bimbingan belajar 8,99% (yoy). Inflasi juga terjadi pada sub kelompok jasa pendidikan sebesar 5,44% (yoy) yang terutama disebabkan kenaikan biaya sekolah dasar 14,43% (yoy). Sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan mengalami inflasi sebesar 5,59% (yoy), seiring dengan naiknya harga buku pelajaran SD 31,81 % (yoy).

Sementara itu, sub kelompok rekreasi mengalami deflasi sebesar 0,68% (yoy) lebih dalam dibandingkan deflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,31% (yoy).

2.7. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Secara tahunan, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,37% (yoy) dengan kontribusi inflasi sebesar 0,25%, setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi 0,54% (yoy). Secara triwulanan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 2,77% (qtq) dengan sumbangan inflasi 0,50%.

Inflasi yang terjadi pada sub kelompok komunikasi dan pengiriman mengalami inflasi sebesar 2,46% (yoy), menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 2,73% (yoy) yang didorong kenaikan tarif pulsa telepon selular 5,45% (yoy). Deflasi pada kelompok ini berasal dari deflasi yang terjadi pada sub kelompok transpor sebesar 2,07% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi 1,52 % (yoy) yang dipicu oleh penurunan harga tiket angkutan udara 0,46% (yoy).

Sub kelompok sarana dan penunjang transpor mengalami inflasi sebesar 5,97% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,09% (yoy) yang didorong kenaikan biaya perpanjangan STNK 103,64% (yoy). Sementara itu sub kelompok jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,39% (yoy) akibat kenaikan biaya kartu atm 0,69% (yoy) dan asuransi 0,22% (yoy). Sub kelompok transpor sebesar 0,61% (yoy), setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi 2,07% (yoy) yang dipicu oleh peningkatan harga bahan pelumas 6,28% (yoy), bensin 3,85% (yoy) dan sepeda motor 3,03% (yoy).

3. Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah yang tercermin dalam APBD Provinsi Jambi dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dari semua penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber

penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2017 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sisi Pendapatan Daerah, untuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah, realisasinya melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target sebesar Rp1.426,70 miliar terealisasi sebesar Rp1.580,53 miliar atau 110,78%, peningkatan ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga otomatis berimbas pula pada peningkatan di sektor unggulan seperti karet dan sawit.

Dari sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja Operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer selama tahun 2017, mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar Rp3,80 triliun, terealisasi sebesar Rp3,46 triliun (91,11%). Namun demikian terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan akses penduduk dan mendapatkan perumahan yang layak, peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dengan demikian Provinsi Jambi akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sampai dengan Triwulan IV 2017, realisasi pendapatan Provinsi Jambi sebesar Rp4,31 triliun atau mencapai 101,69% dari Target pada APBD-P tahun 2017 sebesar Rp4,23 triliun. Berdasarkan jenisnya, pendapatan terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp2,72

triliun atau 63,25% dari total pendapatan. Proporsi terbesar dalam pendapatan transfer dari APBN tersebut adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp1.40 triliun atau 32,47% dari total pendapatan Jambi.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui pajak, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya sampai dengan Triwulan IV 2017 mencapai Rp1,58 triliun atau 36,71% dari total Pendapatan. Nilai pendapatan tersebut meningkat 28,14% dibanding periode yang sama pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp1,23 triliun. Pendapatan terbesar disumbangkan oleh pajak daerah yang mencapai Rp1,32 triliun sampai dengan Triwulan V 2017 atau 30,57% dari total pendapatan dan 83,27% dari total PAD, tumbuh 36,18% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2016 yang hanya sebesar Rp0,97 triliun, sebagai efek dari meningkatnya volume pertumbuhan kendaraan baru di Provinsi Jambi, dan dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, serta mulai meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN/KB).

Sedangkan pendapatan dari retribusi daerah sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai Rp0,020 tumbuh sebesar 4,12%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,019 miliar. Peningkatan yang masih terbatas dalam retribusi yang diterima pemerintah disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola pungutan retribusi daerah pungutan retribusi pada terminal Alam Barajo Provinsi Jambi yang kurang maksimal akibat masih adanya beberapa terminal bayangan/liar yang didominasi oleh perusahaan transportasi yang beroperasi di luar Hingga Triwulan IV 2017.

Realisasi belanja Provinsi Jambi mencapai Rp 3,47 triliun terealisasi 91,52% dari APBD-P 2017 atau Rp3,79 triliun, realisasi tersebut baik secara nominal maupun serapan terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama ditahun 2016. Pada tahun 2016, realisasi belanja pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp2,89 triliun atau terserap 91,21%. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja terutama berasal dari belanja operasional yang tercatat sebesar Rp2,58 triliun dengan pangsa sebesar 65% dari total belanja Triwulan IV 2017 atau terealisasi sebesar 67,90% dari target APBD-P 2017.

Komponen belanja operasional terbesar adalah alokasi belanja untuk belanja pegawai yang mencapai Rp1,13 triliun atau 40,27 % dari belanja operasional, kemudian belanja barang Rp0,86 triliun atau 30,80% dari belanja operasional dan diikuti oleh belanja hibah Rp0,59 triliun atau 20,94% dari belanja operasional.

Realisasi belanja modal di tahun 2017 hanya sebesar Rp0,90 triliun pada APBD-P 2017 turun dari tahun 2016 yang terealisasi sebesar Rp0,95 triliun atau 93,65% dari APBD-P 2016. Realisasi belanja modal terkontraksi sebesar 5,26% (yoy) dan pangasanya menurun menjadi 21,60% terhadap total belanja atau lebih rendah bila dibandingkan pangsa belanja modal pada Triwulan IV 2016 yang mencapai 28,70%.

Penurunan belanja modal tersebut bersumber dari menurunnya realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja tanah. Sampai dengan triwulan IV 2017, belanja jalan, irigasi dan jaringan mencapai sebesar Rp0,66 triliun atau 93,84% dari target APBD-P2017 terkontraksi sebesar 8,26% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yang mampu terealisasi sebesar Rp0,72 triliun atau 95,71 % dari target APBD-P 2016. Lebih rendahnya realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan terutama disebabkan oleh proses pembebasan tanah yang belum selesai di beberapa proyek jalan. Sementara itu, realisasi belanja tanah pada tahun 2017 hanya sebesar Rp2,80 miliar atau terealisasi 23,55 % dari target APBD-P 2017 terkontraksi 92,03% (yoy) dibandingkan tahun 2016 lalu yang mampu terealisasi Rp35,14 miliar atau terealisasi 81,37% dari target APBD-P2016.

Kendala dilapangan yang dihadapi dalam realisasi belanja tanah meliputi perubahan peruntukan bidang tanah dari survey yang telah dilakukan sebelumnya, kurangnya dokumen administrasi untuk proses penggantian biaya pembebasan lahan serta belum ditemui kesepakatan harga pembebasan lahan dengan pemilik. Mempertimbangkan bahwa kegiatan pembebasan lahan merupakan faktor penting dalam terlaksananya proyek infrastruktur, maka kendala administrasi, pemantauan berkala, serta upaya negosiasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dengan pemilik lahan perlu menjadi perhatian sehingga berbagai proyek yang perlu pembebasan lahan dapat dilaksanakan lebih cepat. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menyediakan dana cadangan untuk risiko kenaikan harga

lahan serta mencari skema percepatan penyelesaian pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

Salah satu masalah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk mencapai satu satuan produksi dimana semakin kecil nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi makin efisien.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dan sekaligus menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (*Flow of Fund*), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi Jambi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian

- pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*);
 6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN;
 7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah;

2.1.2. Lingkungan Eksternal dan Internal.

Gambaran ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2017 akan dipengaruhi lingkungan eksternal sebagai akibat semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian regional dan nasional serta negara tetangga yang diperkirakan masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
3. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat;

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

2.1.3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2017, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya *e-government system* dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber

pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.
3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan *Interregional* Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, *Crude Palm Oil* (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
9. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam tahun 2017, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan, mengecilnya angka pengangguran, terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai atau melebihi tingkat pertumbuhan pencari kerja, kualitas lingkungan terjaga dan eksploitasi sumber daya alam berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih besar bukan hanya dinikmati segelintir orang.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mengakselerasikan pertumbuhan pembangunan dan peningkatan akumulasi kapasitas pembangunan. Untuk itu kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah pedesaan diantaranya dengan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui program revitalisasi tanaman sawit dan karet rakyat, membangun industri hilir berbasis komoditas karet dan mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang dan industri terkait lainnya. sehingga pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, untuk menghadapi tantangan internal dan global yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan daerah, banyak kegiatan pembangunan yang harus disiasati dengan baik. Pertukaran komoditas dan sumber daya antar wilayah di seluruh Indonesia dan bahkan dengan luar negeri sangat diperlukan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan seperti dengan mengadakan pameran Banking Expo dan Jambi

Syariah Expo serta sosialisasi produk perbankan dalam memperluas akses kredit/pembiayaan pada para pelaku usaha.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2017 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi

antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2017, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalan sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 4) Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi
- 5) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM)
- 8) Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT
- 9) *QuickResponse*
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata
- 11) Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat
- 13) Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 14) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- 15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah
- 16) Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
- 17) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 18) Peningkatan pelestarian budaya lokal
- 19) Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah
- 20) Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan
- 21) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak
- 22) Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat
- 23) Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 24) Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat
- 25) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- 26) Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan *entrepreneur*
- 27) Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan *entrepreneur*
- 28) Penguatan budaya IPTEKIN dan *entrepreneur* melalui proses pendidikan dan kebudayaan
- 29) Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan *entrepreneurship*

- 30) Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship
- 31) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 32) Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier
- 33) Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan
- 34) Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
- 35) Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri
- 36) Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
- 37) Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD
- 38) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya
- 39) Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi
- 40) Meningkatkan UMKM binaan
- 41) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 42) Meningkatkan akses terhadap bahan pangan
- 43) Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
- 44) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah
- 45) Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
- 46) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi
- 47) Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan
- 48) Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat
- 49) Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi
- 50) Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi
- 51) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik
- 52) Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
- 53) Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa
- 54) Pengendalian daya rusak air
- 55) Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah

- 56) Menerapkan *good mining practice*
- 57) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 58) Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
- 59) Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri
- 60) Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA
- 61) Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya
- 62) Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat
- 63) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- 64) Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan
- 65) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
- 66) Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang
- 67) Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
- 68) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
- 69) Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- 70) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
- 71) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja
- 72) Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan
- 73) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya *Total Factor Productivity* (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, maka anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp4.233.797.487.302,00 anggaran belanja sebesar Rp3.794.592.677.837,37 Transfer Rp717.426.051.322,00, penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp278.221.241.857,37 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	4.233.797.487.302,00	4.310.910.821.753,36	101,82
2	Belanja	3.794.592.677.837,37	3.457.094.021.644,03	91,11
3	Transfer	717.426.051.322,00	675.847.859.443,34	94,20
	Surplus (Defisit)	(278.221.241.857,37)	177.968.940.665,99	(63,97)
4	Pembiayaan			
	- Penerimaan	278.221.241.857,37	278.221.241.857,37	100,00
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0

	Pembiayaan	278.221.241.857,37	278.221.241.857,37	100,00
--	------------	--------------------	--------------------	--------

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

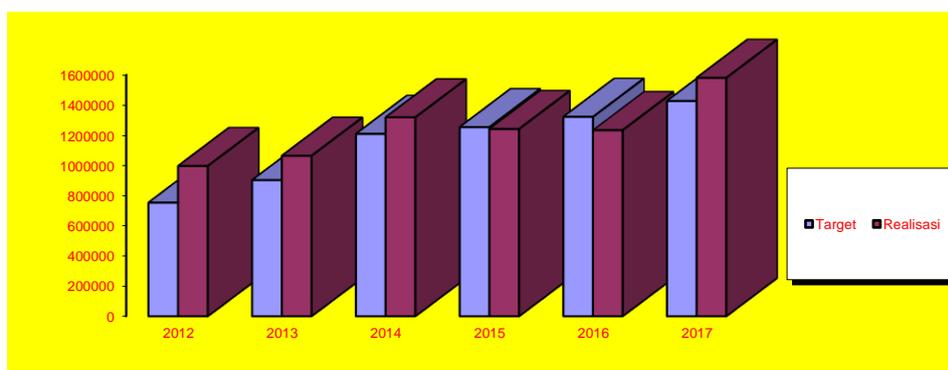
1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp4.233.797.487.302,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.310.910.821.753,36 atau 101,82% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp3.794.592.677.837,37 direalisasikan sebesar Rp3.457.094.021.644,03 atau 91,11% dari anggaran sedangkan transfer yang dianggarkan sebesar Rp717.426.051.322,00 direalisasikan sebesar Rp675.847.859.443,34. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp278.221.241.857,37 direalisasikan Surplus sebesar Rp177.969.940.665,99.
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2013 s.d. 2017

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2013	902.554.697.570,26	19,80	1.063.804.724.914,10	6,79
2.	2014	1.208.837.984.507,67	33,94	1.318.523.706.213,24	23,94
3.	2015	1.253.624.335.381,67	3,70	1.241.223.028.011,76	(5,86)
4.	2016	1.321.867.908.750,82	5,44	1.233.514.664.109,54	(0,62)
5.	2017	1.426.696.725.798,00	7,35	1.580.304.867.342,36	21,94

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2013 s.d. 2017



Secara keseluruhan dari TA 2013 sampai dengan TA 2017 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun di TA 2017 walaupun target mengalami kenaikan tetapi realisasinya mengalami kenaikan.

Dilihat dari sisi target anggaran, dari TA 2013 sampai dengan TA 2014 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp306.283.286.937,41 atau sekitar 33,93%,TA 2014 sampai dengan TA 2015 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp44.786.350.874,00 atau sebesar 3,70%,TA 2015 sampai dengan TA 2016 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp68.243.573.369,15 atau sebesar 5,44%,TA 2016 sampai TA 2017 target PAD mengalami kenaikan sebesar Rp104.828.817.047,18 atau 7,35%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, TA 2013 sampai dengan TA 2014 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp254.718.981.299,14 atau sebesar 23,94%, TA 2014 sampai dengan TA 2015 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar Rp77.300.678.201,48 atau sebesar 5,86%, TA 2015 sampai dengan TA 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.708.363.902,22 atau 0,62%, TA 2016 sampai dengan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp346.790.203.232,82 atau 21,94%.

Untuk Dana Perimbangan realisasi penerimaan sebesar Rp2.723.260.588.950,00 atau 134,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.028.612.287.504,00. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan grafik 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan
TA 2013 – 2017**

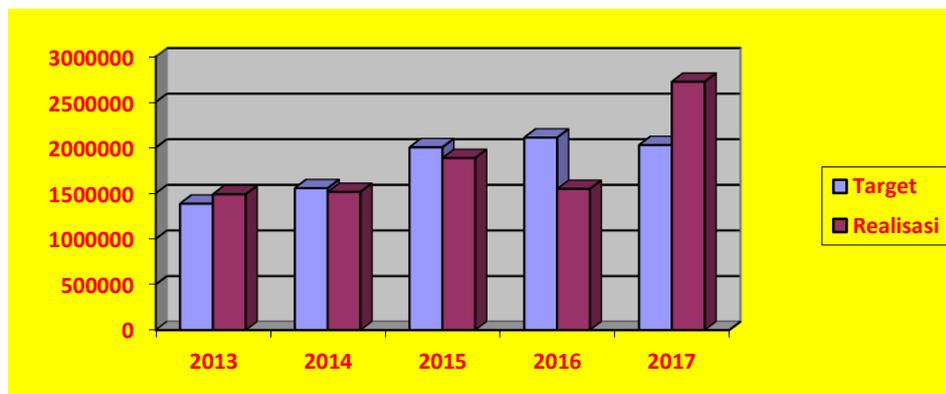
(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Perkembangan %	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	4	5	6
1.	2013	1.385.829.989.856,10	27,64	1.489.852.559.316,00	11,08
2.	2014	1.556.188.248.079,00	12,29	1.514.518.389.008,00	1,66
3.	2015	2.004.453.463.653,32	28,81	1.887.051.548.864,00	24,60
4.	2016	2.110.651.958.000,00	5,29	1.547.888.628.454,00	14,44
5.	2017	2.028.612.287.504,00	-4,04	2.723.260.588.950,00	43,16

Dilihat dari sisi target anggaran perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer terus mengalami peningkatan dimana pada TA 2013 ke TA 2014 terjadi peningkatan sebesar 12,29%, TA 2014 ke TA 2015 sebesar 28,81%, TA 2015 ke TA 2016 sebesar 5,29% dan TA 2016 ke TA 2017 turun sebesar 4,04%.

Kemudian dari sisi Realisasi Perkembangan Pendapatan dari Pendapatan Transfer juga mengalami peningkatan pada TA 2013 ke TA 2014 sebesar 1,66%, TA 2014 ke TA 2015 sebesar 24,60% dan pada TA 2015 ke TA 2016 mengalami peningkatan sebesar 14,44% dan TA 2016 ke TA 2017 sebesar 43.16%.

Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 s.d. 2017



Penerimaan yang ada pada Dana Perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Penyesuaian dan Pendapatan Hibah. Bila dilihat dari *trend* penerimaan, bahwa Dana Perimbangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi pendapatan.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2017 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.794.592.677.837,37 dan direalisasikan sebesar Rp3.457.094.021.644,03 atau 91.11% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp848.170.944.248,33. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi TA 2017 dengan target sebesar Rp2.800.386.869.332,37 terealisasi sebesar Rp2.561.387.667.311,05 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi
Belanja Operasi TA 2017**

(dalam rupiah)

o.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	1.255.843.970.346,77	1.127.581.142.738,60	89,79
2.	Belanja Barang dan Jasa	947.421.583.335,60	847.470.203.952,45	89,45
3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Hibah	596.621.315.650,00	586.336.320.620,00	98,28
5.	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	0,00
J u m l a h		2.800.386.869.332,37	2.561.387.667.311,05	91,47

Pada TA 2017, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp991.205.808.505,00 dan terealisasi sebesar Rp895.648.009.332,98 atau 90.36% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	11.892.275.500,00	2.800.947.111,00	23,55
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.054.563.048,94	109.638.271.560,09	85,62
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.649.093.887,06	108.608.020.183,89	81,88
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	701.507.725.319,00	658.315.309.836,00	93,84
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	17.102.150.750,00	16.285.460.642,00	95,22

J u m l a h	991.205.808.505,00	895.648.009.332,98	90,36
--------------------	--------------------	--------------------	-------

Untuk belanja tidak terduga tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.345.000,00 atau 1,94%.

Terakhir adalah belanja transfer pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp717.426.051.322,00 terealisasi sebesar Rp675.847.859.443,34 atau 94,20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	558.866.384.000,00	517.348.197.874,34	92,57
2.	Transfer Bantuan Keuangan	158.559.667.322,00	158.449.661.569,00	99,96
J u m l a h		717.426.051.322,00	675.847.859.443,34	94,20

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp278.221.241.857,37 dapat direalisasikan sebesar 100%, realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp278.221.241.857,37) direalisasikan surplus sebesar Rp172.323.084.804,99 yang berasal dari efisiensi belanja sebesar Rp337.498.656.193,34 dan menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp450.544.326.662,36.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) **Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

11) Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRAdiukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

(1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang lancar
 - (2) Kualitas piutang kurang lancar
 - (3) Kualitas piutang diragukan
 - (4) Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang

relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

- a) Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
- b) Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
- c) Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
- d) Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;

- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;

- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;

- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan komparatif dengan anggarannya dalam TA 2017.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan (PSAP 12 paragraf 8).

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2017, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp4.311.792.610.112,36	Rp3.394.795.872.563,54

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2017 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.233.797.487.302,00 dan terealisasi sebesar Rp4.311.792.610.112,36 atau sebesar 101,84% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2017 dan 2016

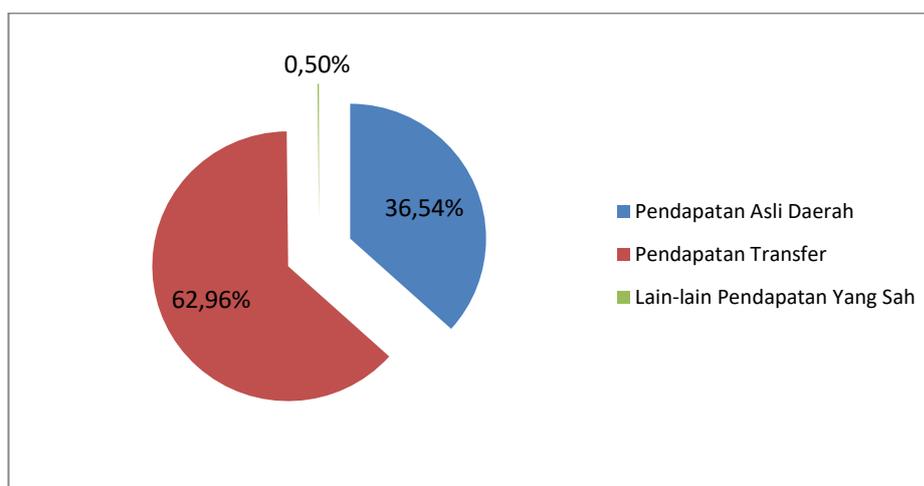
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.426.696.725.798,00	1.580.304.867.342,36	110,77	1.233.514.664.109,54
2.	Pendapatan Transfer	2.805.242.261.504,00	2.723.260.588.950,00	97,08	2.159.679.608.454,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.858.500.000,00	8.227.153.820,00	442,68	1.601.600.000,00
Jumlah		4.233.797.487.302,00	4.311.792.610.112,36	101,84	3.394.795.872.563,54

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan pendapatan mencapai target, namun dilihat dari rincian pendapatan terdapat 1 (satu) komponen yang tidak mencapai realisasi diatas 100%. dibandingkan dengan tahun 2016 naik sebesar Rp916.996.737.548,82 atau sebesar 27,01%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36,54% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 62,96% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,50% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2017



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 62,96% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.580.304.867.342,36 **Rp1.233.514.664.109,54**

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp1.426.969.725.798,00 dengan realisasi sebesar Rp1.580.304.867.342,36 atau sebesar 110,77% atau naik sebesar Rp346.790.203.232,82 atau sebesar 28,11% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 sebesar Rp1.233.514.664.109,54 Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 36,66%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2017 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	% thd PAD	Realisasi 2016
1.	Pendapatan Pajak Daerah	1.204.792.800.000,00	1.316.162.467.485,16	109,24	83,29	966.519.347.102,57
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	20.214.741.500,00	19.864.952.006,00	98,27	1,26	19.073.840.425,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	37.495.286.980,00	29.054.470.466,63	77,49	1,84	26.979.273.416,41
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.193.897.318,00	215.222.977.384,57	131,08	13,62	220.942.203.165,56
Jumlah		1.426.696.725.798,00	1.580.304.867.342,36	110,77	100	1.233.514.664.109,54

**5.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.316.162.467.485,16 Rp966.519.347.105,57**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Pajak Daerah diatur berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pada TA 2017, seluruh pendapatan pajak daerah dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah dan merupakan pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2017, kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak rokok. Badan Keuangan Daerah membawahi 10 UPTD khusus untuk menangani Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. UPTD tersebut berlokasi di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci.

Pendapatan Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 dianggarkan sebesar Rp1.204.792.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.316.162.467.485,16 atau sebesar 109,24%, naik sebesar Rp349.643.120.328.59 atau sebesar 36,18% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp966.519.347.102,57. Rincian anggaran dan jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	355.840.448.000,00	416.706.232.791,00	117,10	339.443.747.598,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	354.667.552.000,00	329.507.745.800,00	92,91	243.963.112.550,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	310.400.000.000,00	300.364.910.839,16	96,76	249.250.031.331,57
4.	Pajak Air Permukaan	1.426.880.000,00	1.227.053.782,00	85,99	1.193.160.472,00
5.	Pajak Rokok	182.457.920.000,00	268.356.524.273,00	147,07	132.669.295.151,00
	Jumlah	1.204.792.800.000,00	1.316.162.467.485,16	109,24	966.519.347.102,57

**5.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp19.864.952.006,00 Rp19.073.840.425,00**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 dianggarkan sebesar Rp20.214.741.500,00 dengan realisasi sebesar Rp19.864.952.006,00 atau sebesar 98,27%, naik sebesar Rp791.111.581,00 atau sebesar 4,15% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2016 sebesar Rp19.073.840.425,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Retribusi Jasa Umum	2.071.900.000,00	1.715.642.500,00	82,81	1.880.416.250,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	17.480.841.500,00	17.239.470.028,00	98,62	16.779.499.295,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	30.000.000,00	4.200.000,00	14,00	24.850.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	220.000.000,00	399.871.278,00	181,76	55.443.080,00
5.	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	412.000.000,00	505.768.200,00	122,76	333.631.800,00
	Jumlah	20.214.741.500,00	19.864.952.006,00	98,27	19.073.840.425,00

**1. Retribusi Jasa Umum 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.715.642.500,00 Rp1.880.416.250,00**

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Jasa Umum TA 2017 dianggarkan sebesar Rp2.071.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.715.642.500,00 atau sebesar 82,81%, turun sebesar Rp164.773.750,00 atau sebesar 8,76% dari realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2016 sebesar Rp1.880.416.250,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan dan di realisasikan oleh 3 (Tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Dinas Pendidikan yang merupakan pelunasan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2017.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Periode 2017 dan 2016

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	1.491.900.000,00	1.403.400.000,00	94,07	1.106.800.000,00
2	Retribusi Pelayanan				0,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	280.000.000,00			196.475.000,00
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000,00	312.242.500,00	104,08	577.141.250,00
Jumlah		2.071.900.000,00	1.715.642.500,00	82,81	1.880.416.250,00

2. Retribusi Jasa Usaha **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp17.239.470.028,00 **Rp16.779.499.295,00**

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 1 September 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp17.480.841.500,00 dengan realisasi sebesar Rp17.239.470.028,00 atau sebesar 98,62% naik sebesar Rp459.970.733,00 atau sebesar 2,74% dari realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2016 sebesar Rp16.779.499.295,00.

Seluruh realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp17.239.470.028,00 dianggarkan dan direalisasikan oleh 15 OPD dan berasal dari:

1. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan Tahun 2017 sebesar Rp17.116.575.928,00
2. Pelunasan Piutang TA 2016 sebesar Rp122.894.100,00 yang terdiri dari pembayaran piutang atas retribusi tempat penginapan pada Kantor Perwakilan Provinsi Jambi sebesar Rp6.150.000,00 pembayaran piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp49.180.000,00 serta pembayaran piutang atas retribusi pemakaian kekayaan daerah Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp67.564.100,00

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.747.741.500,00	2.884.095.000,00	104,96%	2.920.577.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga	2.747.741.500,00	2.884.095.000,00		2.920.577.000,00
2.	Dinas Perkebunan	1.565.000.000,00	2.843.248.677,00	181,68%	1.605.590.970,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dinas perkebunan)	1.565.000.000,00	2.843.248.677,00		1.605.590.970,00
3	Dinas kelautan dan Perikanan	372.500.000,00	374.993.000,00	100,67%	328.172.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	327.500.000,00	329.993.000,00		289.672.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	45.000.000,00	45.000.000,00		38.500.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum	295.000.000,00	316.240.400,00	107,20%	367.863.589,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Laboratorium (DINAS PU)	295.000.000,00	316.240.400,00		367.863.589,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	437.000.000,00	279.763.500,00	64,02%	233.754.500,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan (dinas pariwisata)	437.000.000,00	279.763.500,00		233.754.500,00
6.	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN				362.211.500,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan)				362.211.500,00
7.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				3.693.362.600,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Laboratorium				44.052.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan				4.800.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir				13.000.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi				2.769.368.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				862.142.600,00
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	3.878.900.000,00	3.818.039.000,00	98,43%	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	30.000.000,00	13.699.000,00		
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	7.500.000,00	7.500.000,00		
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	14.000.000,00	20.575.000,00		
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	500.000,00			
	Retribusi Tempat Rekreasi	2.728.000.000,00	3.066.542.000,00		
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.098.900.000,00	709.723.000,00		
9.	DINAS KOPERASI DAN UMKM	23.000.000,00	11.000.000,00	47,83%	18.300.000,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah Ruangan	23.000.000,00	11.000.000,00		18.300.000,00
10.	Badan Penghubung Provinsi Jambi	2.651.300.000,00	1.491.850.000,00	56,27%	2.017.925.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan	50.500.000,00	31.500.000,00		45.000.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.600.800.000,00	1.460.350.000,00		1.972.925.000,00
11.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.300.000.000,00	916.348.500,00	70,49%	1.014.037.500,00
	Retribusi pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan	1.300.000.000,00	916.348.500,00		1.014.037.500,00
12.	Dinas Kehutanan	100.000.000,00	105.800.000,00	105,80%	103.254.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	105.800.000,00		750.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah				102.504.000,00
13.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	168.300.000,00	158.900.000,00	94,41%	244.800.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Ruang	168.300.000,00	158.900.000,00		244.800.000,00
14.	Dinas Kesehatan	500.000.000,00	415.830.000,00	83,17%	382.680.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang	500.000.000,00	415.830.000,00		382.680.000,00
15.	Dinas Pendidikan	12.400.000,00	10.800.000,00	87,10%	9.300.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	12.400.000,00	10.800.000,00		9.300.000,00
16.	Dinas SosNakertrans				15.300.000,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah - Ruang				3.300.000,00
	Retribusi pelayanan tempat olah raga				12.000.000,00
17.	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.700.000,00	15.030.000,00	50,61%	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruang	14.700.000,00	4.950.000,00		
	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	15.000.000,00	10.080.000,00		
18.	Dinas Lingkungan Hidup	3.400.000.000,00	3.597.531.951,00	105,81%	3.462.370.636,00
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Laboratorium	3.400.000.000,00	3.597.531.951,00		3.462.370.636,00
	JUMLAH	17.480.841.500,00	17.239.470.028,00	98,62%	16.779.499.295,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2017
Rp4.200.000,00

31 Desember 2016
Rp24.850.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi pemberian izin trayek dari Dinas Perhubungan dan merupakan pelunasan atas SKRD Tahun 2017. Retribusi Perizinan Tertentu diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012.

Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.200.000,00 atau sebesar 14,00%, turun sebesar Rp20.650.000,00 atau 83,10% dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2016 sebesar Rp24.850.000,00

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

31 Desember 2017
Rp399.871.278,00

31 Desember 2016
Rp55.443.080,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp399.871.278,00 atau sebesar 181,76%, naik sebesar Rp344.428.198,00 atau sebesar 621,23% dari realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2016 sebesar Rp55.443.080,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Periode 2017 dan 2016**

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Sewa Alat Berat (Dinas PU)	220.000.000,00	399.871.278,00	181,76	55.443.080,00
Jumlah		220.000.000,00	399.871.278,00	181,76	55.443.080,00

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

31 Desember 2017

Rp505.768.200,00

31 Desember 2016

Rp333.631.800,00

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diatur berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012.

Retribusi IMTA dianggarkan sebesar Rp412.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp505.768.200,00 atau 122,76%, naik sebesar Rp172.136.400,00 atau sebesar 51,59% dari realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) TA 2016 sebesar Rp333.631.800,00. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang dipungut serta telah disetorkan ke kas daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	412.000.000,00	505.768.200,00	122,76%	333.631.800,00
Jumlah		412.000.000,00	505.768.200,00	122,76%	333.631.800,00

5.1.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2017

Rp29.054.470.466,63

31 Desember 2016

Rp26.979.273.416,41

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp37.495.286.980,00 dengan realisasi sebesar Rp29.054.470.466,63 atau sebesar 77,49%, naik sebesar Rp2.075.197.050,22 atau sebesar 7,69% dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2016 sebesar Rp26.979.273.416,41.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan dan direalisasikan oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD yang berasal dari:

1. Bagian Laba Penyertaan pada:
 - 1) PT. Bank Jambi.
Akta notaris nomor : 81 tanggal 19 april 2016 tentang pemberian deviden tahun 2017 sebesar Rp.27.968.261.014,63
 - 2) PT. Bangun Aksrida.
Resume Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat nomor : 291/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan deviden yang diperoleh tahun 2017 sebesar Rp626.827.425,-
 2. Kontribusi atas Built over Transfer (BOT) dari:
 - 1) PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama.
Surat perjanjian tanggal 27 Juni 1995
Jatuh tempo kontribusi tanggal 21 Januari sebesar Rp.250.000.000,-
 - 2) PT. Simotha Putra Parayuda.
Surat perjanjian Nomor : 1A/KB/CHK/II/2004 tanggal 18 Februari 2004.
 - 3) PT Kurnia Properti
Surat perjanjian nomor : 07/PK.GUB/PU/2014 tentang Pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis center dengan pola bangunan serah. Pada tahun 2016 belum memberikan kontribusi karena masih dalam proses pengajuan Hak pengelolaan lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional.
- Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2017 dan 2016**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Bank Jambi	34.341.310.000,00	27.968.261.014,63	81,44	25.193.367.803,41
2.	PT JSP	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	250.000.000,00
3.	PT Simota Putra Parayuda	450.000.000,00	209.382.027,00	46,53	225.429.380,00
4.	PT Asuransi Bangun Askrida	563.976.980,00	626.827.425,00	111,14	598.776.233,00
5.	Angso Duo	1.890.000.000,00	0,00	0,00	
6.	Jambi Bisnis Centre	0,00	0,00	0,00	711.700.000,00
Jumlah		37.495.286.980,00	29.054.470.466,63	77,49	26.979.273.416,41

5.1.1.1.d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp215.222.977.384,57 **Rp220.942.203.165,56**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp164.193.897.318,00 dengan realisasi sebesar Rp215.222.977.384,57 atau sebesar 131,08%, turun sebesar Rp5.719.225.780,99 atau sebesar 2,59% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2016 sebesar Rp220.942.203.165,56.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp215.222.977.384,57 termasuk didalamnya :

1.	Dana Bagi Hasil Pajak	232.765.698.653,00	186.374.450.163,00	80,07%	219.290.388.270,00
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	204.126.727.851,00	204.146.304.551,00	100,01%	176.500.909.423,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.397.912.161.000,00	1.397.912.161.000,00	100,00%	1.070.452.478.000,00
4.	Dana Transfer Khusus	967.584.195.000,00	934.827.673.236,00	96,61%	81.644.852.458,00
	JUMLAH	2.802.388.782.504,00	2.723.260.588.950,00	97,18%	1.547.888.628.151,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Provinsi Jambi dengan pencapaian tertinggi pada Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 100,01%.

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp186.374.450.163,00 **Rp219.290.388.270,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp232.765.698.653,00 dan realisasi sebesar Rp186.374.450.163,00 atau sebesar 80,07%, turun sebesar Rp32.915.938.107,00 atau sebesar 15,01% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2016 sebesar Rp219.290.388.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.1. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2017	Realisasi 2017	(%)	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	142.421.092.090,00	109.854.896.184,00	77,13	160.653.101.862,00
2	Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan 25/29	83.054.526.526,00	69.604.161.752,00	83,81	58.637.286.408,00
3	BP-PBB	7.290.080.037,00	6.915.392.227,00	94,86	0,00
	JUMLAH	232.765.698.653,00	186.374.450.163,00	80,07	219.290.388.270,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp204.146.304.551,00 **Rp176.500.909.423,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp204.126.727.851,00 dan realisasi sebesar Rp204.146.304.551,00 atau sebesar 100,01% naik sebesar Rp27.645.395.128,00 atau sebesar 15,66% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2016 sebesar Rp176.500.909.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.2. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Iuran Izin Hak Pengusaha Hutan	1.011.677,00	1.011.677,00	100%	1.287.702.125,00
2	Provisi Sumber Daya Hutan	4.587.952.501,00	4.468.052.443,00	97,39%	2.113.408.883,00
3	Iuran Tetap (Land Rent)	2.191.992.505,00	1.617.903.205,00	73,81%	5.553.340.764,00
4	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	14.181.244.369,00	21.180.811.238,00	149,36%	4.462.027.000,00
5	Pertambangan Minyak Bumi	74.009.596.431,00	65.698.753.873,00	88,77%	47.269.449.315,00

6	Pertambangan Gas Bumi	103.299.596.431,00	107.153.403.428,00	103,73%	104.760.308.300,00
7	Bagi Hasil Cukai Tembakau	2.584.692.937,00	2.543.512.937,00	98,41%	3.105.596.519,00
8	BP-PBB	0,00	0,00	0,00%	7.949.076.517,00
9	Dana Reboisasi	3.270.641.000,00	1.482.855.750,00	45,34%	0,00
	JUMLAH	204.126.727.851,00	204.146.304.551,00	100,01%	176.500.909.423,00

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.397.912.161.000,00 Rp1.070.452.478.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.397.912.161.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.397.912.161.000,00 atau sebesar 100,00% naik sebesar Rp327.459.683.000,00 atau sebesar 30,59% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2016 sebesar Rp1.070.452.478.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.3. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.397.912.161.000,00	1.397.912.161.000,00	100,00%	1.070.452.478.000
	SUB JUMLAH	1.397.912.161.000,00	1.397.912.161.000,00	100,00%	1.070.452.478.000

5.1.1.2.a.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp934.827.673.236,00 Rp81.644.852.458,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp967.584.195.000,00 dan realisasi sebesar Rp934.827.673.236,00 atau sebesar 96,61% naik sebesar Rp853.182.820.778,00 atau sebesar 1.044,99% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2016 sebesar Rp81.644.852.485,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.11.4. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	191.345.517.000,00	162.287.005.687,00	84,81%
	Dak Bidang Pendidikan SMA	26.539.736.000,00	25.488.452.000,00	96,04%
	Dak Bidang Pendidikan SMK	29.742.048.000,00	26.589.199.000,00	89,40%
	Dak Bidang Kesehatan	61.313.154.000,00	49.050.522.000,00	80,00%
	Dak Bidang Infrastruktur Jalan	50.000.000.000,00	49.163.694.000,00	98,33%

	Dak Bidang Infrastruktur Irigasi	5.683.337.000,00	5.087.967.687,00	89,52%
	Dak Bidang Kelautan dan Perikanan	11.358.852.000,00	3.407.655.000,00	30,00%
	Dak Bidang Pertanian	3.184.642.000,00	2.742.392.000,00	86,11%
	Dak Bidang Energi Skala Kecil	2.523.748.000,00	757.124.000,00	30,00%
	Dak Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	776.238.678.000,00	772.540.667.549,00	99,52%
	Dak Peningkatan Pengelolaan Koperasi	1.000.000.000,00	996.626.400,00	99,66%
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	621.868.000.000,00	616.340.099.419,00	99,11%
	Tunjangan Profesi Guru	146.389.449.000,00	148.718.933.730,00	101,59%
	Tunjangan Penghasilan Guru	4.923.000.000,00	4.695.000.000,00	95,37%
	Tunjangan Khusus Guru	596.046.000,00	327.825.000,00	55,00%
	Dana Pelayanan Adm.Kependudukan	1.462.183.000,00	1.462.183.000,00	100,00%
	JUMLAH TOTAL	967.584.195.000,00	934.827.673.236,00	96,61%

5.1.1.2.b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

31 Desember 2017

Rp0,00

31 Desember 2016

Rp611.790.980.303,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.853.479.000,00 tetapi tidak terealisasi, turun sebesar Rp611.790.980.303,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2016 sebesar Rp611.790.980.303,00, hal ini dikarenakan Dana Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi (DP2D2) tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2017, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya
Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Dana Insentif	-	-	%	5.000.000.000,00
2.	Dana Proyek Pemerintah Daerah	2.853.479.000,00	-	%	2.853.479.000,00
3.	Bantuan Operasional Sekolah	-	-	%	603.937.501.303,00
	Jumlah	2.853.479.000,00	0,00	%	611.790.980.303,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

31 Desember 2017

Rp8.227.153.820,00

31 Desember 2016

Rp1.601.600.000,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2017 dianggarkan sebesar Rp1.858.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.227.153.820,00 atau naik sebesar Rp6.625.553.820,00 atau sebesar 442,68% dari realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2016 sebesar Rp1.601.600.000,00 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah/ Sumbangan Jasa Raharja	1.471.000.000,00	1.470.960.000,00	104,59	1.401.600.000,00
2.	Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan	387.500.000,00	187.500.000,00	93,75	200.000.000,00

3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016	-	-	-	-
4.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-	-
	Pendapatan Luar Biasa (saldo dana BOS T.A 2016)	-	6.568.693.820,00	100,00	-
Jumlah		1.858.500.000,00	8.227.153.820,00	442,68	1.601.600.000,00

5.1.2. Belanja **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp3.457.094.021.644,03 **Rp2.893.449.001.005,34**

Secara garis besar, Belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Belanja Daerah TA 2017 dianggarkan sebesar Rp3.794.592.677.837,37 dengan realisasi sebesar Rp3.457.094.021.644,03 atau sebesar 91,11%, naik sebesar Rp563.645.020.638,69 atau sebesar 19,48% dari realisasi Belanja TA 2016 sebesar Rp2.893.449.001.005,34. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2017 sebagai berikut.

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi TA 2017 dan TA 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Operasi	2.800.386.869.332,37	2.561.387.667.311,05	91,47	1.947.816.538.589,33
2.	Belanja Modal	991.205.808.505,00	895.648.009.332,98	90,36	945.539.006.404,01
3.	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	58.345.000,00	1,94	93.456.012,00
Jumlah		3.794.592.677.837,37	3.457.094.021.644,03	91,11	2.893.449.001.005,34

5.1.2.1 Belanja Operasi **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp2.561.387.667.311,05 **Rp1.947.816.538.589,33**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.800.386.869.332,37 dengan realisasi sebesar Rp2.561.387.667.311,05 atau sebesar 91,47%, naik sebesar Rp613.571.128.721,72 atau sebesar 31,50% dari realisasi Belanja Operasi TA 2016 sebesar Rp1.947.816.538.589,33. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi TA 2017 dan TA 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Pegawai	1.255.843.970.346,77	1.127.581.142.738,60	89,79	623.561.725.029,33
2.	Belanja Barang	947.421.583.335,60	847.470.203.952,45	89,45	646.197.608.660,00
3.	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Hibah	596.621.315.650,00	586.336.320.620,00	98,28	678.057.204.900,00
5.	Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.800.386.869.332,37	2.561.387.667.311,05	91,47	1.947.816.538.589,33

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

31 Desember 2017

Rp1.127.581.142.738,60

31 Desember 2016

Rp623.561.725.029,33

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.255.843.970.346,77 dengan realisasi sebesar Rp1.127.581.142.738,60 atau sebesar 89,79% dari anggarannya, naik sebesar Rp504.019.417.709,27 atau sebesar 80,83% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2016 sebesar Rp623.561.725.029,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek Provinsi Jambi Periode 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	836.062.812.516,20	889.321.911.987,00	106,37	402.250.087.808,33
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	158.002.504.265,05	150.667.930.597,00	95,36	140.408.564.400,00
3.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.118.110.130,00	8.623.500.000,00	77,56	7.724.800.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	33.901.479.675,52	21.472.461.264,00	63,34	0,00
5.	Belanja Pegawai BLUD	64.515.568.760,00	52.411.280.090,60	81,24	19.757.352.306,00
6.	Belanja Honorarium Operator LPPK dan TEPR	335.000.000,00	287.000.000,00	85,67	536.967.490,00
7.	Tunjangan Profesi Guru	146.389.449.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Tunjangan Penghasilan Guru	4.923.000.000,00	4.726.500.000,00	96,01	52.588.453.025,00
9.	Tunjangan Khusus Guru	596.046.000,00	70.558.800,00	11,84	295.500.000,00
	Jumlah	1.255.843.970.346,77	1.127.581.142.738,60	89,79	623.561.725.029,33

Atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.127.581.142.738,60 dianggarkan dan direalisasikan oleh 37 OPD dengan rincian:

1. Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp1.127.581.142.738,60;
2. Pembayaran Utang/Belanja TA 2016 sebesar Rp0,00.

Belanja Pegawai sebesar Rp1.127.581.142.738,60 termasuk didalamnya Belanja Pegawai BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp52.411.280.090,60.

Rincian belanja pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.b Belanja Barang

31 Desember 2017

Rp847.470.203.952,45

31 Desember 2016

Rp646.197.608.660,00

Belanja Barang TA 2017 dianggarkan sebesar Rp947.421.583.335,60 dengan realisasi sebesar Rp847.470.203.952,45 atau sebesar 89,45% dari anggarannya, naik sebesar Rp201.272.595.292,45 atau sebesar 31,15% dari realisasi Belanja Barang TA 2016 sebesar Rp646.197.608.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Provinsi Jambi Periode 2017**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	Belanja bahan pakai habis	114.049.365.308,36	84.327.321.102,46	73,94	61.669.757.355,00
2	Belanja bahan/material	68.463.012.873,00	65.990.992.371,54	96,39	51.147.875.614,00
3	Belanja jasa kantor	168.352.593.690,40	167.325.460.576,45	99,39	226.726.702.993,00
4	Belanja premi asuransi	3.670.482.600,00	3.323.046.268,00	90,53	3.129.924.671,00
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	20.666.489.480,00	17.872.756.024,00	86,48	17.014.900.690,00
6	Belanja cetak dan penggandaan	18.880.490.845,85	17.154.309.218,00	90,86	19.860.655.238,00
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7.151.711.826,00	6.048.772.966,00	84,58	3.259.621.026,00
8	Belanja sewa alat berat	1.175.000.000,00	1.082.000.000,00	92,09	25.000.000,00
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	6.139.815.004,00	5.975.815.000,00	97,33	6.550.175.076,00
10	Belanja makanan dan minuman	46.838.384.727,81	35.040.597.074,00	74,81	13.416.117.859,00
11	Belanja Sarana Mobilitas Darat	13.881.170.000,00	13.710.846.000,00	98,77	0,00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	5.320.893.000,00	4.816.851.845,00	90,53	3.553.467.900,00
13	Belanja pakaian kerja	1.371.168.500,00	1.350.486.000,00	98,49	1.715.624.348,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.866.525.000,00	2.725.377.750,00	95,08	2.993.416.700,00
15	Belanja perjalanan dinas	153.692.840.903,18	140.893.533.093,00	91,67	131.171.508.761,00
16	Belanja pemeliharaan	23.708.705.465,00	20.961.359.037,00	88,41	18.066.533.629,00
17	Belanja jasa konsultasi	23.599.573.000,00	19.433.992.100,00	82,35	10.330.996.850,00
18	Belanja beasiswa pendidikan PNS	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	739.000.000,00
19	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.712.026.240,00	3.865.216.594,00	82,03	5.191.485.850,00
20	Belanja honorarium PNS	33.161.062.872,00	29.038.844.575,00	87,57	25.848.340.100,00
21	Belanja honorarium non PNS	98.693.232.000,00	93.688.296.500,00	94,93	43.786.504.000,00
22	Belanja barang dana Jasa Bos	130.217.040.000,00	112.034.329.858,00	86,04	0,00
	Jumlah	947.421.583.335,60	847.470.203.952,45	89,45	646.197.608.660,00

Belanja Barang sebesar Rp847.470.203.952,45 termasuk didalamnya Belanja Pegawai BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp68.322.858.592,91.

Rincian belanja barang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.1.c Belanja Subsidi

31 Desember 2017

Rp0,00

31 Desember 2016

Rp0,00

Belanja Subsidi TA 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Subsidi tersebut pada TA 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.1.d Belanja Hibah

31 Desember 2017

Rp586.336.320.620,00

31 Desember 2016

Rp678.057.204.900,00

Belanja Hibah TA 2017 dianggarkan sebesar Rp596.621.315.650,00 dengan realisasi sebesar Rp586.336.320.620,00 atau sebesar 98,28% turun sebesar Rp91.720.884.280,00 atau sebesar 13,52% dari realisasi Belanja Hibah TA 2016 sebesar Rp678.057.204.900,00.

Anggaran, realisasi, dan penerima hibah TA 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Provinsi Jambi TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Penerima Hibah	Anggaran	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
1.	Belanja Hibah kepada Instansi Korem) Korem garuda Putih	150.000.000,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada KONI	18.000.000.000,00	16.561.230.070,00
3.	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia	600.000.000,00	600.000.000,00
4.	Belanja Hibah kepada IPHI	35.000.000,00	35.000.000,00
5.	Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	950.000.000,00	720.000.000,00
6.	Belanja hibah kepada NPC	3.733.190.000,00	3.714.895.786,00
7.	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka	1.820.000.000,00	1.764.853.132,00
8.	Belanja Hibah kepada panti asuhan	150.000.000,00	150.000.000,00
9.	Belanja hibah kepada DPD HSPPI-Pendidikan Non Formal	150.000.000,00	148.224.000,00
10.	Belanja Hibah kepada komisi penyiar indonesia daerah (KPID) Provinsi Jambi	300.000.000,00	300.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS			
11.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Batanghari	36.702.200.000,00	36.514.840.000,00
12.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Kerinci	27.910.200.000,00	27.609.800.000,00
13.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Merangin	50.388.400.000,00	49.552.160.000,00
14.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Muaro Jambi	48.381.000.000,00	47.656.720.000,00
15.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Sarolangun	38.965.400.000,00	38.397.280.000,00
16.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Barat	40.831.000.000,00	40.359.680.000,00
17.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28.064.400.000,00	27.828.600.000,00
18.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tebo	43.091.200.000,00	42.667.480.000,00
19.	Satuan Pendidikan Dasar Kota Jambi	77.475.600.000,00	77.394.040.000,00
20.	Satuan Pendidikan Dasar Kota Sungai Penuh	12.319.200.000,00	12.136.480.000,00
21.	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bungo	46.062.200.000,00	45.352.800.000,00
22.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Batanghari	779.800.000,00	779.800.000,00
23.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Bungo	1.148.000.000,00	1.102.360.000,00
24.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Kerinci	232.400.000,00	203.560.000,00
25.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Merangin	638.400.000,00	501.200.000,00
26.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Ma. Jambi	1.765.400.000,00	1.765.120.000,00
27.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Sarolangun	2.098.600.000,00	2.092.720.000,00
28.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	777.000.000,00	777.000.000,00
29.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	408.800.000,00	408.800.000,00
30.	Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten Tebo	1.663.200.000,00	1.663.040.000,00
31.	Satuan Pendidikan Menengah Kota Jambi	17.561.600.000,00	17.560.960.000,00
32.	Satuan Pendidikan Menengah Kota Sungai Penuh	78.400.000,00	78.400.000,00
33.	Belanja Hibah Bos kepada satuan Pendidikan menengah Pertama kabupaten Tebo	0,00	(38.400.000,00)
34.	Hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.058.273.400,00	14.930.676.550,00
35.	Hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	77.332.452.250,00	75.773.601.082,00
36.	Satuan Pendidikan Menengah Pertama kota jambi		(726.600.000,00)
JUMLAH		596.621.315.650,00	586.336.320.620,00

5.1.2.1.e Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2017

31 Desember 2016

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Bantuan Sosial tersebut pada TA 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2017
Rp895.648.009.332,98

31 Desember 2016
Rp945.539.006.404,01

Belanja Modal TA 2017 dianggarkan sebesar Rp991.205.808.505,00 dengan realisasi sebesar Rp895.648.009.332,98 atau sebesar 90,36%, turun sebesar Rp49.890.997.071,03 atau sebesar 5,28% dari realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp945.539.006.404,01.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
TA 2017 dan TA 2016**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Tanah	11.892.275.500,00	2.800.947.111,00	23,55	35.137.090.000,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	128.054.563.048,94	109.638.271.560,09	85,62	83.858.485.346,80
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	132.649.093.887,06	108.608.020.183,89	81,88	107.470.887.817,18
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	701.507.725.319,00	658.315.309.836,00	93,84	717.103.508.077,03
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.102.150.750,00	16.285.460.642,00	95,22	1.969.035.163,00
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		991.205.808.505,00	895.648.009.332,98	90,36	945.539.006.404,01

Belanja Modal sebesar Rp895.648.009.332,98 termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD (RSUD, RSJ, AAK, LABKES, AKFAR) dengan realisasi sebesar Rp8.300.796.377,00.

Rincian belanja modal per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

31 Desember 2017
Rp.58.345.000,00

31 Desember 2016
Rp93.456.012,00

Belanja Tak Terduga TA2017 dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp58.345.000,00 atau sebesar 1,94%, turun sebesar Rp35.111.012,00 atau 37,57% dari realisasi Belanja Tak Terduga TA 2016 sebesar Rp93.456.012,00.

Belanja ini dianggarkan untuk membiayai pengeluaran darurat sehubungan dengan adanya bencana alam yang terjadi. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2017 digunakan untuk pengembalian dana ADD akibat kesalahan transfer oleh Bendahara Desa Sungai Landai dan Desa Baru Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ke Kas Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2016.

5.1.3 Transfer

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp675.847.859.443,34 **Rp401.035.967.667,50**

Transfer TA 2017 dianggarkan sebesar Rp717.426.051.322,00 dengan realisasi sebesar Rp675.847.859.443,34 atau sebesar 94,20%, naik sebesar Rp274.811.891.775,84 atau sebesar 68,53% dari realisasi Transfer TA 2016 sebesar Rp401.035.967.667,50.

Transfer dianggarkan untuk membiayai pengeluaran sebagai wujud pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan kepentingan Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
TA 2017 dan TA 2016**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan	558.866.384.000,00	517.348.197.874,34	92,57	399.535.722.420,50
2.	Transfer Bantuan Keuangan	158.559.667.322,00	158.499.661.569,00	99,96	1.500.245.247,00
Jumlah		717.426.051.322,00	675.847.859.443,34	94,20	401.035.967.667,50

5.1.3.a Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp517.348.197.874,34 **Rp399.535.722.420,50**

Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi dialokasikan ke Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp558.866.384.000,00 dengan realisasi sebesar Rp517.348.197.874,34 atau 92,57%, naik sebesar Rp117.812.475.453,84 atau sebesar 29,49% dari Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota TA 2016 sebesar Rp399.535.722.420,50. Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota/Desa adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Provinsi Jambi TA 2017 dan 2016**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Kota Jambi	87.747.339.926,57	80.760.495.375,60	92,04	66.598.538.835,98
2.	Kabupaten Batang Hari	47.876.014.817,12	44.588.105.588,43	93,13	33.699.973.637,98
3.	Kabupaten Muaro Jambi	50.443.704.053,95	47.294.939.547,73	93,76	35.281.572.103,57
4.	Kabupaten Bungo	54.687.599.790,92	49.881.377.623,01	91,21	38.991.340.072,02
5.	Kabupaten Tebo	47.120.402.831,98	44.554.180.304,11	94,55	33.425.418.195,06
6.	Kabupaten Kerinci	41.749.590.502,98	38.890.975.691,53	93,15	29.012.937.246,60
7.	Kabupaten Merangin	51.098.617.425,30	47.476.289.497,71	92,91	36.872.196.950,03
8.	Kabupaten Sarolangun	48.628.426.382,22	45.013.879.225,22	92,57	33.940.901.349,03
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	47.885.745.803,44	45.004.123.053,34	93,98	33.848.239.999,36
10.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	41.952.535.695,44	38.985.907.297,17	92,93	30.086.019.701,00
11.	Kota Sungai Penuh	39.676.406.770,08	34.897.924.670,49	87,96	27.778.584.329,87
Jumlah		558.866.384.000,00	517.348.197.874,34	92,57	399.535.722.420,50

Belanja tersebut merupakan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.

5.1.3.b Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

31 Desember 2017

31 Desember 2016

Rp156.720.000.000,00

Rp0,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2017 merupakan konversi dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa yang dianggarkan sebesar Rp156.780.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp156.720.000.000,00.

Tabel 5.22 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota	Anggaran	Realisasi	%
1	Kota Sungai Penuh	3.240.000.000,00	3.240.000.000,00	100,00
2	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00
3	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00
4	Kabupaten Muaro Jambi	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
5	Kabupaten Sarolangun	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	100,00
6	Kabupaten Bungo	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00
7	Kabupaten Tebo	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
8	Program Sarana dan Prasarana	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
9	Kota Jambi	6.780.000.000,00	6.720.000.000,00	99,12
10	Kabupaten Merangin	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	100,00
11	Kabupaten Kerinci	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	100,00
12	Kabupaten Batanghari	3.840.000.000,00	3.840.000.000,00	100,00
Jumlah		72.840.000.000,00	72.780.000.000,00	99,92

Tabel 5.23 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa	Anggaran	Realisasi	%
1	Kabupaten Muaro Jambi	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00
2	Kabupaten Batanghari	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00
3	Kabupaten Sarolangun	8.940.000.000,00	8.940.000.000,00	100,00
4	Kabupaten Bungo	8.460.000.000,00	8.460.000.000,00	100,00
5	Kabupaten Tebo	6.420.000.000,00	6.420.000.000,00	100,00
6	Kabupaten Merangin	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100,00
7	Kabupaten Tanjab Barat	6.840.000.000,00	6.840.000.000,00	100,00
8	Kabupaten Tanjab Timur	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	100,00
9	Kabupaten Kerinci	17.100.000.000,00	17.100.000.000,00	100,00
10	Kota Sungai Penuh	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	100,00
	Jumlah	83.940.000.000,00	83.940.000.000,00	100,00

5.1.3.c Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

31 Desember 2017

31 Desember 2016

Rp1.779.661.569,00

Rp1.500.245.247,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik merupakan konversi Bantuan Keuangan Partai Politik yang dianggarkan sebesar Rp1.779.667.322,00 dengan realisasi sebesar Rp1.779.661.569,00 atau sebesar 99,99%, naik sebesar Rp279.416.322,00 atau sebesar 18,62% dari realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2016 sebesar Rp1.500.245.247,00.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Kepada Partai Politik TA 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik			
1	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	87.999.000,00	87.998.806,00	99,99
2	Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	110.160.000,00	110.159.896,00	99,99
3	Belanja Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	72.199.000,00	72.198.033,00	99,99
4	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	214.993.000,00	214.992.011,00	99,99
5	Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	174.661.000,00	174.660.207,00	99,99
6	Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat	251.668.000,00	251.667.134,00	99,99
7	Belanja Bantuan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	149.068.000,00	149.067.813,00	99,99
8	Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	161.079.562,00	161.079.124,00	99,99
9	Belanja Bantuan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	107.181.000,00	107.180.217,00	99,99
10	Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	52.905.000,00	52.904.808,00	99,99
11	Belanja Bantuan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)	397.753.760,00	397.753.520,00	99,99
	JUMLAH	1.779.667.322,00	1.779.661.569,00	99,99

5.1.4 Pembiayaan

31 Desember 2017

31 Desember 2016

Rp278.221.241.857,37

Rp177.910.337.966,67

Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp278.221.241.857,37 dengan realisasi sebesar Rp278.221.241.857,37 atau naik sebesar Rp100.310.903.890,70 atau sebesar 56,38% dari realisasi Pembiayaan TA 2016 sebesar Rp177.910.337.966,67.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi Jambi terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi
TA 2017 dan TA 2016**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Penerimaan Pembiayaan	278.221.241.857,37	278.221.241.857,37	100,00	177.910.337.966,67
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		278.221.241.857,37	278.221.241.857,37	100,00	177.910.337.966,67

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp278.221.241.857,37 **Rp177.910.337.966,67**

Penerimaan Pembiayaan TA 2017 dianggarkan sebesar Rp278.221.241.857,37 dengan realisasi sebesar Rp278.221.241.857,37 atau sebesar 100%, naik sebesar Rp100.310.903.890,70 atau sebesar 56,38% dari realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2016 sebesar Rp177.910.337.966,67.

Penerimaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, apabila anggaran Pendapatan lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran Belanja dan/atau memanfaatkan surplus realisasi APBD tahun sebelumnya guna membiayai Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Jambi TA 2017 dan TA 2016**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Pelampuan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.493.706.705,45	20.238.042.377,69	60,42	20.238.042.377,69
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	244.727.535.151,92	257.983.199.479,68	105,42	157.672.295.588,98
Jumlah		278.221.241.857,37	278.221.241.857,37	100,00	177.910.337.966,67

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp0,00 **Rp0,00**

Pengeluaran Pembiayaan TA 2017 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut pada TA 2016 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp457.071.970.882,36	Rp278.221.241.857,37

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Pemerintah Provinsi Jambi TA 2017 adalah sebesar Rp457.071.970.882,36 yang naik sebesar Rp178.850.729.024,99 atau 64,28% dibandingkan dengan SILPA TA 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp457.071.970.882,36	Rp278.221.241.857,37

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jambi TA 2017 adalah sebesar Rp457.071.970.882,36 yang naik sebesar Rp178.850.729.024,99 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37.

Laporan Perubahan SAL tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp278.221.241.857,37.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2016 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp278.221.241.857,37.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36 Sehingga total SILPA TA 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36

5.2.4 Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebesar (Rp0,00).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp457.071.970.882,36.

5.3 Neraca

5.3.1. Aset

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp7.922.958.480.710,74	Rp6.230.703.051.277,51

Nilai Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.922.958.480.710,74 naik sebesar Rp1.692.255.429.433,23 dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.230.703.051.277,51. Aset sebesar Rp7.922.958.480.710,74 ini sudah termasuk Aset pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebesar Rp1.026.361.050.324,62 (Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) dari P3D sebesar Rp1.031.578.262.406,02 dikurangi dengan barang yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar Rp5.217.212.081,40), juga sudah termasuk Aset yang diperoleh dari Realisasi Belanja Modal BOS Tahun 2017 serta saldo kas BOS 2016 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan surat penyampaian data saldo dana BOS tahun 2016 dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. BMD yang berasal dari P3D pencatatannya masih di Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi selaku Pembantu Pengelola BMD dan belum dapat mendistribusikan pencatatannya pada OPD yang terkait, dan sudah dapat dilakukan perhitungan penyusutan. Aset sebesar Rp7.922.958.480.710,74 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1 Aset Lancar

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp790.298.239.946,44	Rp660.157.534.895,60

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp790.298.239.946,44 naik sebesar Rp130.140.705.050,84 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp660.157.534.895,60. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
-----	--------	----------------------	----------------------

Deposito pada Bank Jambi adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun dan terdiri dari 2 (dua) sertifikat deposito.

2) Deposito Bank BRI

Deposito pada Bank BRI adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun dan terdiri dari 5 (lima) sertifikat deposito.

3) Deposito Bank BTN

Deposito pada Bank BTN adalah sebesar Rp32.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun terdiri dari 5 (lima) sertifikat deposito.

4) Deposito Bank BNI

Deposito pada Bank BNI adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan tingkat suku bunga fluktuatif per tahun terdiri dari 1 (satu) sertifikat.

Rincian saldo deposito dapat dilihat dalam **Lampiran 5**.

5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp351.550,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp351.550,00 naik sebesar Rp351.550,00 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp102.067.000,00	Rp50.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp102.067.000,00, naik sebesar Rp102.017.000,00 dibanding dengan saldo tahun 2016 sebesar Rp50.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp102.067.000,00 yang belum disetor ke Kas Daerah dikarenakan kas tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja terakhir tahun 2017 yang jatuh pada hari libur, sehingga Bank tutup, tidak ada pelayanan.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.30 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	36.075.000,00	0,00
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	56.542.000,00	0,00
3.	Badan Penghubung Daerah	9.450.000,00	
4.	Dinas Kehutanan	0,00	50.000,00
	Jumlah	102.067.000,00	50.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp102.067.000,00 tersebut telah setor ke kas daerah seluruhnya pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp36.075.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Pelayanan tempat olah raga telah disetor ke Kas Daerah per tanggal 02 Januari 2018 dengan Nomor STS: 0001/STS/DPOR-KR/I2018;
2. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp56.542.000,00 merupakan pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi Kebun Binatang Taman Rimbo telah disetor ke Kas Daerah per tanggal 02 Januari 2018 dengan Nomor STS: -;
3. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp9.450.000,00 merupakan pendapatan Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila telah disetor ke Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2017.

5.3.1.1.d Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp36.175.461.224,80 **Rp33.493.706.705,45**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp36.175.461.224,80 naik sebesar Rp2.681.754.519,35 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp33.493.706.705,45. Rincian Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No.	BLUD	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	BLUD Akademi Farmasi	395.207.556,00	0,00
2.	BLUD AAK	28.648.418,46	148.521.163,35
3.	BLUD Balai Lab Kesehatan	611.122.716,00	458.121.903,00
4.	BLUD RSUD Raden Mattaher	31.645.241.204,34	27.203.545.047,10
5.	BLUD RSJ	3.495.241.330,00	5.683.518.592,00
	Jumlah	36.175.461.224,80	33.493.706.705,45

1) BLUD Akademi Farmasi

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Akademi Farmasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp395.207.556,00 yang disimpan pada Bank Jambi nomor rekening 0101046273 atas nama BLUD Akademi Farmasi.

2) BLUD Akademi Analisis Kesehatan (AAK)

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD AAK per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.648.418,46 yang disimpan pada Bank Bukopin nomor rekening 2801200149 atas nama BLUD Akademi Analisis Kesehatan.

3) BLUD Balai Laboratorium Kesehatan

Kas di BLUD Balai Laboratorium Kesehatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp611.122.716,00 yang disimpan pada Bank BNI nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes Jambi.

4) BLUD RSUD Raden Mattaher

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Raden Mattaher per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.645.241.204,34 yang disimpan pada Bank Jambi dengan nomor rekening 101006875 atas nama Bendahara Penerima RSUD Raden Mattaher Jambi.

5) BLUD RSJ Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSJ Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.495.241.330,00 terdiri dari:

a) Kas yang disimpan pada Bank BNI dengan nomor rekening 0186729097 atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 3.485.634.730,00;

b) Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.606.600,00.

5.3.1.1.e Kas di Bendahara BOS

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp22.208.901.711,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.208.901.711,00 (sebesar Rp15.640.207.891,00 merupakan sisa dari Penerimaan dana BOS tahun 2017 yang ditransfer oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada SMA, SMK dan SLB sebesar Rp141.253.860.000,00 dikurangi dengan riil belanja BOS sebesar Rp125.613.652.109,00 dan sebesar Rp5.686.905.461,00 yang ada pada rekening koran dan kas tunai sebesar Rp881.788.359,00). Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat dalam **Lampiran 6**.

5.3.1.1.e Kas lainnya

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp43.790.957.011,30	Rp41.747.722.420,31

Saldo Kas Lainnya adalah Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas lainnya sebesar Rp43.790.957.011,30 terdiri dari:

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT. WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 dan jasa gironya sebesar Rp3.286.769.681,29 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara;

2. Setoran PT. PKP sebesar Rp4.911.791.425,21 (Rp4.653.337.500,00 serta jasa gironya Rp258.453.925,21) berupa kontribusi kerjasama BOT Jambi Bisnis Center yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena status objek kerjasama berupa tanah masih dalam sengketa;
3. Uang Bank Mandiri yang lebih transfer ke kas daerah sebesar Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2018 tanggal 14 Februari 2018.

5.3.1.1.f Investasi Jangka Pendek **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016.

5.3.1.1.g Piutang Pendapatan **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp36.647.042.977,09 **Rp51.312.870.406,17**

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp40.175.974.389,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp3.528.931.411,91 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp36.647.042.977,09 jika dibanding dengan tahun 2016 turun sebesar Rp14.665.827.429,08.

Penyisihan Piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Rincian Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Piutang Pajak PKB dan BBNKB (Dinas Pendapatan)	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Piutang Retribusi	976.568.000,00	962.884.100,00
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan	2.873.306.945,00	2.657.193.231,00
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	28.821.620.144,00	49.306.160.835,00
5.	Piutang Lainnya	7.452.488.000,00	0,00
6.	Penyisihan Piutang	(3.528.931.411,91)	(1.665.359.059,83)
Jumlah		36.647.042.977,09	51.312.870.406,17

5.3.1.1.g.1. Piutang Pendapatan Pajak **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp0,00 **Rp25.995.650,00**

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp51.991.300,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp51.991.300,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp0,00 adalah piutang pajak PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Provinsi Jambi. Dengan rincian piutang pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 5.33 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Pajak PKB dan BBNKB	51.991.300,00	51.991.300,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak	(51.991.300,00)	(25.995.650,00)
Jumlah		0,00	25.995.650,00

Rincian Piutang pajak dan BBNKB per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 7.**

**5.3.1.1.g.2. Piutang Pendapatan Retribusi 31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp15.799.000,00 Rp34.139.291,50**

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp976.568.000,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp960.769.000,00 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp15.799.000,00.

Piutang Retribusi dicatat berdasarkan saldo awal piutang saat ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan kebijakan akuntansi penyisihan piutang dengan membuat daftar umur piutang (*aging schedule*) menurut jenis piutang untuk menilai umur dan penentuan besaran yang akan disisihkan.

Piutang Retribusi terdiri dari piutang Retribusi 2 (dua) SKPD sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.34. Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Kantor Perwakilan Prov. Jambi	36.000.000,00	40.400.000,00
2.	Pemakaian Kekayaan Daerah (BPKAD)	0	854.920.000,00
3.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	940.568.000,00	0
3.	Badan Lingkungan Hidup	0	67.564.100,00
4.	Penyisihan Piutang Retribusi	(960.769.000,00)	(928.744.808,50)
Jumlah		15.799.000,00	34.139.291,50

Rincian Piutang Retribusi per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 8.**

5.3.1.1.g.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp2.292.118.262,29 **Rp2.248.085.116,86**

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.873.306.945,00. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp581.188.682,71 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp2.292.118.626,29. Rincian saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.35 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Piutang atas tagihan PD Angso Putih	397.811.204,00	397.811.204,00
2.	Piutang royalti kerja sama BOT	2.475.495.741,00	2.259.382.027,00
3.	Penyisihan Piutang	(581.188.682,71)	(409.108.114,14)
Jumlah		2.292.118.262,29	2.248.085.116,86

1. Piutang atas tagihan PD Angso Putih merupakan tagihan piutang PD Angso Putih yang sudah ditutup sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 dan menjadi Piutang Pemerintah Provinsi Jambi per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Piutang atas tagihan PD Angso Putih

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Suhelmi, SE/KUD semangat 45 Bangko	58.760.255,00	58.760.255,00
2.	Junaidi Nainggolan	126.805.205,00	126.805.205,00
3.	AR Siregar	129.165.416,00	129.165.416,00
4.	Istiono/Bambang Sriyono	83.080.328,00	83.080.328,00
	Penyisihan Piutang	(397.811.204,00)	(397.811.204,00)
Jumlah Bersih		0,00	0,00

2. Piutang Royalti kerja sama BOT per 31 Desember 2017 jumlahnya sebesar Rp2.292.118.262,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Rincian Piutang Kerjasama (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	PT Simota Putra Parayuda (kerja sama BOT pembangunan WTC)	425.495.741,00	209.382.027,00
2.	PT Jambi Sapta Manunggal (kerja sama BOT pembangunan Hotel Tepian Ratu)	250.000.000,00	250.000.000,00
3.	PT Eraguna Bumi Nusa (kerja sama BOT pembangunan Pasar Angso Duo)	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
4.	Penyisihan Piutang	(183.377.478,71)	(11.296.910,14)
Jumlah		2.292.118.262,29	2.248.085.116,86

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 9**.

5.3.1.1.g.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp26.923.900.154,80 **Rp49.004.650.347,81**

Saldo Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.821.680.144,00. Atas saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.897.779.989,20 sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp26.923.900.154,80.

Tabel 5.38 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD	9.828.682.005,00	23.862.456.028,00
2.	Piutang Pendapatan RSJ	1.424.782.635,00	1.685.158.209,00
3.	Piutang Denda PKB dan BBNKB	15.597.390,00	15.597.390,00
4.	Piutang Taspen atas uang Duka Wafat yang belum dibayarkan	0,00	0,00
5.	Piutang Samisake	17.552.558.114,00	23.742.949.208,00
6.	Penyisihan Piutang	(1.897.719.989,20)	(301.510.487,19)
Jumlah		26.923.900.154,80	49.004.650.347,81

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 10**.

5.3.1.1.h Piutang Lainnya **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp7.415.225.560,00 **Rp0,00**

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.452.488.000,00 atas saldo tersebut dilakukan penyisihan sebesar Rp37.262.440,00 sehingga piutang bersih sebesar Rp7.415.225.560,00. Rincian saldo piutang Lainnya yaitu:

Tabel 5.39 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Piutang Pengembalian Bantuan Keuangan Kabupaten Kerinci	7.435.388.000,00	0,00
2.	Piutang Pengembalian Bantuan Keuangan Kabupaten Bungo	17.100.000,00	0,00
3.	Penyisihan Piutang	(37.262.440,00)	0,00
Jumlah		7.415.225.560,00	0,00

Rincian Piutang Lainnya per umur piutang dapat dilihat dalam **Lampiran 11**.

5.3.1.1.i Beban Dibayar di Muka **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp1.252.163.261,20 **Rp982.645.319,75**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.252.163.261,20 terdiri dari biaya asuransi yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Beban Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Asuransi di Sekretariat Daerah	479.196.555,00	455.139.885,42
2.	Asuransi di Dinas PU	210.202.401,00	147.073.212,50
3.	Asuransi di Inspektorat	37.739.917,00	17.174.350,00
4.	Sekretariat Dewan	347.179.067,20	182.315.867,67
5.	Dinas Peternakan dan Keswan	0,00	2.083.333,33
6.	Badan Penghubung	177.845.321,00	178.858.670,83
Jumlah		1.252.163.261,20	982.645.319,75

Rincian Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.j Persediaan

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp251.536.105.841,48 **Rp287.893.054.891,99**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp251.536.105.841,48 naik sebesar Rp36.356.949.077,51 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp287.893.054.891,99.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Persediaan per Jenis

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Alat Tulis Kantor	1.508.495.044,86	2.164.303.167,65
2.	Obat-Obatan	20.205.170.747,95	38.099.217.383,87
3.	Bahan Kebersihan	502.498.468,7	162.129.015,00
4.	Bahan Makanan	1.062.606.251,98	466.988.976,90
5.	Bibit	1.706.012.100,00	3.452.951.326,10
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	221.251.133.995,53	0,00
7.	Bahan Kimia	1.308.842.796,00	1.031.014.763,40
8.	Pupuk	93.191.950,00	139.446.250,00
9.	Alat Bengkel	2.966.144.125,00	2.852.740.885,00
10.	Bahan Bangunan	0,00	238.745.732.207,53
11.	Sandang/Pakaian	203.260.922,13	406.718.434,67
12.	Alat Kesehatan	276.194.269,33	144.465.756,87
13.	Bahan Listrik	452.555.143,00	227.346.725,00
Jumlah		251.536.105.841,48	287.893.054.891,99

Rincian saldo Persediaan per OPD dan per jenis persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp344.594.455.582,95 **Rp314.986.990.086,77**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp344.594.455.582,95 naik sebesar Rp29.607.465.496,18 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp314.986.990.086,77. Rincian saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Investasi Nonpermanen	17.297.176.950,39	17.286.280.730,38
	Penyisihan KUPEM tak tertagih	(5.274.825.643,94)	(5.097.953.383,37)
	Jumlah Investasi Nonpermanen	12.022.351.306,45	12.188.327.347,01
2.	Investasi Permanen	332.572.104.276,50	302.798.662.739,76
	Jumlah	344.594.455.582,95	314.986.990.086,77

5.3.1.2.a Investasi Nonpermanen **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp12.022.351.306,45 **Rp12.188.327.347,01**

Saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.022.351.306,45 turun sebesar Rp165.976.040,56 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp12.188.327.347,01. Saldo Investasi Non permanen ini berupa saldo Investasi Non Permanen Lainnya yang terdiri dari Dana KUPEM dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.43 Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Dana KUPEM	17.297.176.950,39	17.286.280.730,38
	Penyisihan Dana KUPEM tidak tertagih	(5.274.825.643,94)	(5.097.953.383,37)
	Jumlah Bersih Dana KUPEM	12.022.351.306,45	12.188.327.347,01

1. Dana KUPEM sebesar Rp12.022.351.306,45
2. Saldo dana KUPEM per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.022.351.306,45 turun sebesar Rp165.976.040,56 dibandingkan dengan per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.188.327.347,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Saldo KUPEM

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	KUPEM Pola <i>Channeling</i> (Tunggakan)	3.953.501.079,67	4.098.127.833,67
2.	Saldo Rekening KUPEM yang berada di Kab/Kota	9.957.468.819,69	9.799.020.220,92
3.	Saldo Giro Beku	2.064.882.486,76	2.032.888.686,09
4.	Tunggakan KUPEM Executting	1.247.246.003,27	1.278.739.428,70
5.	Tunggakan KUPEM Executting (pensertifikatan tanah)	74.078.561,00	77.459.561,00
	Jumlah Dana KUPEM	17.297.176.950,39	17.276.100.709,09
1.	penyisihan KUPEM chaneling tak tertagih	(3.953.501.079,67)	(3.741.754.393,67)
2.	penyisihan KUPEM executing tak tertagih	(1.247.246.003,27)	(1.278.739.428,70)
3.	penyisihan KUPEM Pensertifikatan Tanah tak tertagih	(74.078.561,00)	(77.459.561,00)
	Jumlah Penyisihan KUPEM tidak tertagih	(5.274.825.643,94)	(5.097.953.383,37)
	Jumlah Nilai Bersih setelah (penyisihan)	12.022.351.306,45	12.188.327.347,01

KUPEM adalah kredit usaha dan investasi pengembangan usaha yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disalurkan melalui Bank Jambi

kepada petani hortikultura, petani ikan, pedagang/pengumpul pemasaran duku dan industri kecil, dalam rangka pembiayaan usaha tani dan usaha industri kecil.

Terdapat dua pola pelaksanaan program KUPEM yaitu pola *Executing* yang dilaksanakan sejak tahun 2001 s.d. tahun 2004 dan pola *Channeling* yang dilaksanakan sejak tahun 2005. Perbedaan kedua pola tersebut adalah pada tanggung jawab penyaluran, pengelolaan dan pengawasan kredit, dimana pada pola *Executing* semua tanggung jawab tersebut ada pada Bank Jambi, dan pada pola *Channeling* tanggung jawab tersebut ada pada Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaan KUPEM dengan pola *Channeling* dan *Executing* tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Saldo Dana KUPEM per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.022.351.306,45 dapat dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pola *Channeling*, nilai bersih setelah penyisihan KUPEM pola *channeling* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 KUPEM Pola *Channeling* (Tunggakan)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tunggakan kupem Chanelling Modal kerja per 31 Desember 2017	3.953.501.079,67
2.	Akumulasi penyisihan per 31 Desember 2017	(3.953.501.079,67)
Jumlah nilai bersih disajikan		0,00

Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp356.373.440,00 jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp356.373.440,00. Saldo sebesar Rp0,00 sudah dilakukan perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 (rincian perhitungan penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 14**).

Tabel 5.46 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM Chanelling Modal kerja

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Saldo Tunggakan 2017	Penyisihan per 31 Desember 2017	Jumlah (NRV)
1.	Kota Jambi	174.351.674,00	174.351.674,00	-
2.	Kabupaten Batang Hari	262.509.323,00	262.509.323,00	-
3.	Kabupaten Muaro Jambi	456.726.130,67	456.726.130,67	-
4.	Kabupaten Kerinci	335.715.737,00	335.715.737,00	-
5.	Kabupaten Merangin	483.378.336,00	483.378.336,00	-
6.	Kabupaten Sarolangun	556.628.605,00	556.628.605,00	-
7.	Kabupaten Bungo	301.450.467,00	301.450.467,00	-
8.	Kabupaten Tebo	232.627.081,00	232.627.081,00	-
9.	Kabupaten Tanjab Barat	262.684.955,00	262.684.955,00	-
10.	Kabupaten Tanjab Timur	887.428.771,00	887.428.771,00	-
Jumlah		3.953.501.079,67	3.953.501.079,67	-

- 2) Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota sebesar Rp9.957.468.819,69.

Saldo dana KUPEM *Channeling* yang tersimpan pada rekening Kabupaten/Kota per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.957.468.819,69, naik sebesar Rp158.448.598,77 dibandingkan dengan saldo tahun 2016 sebesar

1.	Modal saham	681.778.000.000,00	639.770.000.000,00
2.	modal donasi	-	-
3.	Tambahan Modal Disetor	12.971.986.736,00	7.590.281.735,00
4.	Saldo Laba rugi yang belum direalisasikan atas penerapan perhitungan kembali PSAK 24	573.696.737,00	573.696.737,00
5.	Saldo Laba di tahan yang telah ditentukan Penggunaannya	354.865.153.261,00	286.736.569.441,00
6.	Saldo Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya	245.977.063.873,00	170.321.459.550,00
	TOTAL EKUITAS	1.296.165.900.608,00	1.104.992.007.463,00

Sumber dari Laporan Posisi Keuangan Bank Jambi Per 31 Desember 2017 (Unaudited)

Nilai Investasi di Bank Jambi dengan Metode Ekuitas adalah Rp173.364.000.000,00/Rp681.778.000.000,00 x Rp1.296.165.900.608,00 = Rp329.591.898.232,28.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII) sebesar Rp13.787.500.000,00. Persentasi saham sebesar 99,55%. Berdasarkan presentasi kepemilikan saham yang lebih dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode Ekuitas, sehingga nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Jambi di PT JII menjadi Rp1.790.206.044,23 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Penyertaan Modal di PT JII

(dalam rupiah)

No.	Ekuitas PT JII	per 31 Desember 2017	per 31 Desember 2016
1.	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
2.	Modal saham Afrizal	62.500.000,00	62.500.000,00
	Jumlah Saham	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
3.	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(11.660.681.262,87)	(11.019.090.411,40)
4.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(390.997.524,98)	(641.590.851,47)
	TOTAL EKUITAS	1.798.321.212,15	2.189.318.738,13

Sumber dari Laporan Keuangan PT. JII per 31 Desember 2017

Nilai Investasi di PT. JII dengan Metode Ekuitas adalah

Rp13.787.500.000,00/Rp13.850.000.000,00 x Rp1.798.321.212,15 = Rp1.790.206.044,23.

3. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi di PT. ASKRIDA per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.190.000.000,00 dan tidak terdapat penambahan modal. Persentasi kepemilikan saham sebesar 0,60%. Berdasarkan persentase kepemilikan saham yang kurang dari 20% maka pencatatan atas investasi menggunakan metode biaya (*Cost Method*) yaitu berdasarkan nilai penyertaan modal sebesar Rp1.190.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp5.869.792.729.936,48 Rp4.351.091.973.074,37

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.869.792.729.936,48 naik sebesar Rp1.518.700.756.862,11 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.351.091.973.074,37. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Tanah	755.588.163.101,47	651.861.132.359,00

2.	Peralatan dan Mesin	1.059.612.798.143,19	849.221.633.177,95
3.	Gedung dan Bangunan	1.309.278.538.420,19	802.945.051.431,98
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	6.447.316.543.350,08	5.408.154.358.364,09
5.	Aset Tetap Lainnya	409.861.419.365,05	365.154.755.445,98
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.944.575.231,99	59.740.425.400,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.171.809.307.675,49)	(3.785.985.383.104,63)
Jumlah		5.869.792.729.936,48	4.351.091.973.074,37

5.3.1.3.a Tanah

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp755.588.163.101,47 **Rp651.861.132.359,00**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp755.588.163.101,47, naik sebesar Rp103.727.030.742,47 dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp651.861.132.359,00. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah tahun 2017 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2016	Rp	651.861.132.359,00
Mutasi Tambah	Rp	682.476.115.669,47
Mutasi Kurang	Rp	(578.749.084.927,00)
Jumlah	Rp	755.588.163.101,47

Mutasi tambah sebesar Rp682.476.115.669,47 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp2.800.947.111,00;
2. Mutasi tambah pada Dinas Pertanian Tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan dari Ex Dinas Peternakan Rp137.950.000,00;
3. Mutasi tambah pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah dari ex BPKAD dikarenakan pemisahan OPD sebesar Rp572.548.373.737,00;
4. Mutasi Tambah dari Pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi sebesar Rp106.988.844.821,47.

Mutasi kurang sebesar Rp578.749.084.927,00 terdiri dari:

1. Pengurangan Hibah Tanah dari Dinas Kehutanan ke Kabupaten Batang Hari sebesar Rp3.556.190,00;
2. Pengurangan Tanah ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp572.548.373.737,00;
3. Pengurangan Dobel catat Hibah tanah untuk Asrama Haji Rp6.059.205.000,00;
4. Pengurangan mutasi ke Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan peternakan Rp137.950.000,00.

Beberapa permasalahan tanah yang masih perlu penyelesaian lebih lanjut adalah:

1. Terdapat bangunan-bangunan permanen dan kios-kios milik masyarakat yang berada di atas tanah seluas 9.626 m² terletak di Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura dengan sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu sertifikat HP Nomor 40 Tahun 1972 seluas 1.100.923 m² terletak di

Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura, juga sebagian dikuasai oleh masyarakat.

Pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Tim Penertiban dan Penyelesaian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 413/KEP.GUB/SETDA. BPAKD.3.2/2013 tanggal 11 Juni 2013.

Tim telah melakukan:

- 1) Melakukan pendataan aset Tanah yang dikuasai oleh masyarakat, tumpang tindih, terutama Tanah HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 1972 yang sudah diganti dengan HP Nomor 8 Tahun 2010;
 - 2) Menyiapkan action plan untuk langkah-langkah konkrit;
 - 3) Menyurati pihak BPN untuk mendapat penjelasan tentang riwayat dan risalah Tanah yang bermasalah/dikuasai masyarakat atau tumpang tindih mengenai kepemilikan;
 - 4) Membentuk Tim Kecil untuk melakukan Inventarisasi terhadap HP Nomor 40 Tahun 1972 dan HP Nomor 8 Tahun 2010 dengan melibatkan Pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Camat, Lurat, RT dan masyarakat untuk melakukan inventarisasi, investigasi, pengukuran dilapangan dan melaksanakan negosiasi dengan masyarakat. Terhadap tanah dalam penguasaan masyarakat, penyelesaiannya diusahakan dengan musyawarah/mediasi untuk mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan secara hukum dan telah diserahkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk penyelesaian lebih lanjut;
 - 5) Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi agar dapat mengeluarkan hasil inventarisasi/pengukuran yang telah dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Nomor 31/03-15.71/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014, perihal permohonan mengeluarkan hasil inventarisasi dilapangan. Pihak BPN Kota Jambi telah mengeluarkan hasil inventarisasi dan menyampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat Nomor : 82/03-15.71/II/2014 perihal Permohonan Penjelasan Data dan Luas Tanah dan dilampiri dengan peta dan data lengkap yang nantinya akan dijadikan bahan oleh Biro Hukum untuk penyelesaian selanjutnya;
 - 6) Dalam pengamanan Aset Tanah tersebut telah dilakukan pemasangan papan merk pada lokasi HP Nomor 40 Tahun 1972 dan Tanah HP Nomor 8 Tahun 2010.
2. Tanah seluas 45.710 m² terletak di Kelurahan Pematang Sulur dengan Sertifikat HP Nomor 5 Tahun 1970 diantaranya seluas 19.668 m² digunakan untuk Cadika/Gedung Pramuka dan sisanya sebanyak 13 bidang tanah dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pengamanan melalui pemasangan papan nama sejak tahun 2013.

3)	<i>Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama</i>	5.650.000,00
4)	<i>Biro Umum</i>	5.074.272.500,00
5)	<i>Biro Humas dan Protokol</i>	184.990.000,00
6)	<i>Biro PBMD</i>	12.329.119.732,64
7)	<i>Biro Hukum</i>	72.400.000,00
8)	<i>Biro Organisasi</i>	50.145.000,00
9)	<i>Dinas Sosial Dukcapil</i>	4.922.480.737,08
10)	<i>Dinas Kominfo</i>	2.371.003.458,00
11)	<i>Dinas tanman Pangan dan Hultikultura</i>	14.482.601.539,15
12)	<i>Badan keuangan daerah</i>	25.774.355.909,85
	Jumlah	66.434.318.876,72

4. Hibah sebesar Rp8.042.133.925,00 terdiri dari.

1)	<i>Hibah dari Bank Jambi ke RSUD</i>	914.000.000,00
2)	<i>Hibah dari dinas perhubungan berupa alat berat ke Dinas PU</i>	2.499.794.000,00
3)	<i>Hibah dari Kementerian PP dan PA ke dinas Pemberdayaan Perempuan</i>	231.900.000,00
4)	<i>Hibah dari Perpustakaan Nasional RI ke Dinas Perpustakaan dan Arsip</i>	308.100.000,00
5)	<i>Hibah dari kementerian KP ke Dinas Kelautan</i>	463.697.600,00
6)	<i>Hibah dari Kementerian ke Inspektorat</i>	36.259.000,00
7)	<i>Hibah kendaraan dari BPHP ke Dinas Kehutanan</i>	3.326.131.975,00
8)	<i>Hibah dari Kementerian Pertanian ke Dinas Pendidikan</i>	262.251.350,00
	Jumlah	8.042.133.925,00

5. Mutasi tambah dari pelimpahan Kewenangan (P3D) Kabupaten/kota Ke Provinsi Jambi sebesar Rp96.331.200.758,03.

6. Koreksi BPK Hibah dari BNPB yang belum di catat pada neraca dan buku inventaris sebesar Rp13.954.789.415,00.

7. Mutasi tambah pada Rumah Sakit Umum Daerah aset yang diperoleh dari utang tahun 2017 sebesar Rp2.262.094.205,00.

8. Mutasi tambah dari beban pemeliharaan karena beban tersebut merupakan aset tetap yaitu alat kedokteran CT-Scan pada RSUD Rp1.243.550.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp87.606.550.756,60 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.665.590.978,20 sebagai berikut:

1)	Reklasifikasi Ke Aset Gedung dan Bangunan	
-	<i>Dinas Koperasi dan UMKM</i>	99.700.000,00
	Jumlah (1)	99.700.000,00
2)	Reklasifikasi Ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
-	<i>Dinas Perhubungan</i>	366.235.000,00

Jumlah (2)	366.235.000,00
3) Reklasifikasi Ke Aset Lainnya pada	
– Rumah Sakit Jiwa	502.614.858,00
– Dinas Kominfo	1.162.007.976,00
– Dinas Koperasi UKM	655.726.471,00
– Dinas Penanaman Modal&PTSP	204.952.438,00
– Badan Keuangan daerah	207.852.436,36
– Sekretariat DPRD	2.186.219.389,00
– Biro Umum	7.171.682.409,84
– RSUD	19.400.000,00
– Dinas Kehutanan	89.200.000,00
Jumlah (3)	12.199.655.978,20
Jumlah (1+2+3)	12.665.590.978,20
2. Pengurangan aset pada Ex Dinas Pendapatan Daerah ke Badan Keuangan Daerah akibat penggabungan OPD sebesar Rp25.774.355.909,85	
3. Pengurangan atas barang yang nilai satuannya dibawah kapitalisasi sebesar Rp4.980.836.934,68 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut:	
1) Dinas Pendidikan	3.200.318.703,97
2) Dinas Kesehatan	11.120.000,00
3) Rumah Sakit Umum Daerah	1.129.029.744,71
4) RSJ	198.108.023,00
5) Badan Penanggulangan Bencana	30.171.000,00
6) Kesbangpol	24.490.000,00
7) Pekerjaan Umum	95.841.354,00
8) Dinas Tenaga Kerja	2.250.000,00
9) Dinas Kehutanan	14.978.795,00
10) Dinas Koperasi UKM	18.500.000,00
11) Dinas Kominfo	18.696.599,00
12) Disperindag	1.300.000,00
13) Badan Keuangan Daerah	94.172.915,00
14) Balitbangda	400.000,00
15) Sekretariat DPRD	14.572.800,00
16) Dinas Penanaman Modal & PTSP	89.937.000,00
17) Badan Pengelolaan Milik Daerah	36.950.000,00
Jumlah	4.980.836.934,68
4. Mutasi Kurang antar OPD	
1) Satpol PP	387.527.500,00
2) Dinas Pekerjaan Umum	15.567.462,00
3) Dinas Tenaga Kerja	4.885.854.337,08
4) Dispora	1.545.600.000,00
5) Kelautan dan Perikanan	323.800.000,00
6) Dinas Tanaman Pangan	994.842.505,00
7) Badan Keuangan Daerah	6.925.535.530,64
8) Biro Pemerintahan	36.626.400,00
9) Biro Humas dan Protokol	318.127.949,00

10) Dinas Perhubungan	2.499.794.000,00
11) Dinas Perkebunan	370.000.000,00
12) Dinas Kominfo	211.950.000,00
13) Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.499.980.000,00
Jumlah	23.015.205.683,72

- Pengurangan aset atas Penghapusan Sekretariat KORPRI ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.037.336.132,00.
- Pengurangan aset atas Penggabungan Sekretariat KPID ke Dinas Kominfo sebesar Rp2.083.125.509,00.
- Pengurangan aset atas Penghapusan Badan Koordinasi Penyuluhan ke Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.490.298.070,00.
- Pengurangan aset kendaraan yang hilang pada Disperindag sebesar Rp14.150.000,00.
- Pengurangan aset yang hilang pada Dinas Kehutanan yang di reklas ke Aset Lainnya TPTGR sebesar Rp35.500.000,00.
- Pengurangan Aset kendaraan yang hilang di Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp15.150.000,00.
- Pengurangan aset pada Dinas Peternakan karena penggabungan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Rp14.482.601.539,15.
- Pengurangan Aset kendaraan yang hilang di Dinas Kominfo sebesar Rp12.400.000,00.

Beberapa permasalahan terkait peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

- Terdapat kendaraan dinas roda dua sebanyak 51 unit sebesar Rp429.103.194,30 yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum, dengan rincian pada sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Kendaraan Dinas Roda Dua yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4		Total	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	Biro Umum	51	429.103.194,30				
	Jumlah	51	429.103.194,30				

- Terdapat Kendaraan Dinas Roda Dua Sebanyak 23 Unit dan Kendaraan Roda Empat Sebanyak 6 Unit Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD sebagai berikut:

Tabel 5.52 Rincian Kendaraan Dinas Tidak Dicatat dalam KIB dan LBMD

(dalam rupiah)

No	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tidak Dicatat	Hasil Konfirmasi Perkiraan Harga Kendaraan ke Samsat Kota Jambi		
			Jumlah Kendaraan Diketahui Perkiraan Harganya		Jumlah Kendaraan Tidak Diketahui Perkiraan Harganya
			Roda empat	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3-4)
	Kendaraan Roda Dua				
1.	Biro Umum	22	0	0	22
2.	Dinas Pekerjaan Umum	1	-	-	1
	Sub Jumlah	23	0	0	23
	Kendaraan Roda Empat				
1.	Biro Umum	6	6		6
	Jumlah	29	6	0	29

3. Terdapat permasalahan terkait peminjaman kendaraan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 26 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp4.915.607.777,55 yang dimanfaatkan oleh pihak lain telah kadaluarsa waktu perjanjian pinjam pakainya karena telah melebihi dua tahun dan sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp1.642.750.680,87 dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung dengan dokumen pinjam pakai.
- 2) Sebanyak 7 unit kendaraan dengan nilai sebesar Rp91.618.238,00 digunakan oleh PNS yang telah pensiun sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Kendaraan Digunakan oleh PNS yang Telah Pensiun

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD/Biro	Kendaraan Roda 2		Kendaraan Roda 4	
		Jml (buah)	Nilai (Rp)	Jml (buah)	Nilai (Rp)
1.	Bappeda	1	6.200.000,00		-
2.	Dinas Kesehatan	1	4.500.000,00		-
3.	Disperindag	-	-	1	32.100.000,00
4.	Biro Umum	3	18.050.000,00		
5.	BPBMD	-	-	1	30.768.238,00
	Jumlah	5	28.750.000,00	2	62.868.238,00

- 3) Terdapat kendaraan dinas sebanyak 22 unit dengan nilai sebesar Rp4.013.619.601,86 yang digunakan oleh pegawai yang sudah dimutasi ke OPD lain sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Kendaraan Dinas yang Digunakan oleh Pegawai yang Sudah Dimutasi ke OPD Lain

(dalam rupiah)

No.	Dicatat pada KIB OPD	Jumlah	Nilai	Digunakan pegawai pada OPD
	Kendaraan Roda Dua			
1..	Dinas Pekerjaan Umum	2	89.200.000,00	BPKAD
2..	Badan Ketahanan Pangan	2	18.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah A	4	107.200.000,00	
	Kendaraan Roda Empat			
1.	Biro Umum	15	2.961.019.601,86	Disbudpar, DPRD, Bandiklatda, Set Korpri
2.	Dinas Pekerjaan Umum	2	695.400.000,00	Bappeda, BPKAD
3.	Badan Ketahanan Pangan	1	250.000.000,00	Bakorluh
	Jumlah B	18	3.906.419.601,86	
	Jumlah (A+B)	22	4.013.619.601,86	

2. Reklasifikasi sebesar **Rp2.432.462.000,00** terdiri dari:
- 1) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin pada:
 - *Dinas Koperasi dan UMKM* Rp99.700.000,00
 Jumlah 1) **Rp99.700.000,00**
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada:
 - *Dinas Koperasi* 1.099.037.000,00
 - *Dinas Perkebunan* 939.553.000,00
 - *Badan Penanggulangan Bencana Daerah* 64.600.000,00
 Jumlah 2) **2.103.190.000,00**
 - 3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:
 - *Dinas Kesehatan* 49.775.000,00
 - *Rumah Sakit Jiwa* 92.234.000,00
 - *Dinas Koperasi* 74.563.000,00
 - *Dinas Kelautan Perikanan* 13.000.000,00
 Jumlah 3) **229.572.000,00**
3. Pertambahan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp112.711.885.220,96** terdiri dari:
- 1) *Dinas Pendidikan* 1.246.824.900,00
 - 2) *Dinas Komunikasi dan Informatika* 433.826.000,00
 - 3) *Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan* 25.754.829.058,96
 - 4) *Badan Keuangan Daerah* 29.014.341.543,00
 - 5) *Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah* 45.183.534.768,00
 - 6) *Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi* 11.078.528.951,00
- Jumlah **112.711.885.220,96**
4. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang dibiayai dari Hutang ada terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebesar **Rp264.072.000,00**.
5. Mutasi tambah dari Pelimpahan Kewenangan (P3D) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sebesar **Rp446.301.513.699,87**.
6. Mutasi tambah dari beban pemeliharaan karena beban tersebut merupakan aset tetap sebesar **Rp397.176.000,00**.
- *Badan Kesbangpol* 199.450.000,00
 - *Dinas Lingkungan Hidup* 197.726.000,00
- Jumlah **397.176.000,00**

Mutasi kurang sebesar **Rp164.381.642.116,51** terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke aset selain gedung dan bangunan sebesar **Rp51.210.656.375,88**.

- 1) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada:
 - *Badan Keuangan Daerah* 14.300.000,00
 - *Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah* 77.057.000,00
 - Jumlah 1) **91.357.000,00**

- 2) Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada:
 - *Dinas Kesehatan* 41.800.000,00
 - *Rumah Sakit Jiwa* 96.080.000,00
 - *Dinas Perhubungan* 7.532.633.617,89
 - *Dinas Kelautan dan Perikanan* 1.800.000,00
 - Jumlah 2) **7.672.313.617,89**

- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada:
 - *Dinas Pendidikan* 7.020.128.400,00
 - *Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan* 134.860.000,00
 - *Dinas Perkebunan* 9.085.671.225,00
 - *Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah* 474.915.000,00
 - Jumlah 3) **16.715.574.625,00**

- 4) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada:
 - *RSUD Rd. Mattahter* 7.909.227.700,00
 - *Rumah Sakit Jiwa* 48.850.000,00
 - *Dinas Kelautan dan Perikanan* 62.720.000,00
 - *Badan Keuangan Daerah* 99.480.000,00
 - *Sekretariat DPRD* 91.089.999,99
 - Jumlah 4) **8.211.367.699,99**

- 5) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada:
 - *Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* 18.520.043.433,00
 - Jumlah 5) **18.520.043.433,00**

2. Pengurangan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp112.711.885.220,96** terdiri dari:

- 1) *Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan* 25.754.829.058,96
- 2) *Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan* 1.246.824.900,00
- 3) *Badan Keuangan Daerah* 44.283.528.768,00
- 4) *KPID* 433.826.000,00
- 5) *Dinas Pendapatan Daerah* 29.014.341.543,00
- 6) *Badan Koordinasi dan Penyuluhan* 900.006.000,00
- 7) *Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi* 11.078.528.951,00

Jumlah **112.711.885.220,96**

3. Pengurangan penyesuaian Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena salah penganggaran sebesar **Rp159.650.000,00** terdiri dari:
 - 1) *Dinas Penanaman Modal dan PTSP* 9.700.000,00
 - 2) *Badan Kepegawaian Daerah* 149.950.000,00
 - Jumlah **159.650.000,00**
4. Mutasi kurang karena nilai satuan barang dibawah nilai kapitalisasi sebesar **Rp13.104.019,67** terdapat pada Sekretraiat DPRD.
5. Penghapusan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 932/KEP-GUB/BPKAD/2016 tanggal 8 November 2016 pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp286.346.500,00**.

Beberapa permasalahan terkait Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:
Terdapat 10 unit Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp1.924.752.000,00 yang dalam proses penghapusan.

Tabel 5.57 Rincian Gedung dan Bangunan dalam Proses Penghapusan

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Jumlah (unit)	Nilai	Pengajuan Usulan Penghapusan
1.	BPKAD	6	1.139.016.000,00	24 April 2014
2.	Dinsosnakertrans	3	18.900.000,00	-
3.	Bandiklatda	1	766.836.000,00	Tahun 2013
	Jumlah	10	1.924.752.000,00	

5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp6.447.316.543.350,08

Rp5.408.154.358.364,09

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.447.316.543.350,08 naik sebesar Rp1.039.162.184.985,99 atau 19,21% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.408.154.358.364,09. Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2016	Rp	5.408.154.358.364,09
Mutasi Tambah	Rp	1.047.489.482.512,68
Mutasi Kurang	Rp	<u>(8.327.297.526,69)</u>
Jumlah Nilai perolehan	Rp	6.447.316.543.350,08

Mutasi tambah sebesar **Rp1.047.489.482.512,68** terdiri dari:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 sebesar **Rp658.315.309.836,00** yang tersebar pada 10 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**).
2. Mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi sebesar **Rp361.747.509.469,68**.

3. Reklasifikasi sebesar **Rp16.654.700.417.89** dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pada:

<i>Rumah Sakit Jiwa</i>	<i>Rp</i>	<i>39.900.000,00</i>
<i>Dinas Pekerjaan Umum</i>	<i>Rp</i>	<i>8.576.251.800,00</i>
Jumlah	Rp	8.616.151.800,00

2) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada:

<i>Dinas Perhubungan</i>	<i>Rp</i>	<i>366.235.000,00</i>
Jumlah	Rp	366.235.000,00

3) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:

<i>Dinas Kesehatan</i>	<i>Rp</i>	<i>41.800.000,00</i>
<i>Rumah Sakit Jiwa</i>	<i>Rp</i>	<i>96.080.000,00</i>
<i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i>	<i>Rp</i>	<i>1.800.000,00</i>
<i>Dinas Perhubungan</i>	<i>Rp</i>	<i>7.532.633.617,89</i>
Jumlah	Rp	7.672.313.617,89

4. Mutasi tambah dari beban pemeliharaan dan beban jasa karena beban tersebut merupakan aset tetap sebesar Rp541.567.500,00.

<i>Dinas Perhubungan</i>	<i>Rp</i>	<i>198.456.000,00</i>
<i>Dinas Kominfo</i>	<i>Rp</i>	<i>198.500.000,00</i>
<i>RSUD</i>	<i>Rp</i>	<i>144.611.500,00</i>
Jumlah	Rp	541.567.500,00

5. Mutasi tambah antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp10.230.395.289,11** terdiri dari:

- 1) Mutasi tambah pada Dinas Sosial Dukcapil dari Dinas Sosnakertran sebesar Rp163.567.913,00 ke aset tetap.
- 2) Mutasi tambah hibah dari Kementerian PU sebesar Rp4.912.849.800,00 berupa jalan desa.
- 3) Mutasi tambah pada Dinas Kominfo sebesar Rp61.065.365,00 dari ex.KPID.
- 4) Mutasi tambah pada Dinas Kominfo sebesar Rp2.910.000,00 dari biro humas.
- 5) Mutasi tambah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp3.887.578.435,15 dari ex. Dinas Peternakan.
- 6) Mutasi tambah pada Bakeuda sebesar Rp1.108.076.350,00 dari ex. Dipenda.
- 7) Mutasi tambah pada BPBMD sebesar Rp39.800.000,00 dari Bakeuda.
- 8) Mutasi tambah pada BPBMD sebesar Rp54.547.420,00 dari ex. Bakorluh.
- 9) Mutasi tambah pada Dinas PU sebesar Rp5,96 karena koreksi penyesuaian perhitungan.

Mutasi tambah sebesar **Rp65.645.737.625,57** diatas terdiri dari:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar **Rp16.285.460.642**, yang tersebar pada 7 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**).
2. Reklasifikasi sebesar **Rp16.929.009.625,00** terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada:
 - Dinas Pendidikan 7.020.128.400,00
 - Dinas Perkebunan 9.085.671.225,00
 - Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah 474.915.000,00Jumlah 1) **16.580.714.625,00**
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Jalan Jaringan dan Instalasi pada:
 - Dinas Perkebunan 348.295.000,00Jumlah 2) **348.295.000,00**
3. Pertambahan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar **Rp18.160.960.506,00** terdiri dari:
 - 1) Dinas Sosial Dukupil 115.157.000,00
 - 2) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan 5.420.706.000,00
 - 3) Badan Keuangan Daerah 109.650.000,00
 - 4) Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah 12.515.447.506,00Jumlah **18.160.960.506,00**
4. Pertambahan Aset Tetap Lainnya dari Hibah Organisasi atau Instansi lain sebesar **Rp81.222.309,00** terdiri dari:
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 69.881.400,00
 - 2) Inspektorat 11.340.909,00Jumlah **81.222.309,00**
5. Mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi sebesar **Rp13.730.202.643,57**.
6. Mutasi tambah dari beban pemeliharaan dan beban perlengkapan karena beban tersebut merupakan aset tetap sebesar **Rp458.881.900,00**.
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 159.471.900,00
 - 2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 299.410.000,00Jumlah **458.881.900,00**

Mutasi kurang sebesar **Rp20.939.073.706,50** terdiri dari:

1. Reklasifikasi sebesar **Rp2.108.567.500,00** terdiri dari:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada: | |
| - <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> | 64.600.000,00 |
| - <i>Dinas Koperasi UMKM</i> | 1.099.037.000,00 |
| - <i>Dinas Perkebunan</i> | <u>939.553.000,00</u> |
| Jumlah 1) | 2.103.190.000,00 |
| 2) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada: | |
| - <i>Dinas Kelautan dan Perikanan</i> | <u>5.377.500,00</u> |
| Jumlah 2) | 5.377.500,00 |
| 2. Pengurangan dari Mutasi antar Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp18.077.970.506,00 terdiri dari: | |
| 1) <i>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</i> | 115.157.000,00 |
| 2) <i>Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan</i> | 51.870.000,00 |
| 3) <i>Badan Keuangan Daerah</i> | 12.514.750.106,00 |
| 4) <i>Dinas Peternakan dan Keswan</i> | 5.285.846.000,00 |
| 5) <i>Sekretariat KORPRI</i> | 697.400,00 |
| 6) <i>Dinas Pendapatan Daerah</i> | <u>109.650.000,00</u> |
| Jumlah | 18.077.970.506,00 |
| 3. Penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Kelautan Perikanan berupa binatang ikan yang telah mati dengan nilai sebesar Rp752.535.700,50 . | |

5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp59.944.575.231,99	Rp59.740.425.400,00

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp59.944.575.231,99 naik sebesar Rp204.149.831,99 atau 0,34% dibandingkan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp59.740.425.400,00. Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2016	Rp	59.740.425.400,00
Mutasi Tambah	Rp	9.529.246.631,99
Mutasi Kurang	Rp	<u>(9.325.096.800,00)</u>
Jumlah	Rp	59.944.575.231,99

Mutasi tambah sebesar **Rp9.529.246.631,99** terdiri dari :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Reklasifikasi sebesar Rp8.161.787.699,99 pada: | |
| 1) Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan pada: | |
| - <i>RSUD Rd. Mattaher</i> | 7.909.227.700,00 |

- Rumah Sakit Jiwa	48.850.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	62.720.000,00
- Sekretariat DPRD	<u>91.089.999,99</u>
Jumlah	8.111.887.699,99

2) Reklasifikasi dari Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<u>49.900.000,00</u>
Jumlah	49.900.000,00

2. Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp105.680.000,00** pada Badan Keuangan Daerah yang sebelumnya terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah tetapi berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Bergabung menjadi Badan Keuangan Daerah.

3. Mutasi tambah dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi Jambi sebesar **Rp1.261.778.932,00**.

Mutasi kurang sebesar **Rp9.325.096.800,00** yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke aset selain Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp9.318.896.800,00** dengan rincian sebagai berikut:

1) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan pada:

- Dinas Kesehatan	49.775.000,00
- Rumah Sakit Jiwa	92.234.000,00
- Dinas Koperasi UMKM	74.563.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	<u>13.000.000,00</u>
Jumlah	229.572.000,00

2) Reklasifikasi ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan pada:

- Rumah Sakit Jiwa	39.900.000,00
- Dinas PU PR	<u>8.576.251.800,00</u>
Jumlah	8.616.151.800,00

3) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	212.732.000,00
- Dinas Kelautan dan Perikanan	230.741.000,00
- Dinas Energi Sumber Daya Mineral	<u>29.700.000,00</u>
Jumlah	473.173.000,00

2. Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp6.200.000,00** pada ex Dinas Pendapatan Daerah ke Badan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Bergabung menjadi Badan Keuangan Daerah.

KDP berada pada 13 OPD sebesar Rp59.944.575.231,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo 2017
1	Dinas Pendidikan	1.039.291.000,00
2	Dinas Kesehatan	247.460.000,00
3	RSUD Rd. Mattaheh	45.229.736.700,00
4	Rumah Sakit Jiwa	48.850.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum PR	9.328.617.600,00
6	Dinas Perhubungan	2.449.216.000,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.720.000,00
8	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	13.950.000,00
9	Dinas Perkebunan	29.285.000,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	49.900.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	105.680.000,00
12	Sekretariat DPRD	91.089.999,99
13	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.261.778.932,00
	Jumlah	59.944.575.231,99

5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
(Rp4.171.809.307.675,49) **(Rp3.785.985.383.104,63)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar (Rp4.171.809.307.675,49) naik sebesar (Rp385.823.924.570,86) dibandingkan dengan tahun 2016 (Rp3.785.985.383.104,63). Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017.

Tabel 5.59 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2017
1.	Peralatan dan Mesin	(706.827.185.271,16)
2.	Gedung dan Bangunan	(174.513.673.170,45)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(3.290.468.449.233,88)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	JUMLAH	(4.171.809.307.675,49)

Rincian atas Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2017

31 Desember 2016

-

-

Dana Cadangan per 31 Desember 2017 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun

anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp918.273.055.244,87 **Rp904.466.553.220,78**

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp918.273.055.244,87 atau naik sebesar Rp13.806.502.024,09 atau 1,53% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp904.466.553.220,78. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2016	Rp	904.466.553.220,78
Mutasi Tambah	Rp	24.534.995.760,93
Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Akumulasi Amortisasi	Rp	(869.547.080,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	Rp	(9.858.946.656,84)
Jumlah	Rp	918.273.055.244,87

Tabel 5.60 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	165.725.500,00	44.966.500,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	189.742.089.055,00	189.742.089.055,00
4.	Aset Tidak berwujud	11.167.077.438,66	9.295.795.680,46
5.	Aset Lain-lain	734.679.084.488,30	712.136.129.485,57
6.	Akumulasi Amortisasi	(6.448.141.373,80)	(5.578.594.293,80)
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(11.032.779.863,29)	(1.173.833.206,45)
Jumlah		918.273.055.244,87	904.466.553.220,78

5.3.1.5.a Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp165.725.500,00 **Rp44.966.500,00**

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp165.725.500,00 naik sebesar Rp 120.759.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.966.500,00 merupakan saldo tagihan piutang Ganti Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan surat pembebanan. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdapat pada:

1. Biro Humas Sekretariat Daerah sebesar	Rp	29.900.000,00
2. Bakeuda sebesar	Rp	72.775.500,00
3. Dinas Kominfo	Rp	12.400.000,00
4. Dinas Kehutanan	RP	35.500.000,00
5. Biro PBMD	Rp	15.150.000,00
Jumlah	Rp	165.725.500,00

5.3.1.5.b Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp189.742.089.055,00 **Rp189.742.089.055,00**

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing jumlahnya sebesar Rp189.742.089.055,00 dan Rp189.742.089.055,00 yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT (*BuildOperateTransfer/Bangun Guna Serah*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal	8.333.440.000,00	8.333.440.000,00
2.	BOT dengan PT Simota Putra Prayudha (WTC)	13.986.560.000,00	13.986.560.000,00
3.	BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa	167.422.089.055,00	167.422.089.055,00
Jumlah		189.742.089.055,00	189.742.089.055,00

Hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan kerjasama BOT dengan PT Jambi Sapta Manunggal Pratama (JSMP) dalam pembangunan dan pengelolaan Jambi Tepian Ratu *River View & Resort* di Jalan Slamet Riyadi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Kontrak produksi. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT pada tanggal 27 Januari 1995.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan sebidang tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL) seluas 52.084 m² yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura dan PT JSMP akan memanfaatkan tanah dengan status Hak Guna Bangun (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak produksi, untuk mendirikan Hotel secara bertahap berkapasitas 92 kamar dalam jangka waktu 5 tahun. PT JSMP harus membayar kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 atas pemberian hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dan harus menyediakan dana investasi Rp20.521.096.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun ke-3 sesuai perjanjian. Setiap keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan denda sebesar 1 per mil setiap hari. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

Pencatatan Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) dengan PT JSMP diakui sebesar nilai investasi yaitu Rp8.333.440.000,00 yaitu seluas 52.084 m² dengan Nilai Tanah Tahun 2002 sebesar Rp160.000,00/m².

2. BOT dengan PT Simota Putra Prayudha sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang telah diubah dalam *Addendum I* Kesepakatan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan dengan PT Simota Putra Prayudha dalam pemanfaatan, pembangunan dan pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 1A/KB/OHK/II/2004-Nomor:08/SPP-KB/II/2004 tanggal 28 April 2006. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah*).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kawasan pusat perdagangan dan jasa yang terdiri dari pusat perbelanjaan/Mall dan/atau Hotel. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 10.765 m² senilai Rp13.986.560.000,00. PT Simota Putra Prayudha berkewajiban melakukan pembayaran biaya kompensasi bangunan milik PT Pelindo II, membayar biaya pembuatan sertifikat HPL untuk dan atas nama PT Pelindo II sebesar 50% dari biaya seluruhnya, mengganti tanah dan membangun gedung pusat kesehatan pelabuhan, mengganti pembangunan gedung administrator pelabuhan dan membiayai pembangunan pusat perdagangan/perbelanjaan dan jasa dengan perkiraan investasi Rp105.000.000.000,00 serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sejak pengoperasian/*grand opening*. Jangka waktu BOT tersebut selama 30 tahun.

3. BOT dengan PT Eraguna Bumi Nusa sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Eraguna Bumi Nusa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 – Nomor : 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 9 Juni 2014. Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer/Bangun, Guna, Serah*).

Dalam perjanjian tersebut, dinyatakan bahwa kerjasama tersebut dalam rangka Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. Penyertaan Provinsi Jambi berupa tanah seluas 71.757 m² senilai Rp167.422.089.055,00. PT Eraguna Bumi Nusa berkewajiban menyediakan biaya pembangunan sebesar Rp146.176.200.000,00 untuk membangun pasar dan fasilitas penunjang lainnya serta berkewajiban membayar royalti kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp14.617.000.000,00 selama jangka waktu BOT tersebut selama 5 tahun.

Selain BOT di atas, Pemprov Jambi juga mengadakan kerjasama BOT dengan PT Putra Kurnia Properti sesuai dengan perjanjian $\frac{\text{Nomor :PK.GUB/PU/2014}}{\text{Nomor :001/JBC-PKP/VI/2014}}$

tanggal 9 Juni 2014 perihal kerja sama pembangunan dan pengelolaan kawasan Jambi Bisnis Center (JBC). Perjanjian tersebut pada prinsipnya adalah BOT (*Build, Operate, Transfer*/Bangun, Guna, Serah) dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Pemprov Jambi menyerahkan tanah seluas 76.750 m² dan bangunan di atasnya dengan nilai appraisal sebesar Rp208.000.000.000,00 yang beralamat di Jalan Kapten A. Bakarudin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura sedangkan PT Putra Kurnia Properti membangun fasilitas dan mengelola Jambi Bisnis Center dengan perkiraan biaya pembangunan dan biaya pengelolaan sebesar Rp1.501.267.500.000,00 serta wajib membayar biaya kontribusi sebesar Rp56.411.250.000,00 yang diangsur selama 30 tahun. Sampai 31 Desember 2016, status tanah yang dikerjasamakan masih berupa hak pakai dan belum menjadi hak pengelolaan serta masih dalam sengketa yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi Jambi No. 62/PDT/2014/PT.JMB tanggal 26 Januari 2015 dan sekarang masih dalam proses banding di Mahkamah Agung. Oleh karena itu nilai BOT dengan PT Putra Kurnia Properti belum dapat dicatat sebagai Aset Lainnya.

5.3.1.5.c Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp11.167.077.438,66	Rp9.295.795.680,46

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.167.077.438,66 naik sebesar Rp 1.871.281.758,20 atau 20,13% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.295.795.680,46

Saldo Tahun 2016	Rp	9.295.795.680,46
Mutasi Tambah	Rp	4.176.221.758,20
Mutasi Kurang	Rp	(2.304.940.000,00)
Jumlah	Rp	11.167.077.438,66

Mutasi Tambah sebesar **Rp4.176.221.758,20** terdiri dari:

- 1) Reklas tambah dari Peralatan dan Mesin pada RSUD sebesar Rp19.400.000,00.
- 2) Mutasi dari Ex Sosnakertran (Pemisahan OPD) pada Dinas Sosdukcapil sebesar Rp1.851.881.758,20.
- 3) Mutasi tambah akibat penggabungan dari Dinas Pendapatan ke Bakeuda sebesar Rp2.267.500.000,00.
- 4) Mutasi tambah akibat pemisahan OPD dari Bakeuda (ex BPKAD) pada Biro PBMD sebesar Rp37.440.000,00.

Mutasi Kurang sebesar **Rp2.304.940.000,00** terdiri dari:

- Mutasi kurang pada Bakeuda sebesar Rp37.440.000,00 ke Biro PBMD.

- Mutasi kurang pada ex. Dinas Pendapatan sebesar Rp2.267.500.000,00 ke Bakeuda.

5.3.1.5.d Aset Lain-lain **31 Desember 2017**
Rp734.679.084.488,30 **31 Desember 2016**
Rp712.136.129.485,57

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp734.679.084.488,30 naik sebesar Rp22.542.955.002,73 atau 3,17% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2016 sebesar Rp712.136.129.485,57. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2016	Rp	712.136.129.485,57
Mutasi Tambah	Rp	68.392.415.591,35
Mutasi Kurang	Rp	(45.849.460.588,62)
Jumlah	Rp	734.679.084.488,30

Mutasi tambah sebesar **Rp68.392.415.591,35** yang terdiri dari:

1. Mutasi antar OPD:

1	Mutasi dari Biro Humas ke Kominfo	Rp	4.900.000,00
2	Mutasi dari Ex BPKAD pada Biro PBMD	Rp	1.262.894.491,00
3	Mutasi dari Ex Dinas Pendapatan pada Bakeuda	Rp	859.379.371,22
4	Mutasi dari Ex Dinas Peternakan	Rp	30.556.674.298,60
5	Mutasi dari KPID ke Kominfo	Rp	61.526.000,00
	Jumlah	Rp	32.745.374.160,82

2. Reklasifikasi antar OPD:

1	Reklasifikasi dari peralatan dan mesin pada RSJ	Rp	502.614.858,00
2	Reklasifikasi dari ATL pada Dinas Kelautan Perikanan	Rp	5.377.500,00
3	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas PU PERA	Rp	18.520.043.433,00
4	Reklasifikasi dari J I J pada Bakeuda	Rp	5.875.000,00
5	Reklasifikasi dari KDP pada Dinas ESDM	Rp	29.700.000,00
6	Reklasifikasi dari KDP pada Dinas Kelautan Perikanan	Rp	230.741.000,00
7	Reklasifikasi dari KDP pada dinas Budpar	Rp	212.732.000,00
8	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Bakeuda	Rp	207.852.436,36
9	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Biro Umum	Rp	7.171.682.409,84
10	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Dinas kehutanan	Rp	100.000,00

11	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin pada Set DPRD	Rp 2.186.219.389,00
12	Reklasifikasi dari peralatan dan mesin pada Dinas Kominfo	Rp 1.162.007.976,00
13	Reklasifikasi dari peralatan dan mesin pada dinas Koperasi UKM	Rp 670.726.471,00
14	Reklasifikasi dari peralatan dan mesin pada dinas Penanaman Modal dan PTSP	<u>Rp 204.952.438,00</u>
Jumlah		Rp 31.110.624.911,20

3. Penambahan Piutang lainnya (hasil pemeriksaan) pada Dinas PU Pera sebesar Rp4.536.416.519,33.

Mutasi kurang sebesar **Rp45.849.460.588,62** terdiri dari:

1. Mutasi Kurang antar OPD :

1	Mutasi ke Kominfo pada Biro Humas	Rp 7.393.900,00
2	Mutasi dari Ex Bakorluh pada Biro PBMD	Rp 28.435.000,00
4	Mutasi dari Ex Dipenda pada Bakeuda	Rp 859.379.371,22
5	Mutasi dari Ex Disnak Keswan pada Distan Hortikultura dan Peternakan	Rp 30.556.674.298,60
6	Mutasi dari Ex KPID pada Kominfo	Rp 61.526.000,00
7	Mutasi dari Nakertrans ke Sosdukcapi	<u>Rp 1.851.881.758,20</u>
Jumlah		Rp 33.365.290.328,02

2. Penghapusan:

1	Penghapusan Aset pada R S J	Rp 1.800.111.469,00
2	Penghapusan pada Bakeuda	Rp 1.262.894.491,00
3	Penghapusan pada Biro Kesramas	Rp 577.306.507,36
4	Penghapusan pada BPSDM	Rp 2.373.267.147,00
5	Penghapusan pada Dinas Ketahanan Pangan	Rp 542.524.862,00
6	Penghapusan pada Dinas Lingkungan hidup	Rp 1.317.438.159,00
7	Penghapusan pada Disbun	Rp 454.735.182,00
8	Penghapusan pada Dishut	Rp 237.197.368,64
9	Penghapusan pada Disperindag0	Rp 700.696.885,02
10	Penghapusan pada DKP	<u>Rp 2.862.170.851,00</u>
Jumlah		Rp 12.128.342.922,02

3. Pengurangan Piutang lainnya (hasil pemeriksaan) pada Dinas PUPR sebesar Rp105.827.338,58.

(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2017	Saldo 31 Desember 2016
1.	Dinas Pendidikan	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
2.	Dinas kesehatan	(7.942.000,00)	(2.926.000,00)
3.	Rumah Sakit Umum	(61.870.000,00)	(44.220.000,00)
4.	Pekerjaan Umum	(1.079.844.000,00)	(873.161.200,00)
5.	Dinas Perhubungan	(1.704.608.000,00)	(1.363.686.400,00)
6.	BPMD &PPT	(53.833.333,33)	(15.833.333,33)
7.	Biro Hukum	(129.480.000,00)	(122.094.000)
8.	Biro Pembangunan dan kerja sama	(45.696.640,00)	(34.272.480,00)
9.	biro umum	(65.982.880,47)	(65.982.880,47)
10.	BPKAD	-	(29.952.000,00)
11.	Biro PBMD	(37.440.000,00)	(0,00)
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(861.444.520,00)	(626.466.000,00)
Jumlah		(6.448.141.373,80)	(5.578.594.293,80)

5.3.1.5.f Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
(Rp11.032.779.863,29) **(Rp1.173.833.206,45)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar (Rp11.032.779.863,29), naik sebesar (Rp9.858.946.656,84) dibanding tahun 2016 (Rp1.173.833.206,45). Adapun Rincian Akumulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel 5.63 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	OPD	Saldo 31 Desember 2017	Saldo 31 Desember 2016
1.	Satpol PP	(20.852.295,00)	(20.852.295,00)
2.	KPID	(41.942.756,00)	(41.942.756,00)
3.	Biro Umum	(1.111.038.155,45)	(1.111.038.155,45)
4.	Kominfo	(41.942.736,00)	0,00
5.	RSJ	(501.044.858,00)	0,00
6.	Set DPRD	(2.186.219.389,00)	0,00
Jumlah		(11.032.779.863,29)	(1.173.833.206,45)

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp347.596.657.213,20 **Rp213.411.027.840,28**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2017, kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp347.596.657.213,20 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Rincian mutasi kewajiban sebagai berikut:

Saldo Tahun 2016	Rp	213.411.027.840,28
Mutasi Tambah	Rp	301.508.434.792,89
Mutasi Kurang	Rp	(167.322.805.419,97)

Jumlah **Rp** **347.596.657.213,20**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp347.596.657.213,20 **Rp213.411.027.840,28**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp347.596.657.213,20 atau naik sebesar Rp134.185.629.372,92 dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp213.411.027.840,28. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.64 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Utang PFK	-	-
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	43.790.957.011,30	41.747.722.420,31
3.	Utang Belanja	1.705.840.898,00	1.515.968.967,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	302.099.859.303,90	170.147.336.452,97
Jumlah		347.596.657.213,20	213.411.027.840,28

5.3.2.1.a Utang PFK **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp0,00 **Rp0,00**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah nihil. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.3.2.1.b Utang Kepada Pihak Ketiga **31 Desember 2017** **31 Desember 2016**
Rp43.790.957.011,30 **Rp41.741.722.420,31**

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp43.790.957.011,30 atau naik sebesar Rp2.043.234.590,99 dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp41.741.722.420,31. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

1. Setoran Ganti Rugi Tegakan dari PT WKS sebesar Rp35.591.895.904,80 yang salah setor ke Kas Daerah, seharusnya disetor ke Kas Negara.
2. Setoran dari PT Putra Kurnia Properti sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.653.337.500,00 (sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp3.666.337.500,00, dan tahun 2017 sebesar Rp987.000.000,00 sebagai kontribusi perjanjian kerjasama bangun guna serah pembangunan Jambi Bisnis Center. Namun perjanjian ini belum efektif berjalan karena status tanah yang dikerjasamakan masih sengketa kepemilikan dengan masyarakat.

3. Penambahan Jasa Giro dari PT WKS sebesar Rp3.286.769.681,29 (tahun 2014 S/d 2016 sebesar Rp2.327.838.908,49 dan tahun 2017 sebesar Rp958.930.772,80).
4. Penambahan Jasa Giro dari PT Kurnia Property sebesar Rp258.453.925,21 (tahun 2016 sebesar Rp161.650.107,02 dan tahun 2017 sebesar Rp96.803.818,19).
5. Kelebihan transfer ke kas daerah sebesar Rp500.000,00 atas transaksi setoran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah dari Kantor Penghubung Pemda di Jakarta (seharusnya Rp500.000,00 terkirim Rp1.000.000,00) sesuai surat dari Bank Mandiri Nomor R04.Br.JCN/41/2018 tanggal 14 Februari 2018.

5.3.2.1.c Utang Belanja

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp 1.705.840.898,00	Rp1.515.968.967,00

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.705.840.898,00 atau naik sebesar Rp189.871.931,00 dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.515.968.967,00. (Rincian bisa dilihat pada **Lampiran 21**).

5.3.2.1.d Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp302.099.859.303,90	Rp170.147.336.452,97

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp302.099.859.303,90 naik sebesar Rp131.952.522.850,93 dari saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp170.147.336.452,97.

Adapun rincian utang jangka pendek lainnya adalah sebagai berikut :

1. Utang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp29.446.889.753,00.
2. Utang pada Bakeuda-SKPKD sebesar Rp248.119.009.850,89 yang merupakan utang Bagi Hasil dan Pajak Rokok pada Kabupaten / Kota Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp110.978.448.636,17, Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp137.118.746.144,72, yang belum ditransfer kepada Kabupaten/Kota dan kurang menyalurkan dana bagi hasil Kabupaten/Kota sebesar Rp21.815.070,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.a. Bagi Hasil Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp110.978.448.636,17 tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan III Tahun 2017

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Kurang Salur DBH Triwulan III
1.	Kota Jambi	18.131.632.441,53

2.	Kabupaten Batanghari	9.382.182.844,15
3.	Kabupaten Bungo	11.051.520.672,54
4.	Kabupaten Tebo	9.158.331.648,47
5.	Kabupaten Merangin	9.966.953.921,82
6.	Kabupaten Sarolangun	9.418.043.165,83
7.	Kabupaten Muaro Jambi	9.782.812.729,68
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	9.428.527.233,80
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8.340.666.274,06
10.	Kota Sungai Penuh	8.187.791.985,67
11.	Kabupaten Kerinci	8.129.985.718,62
Jumlah		110.978.448.636,17

2.b. Bagi hasil dan Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2017, sebesar Rp137.118.746.144,72 belum ada Peraturan Gubernur Jambi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV Tahun 2017, Triwulan II dan III Tahun 2017
(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	Kurang Salur Triwulan IV	
		DBH	Pajak Rokok
1.	Kota Jambi	18.314.190.510,93	3.460.491.051,37
2.	Kabupaten Batanghari	9.407.199.156,28	2.336.766.919,82
3.	Kabupaten Bungo	11.152.599.611,56	2.409.590.344,60
4.	Kabupaten Tebo	9.125.217.864,94	2.405.520.711,53
5.	Kabupaten Merangin	9.980.052.045,91	2.427.969.697,66
6.	Kabupaten Sarolangun	9.444.500.878,07	2.354.365.536,97
7.	Kabupaten Muaro Jambi	9.757.221.922,17	2.527.798.287,21
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	9.377.066.352,31	2.384.527.590,42
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8.343.168.245,96	2.013.263.149,87
10.	Kota Sungai Penuh	8.182.364.080,16	1.566.953.770,28
11.	Kabupaten Kerinci	8.086.385.420,64	2.061.532.996,06
Jumlah		111.169.966.088,93	25.948.780.055,79
Total			137.118.746.144,72

- 2.c. Kurang menyalurkan dana bagi hasil Kabupaten/Kota sebesar Rp21.815.070,00.
3. Utang Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kabupaten Merangin berupa Belanja bantuan Keuangan bersifat khusus sebesar Rp4.340.500.000,00.
 4. Utang Dinas Pendidikan sebesar Rp6.206.780.000,00 merupakan :
 - 1) Utang belanja peralatan dan mesin sebesar Rp198.880.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan.
 - 2) Utang belanja Bangunan RKB sebesar Rp814.433.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan.
 - 3) Utang belanja Pengawasan pembangunan RKB sebesar Rp114.763.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan.
 - 4) Utang belanja Pembangunan Turap/Pagar sebesar Rp5.078.704.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan.

5. Utang Badan Perencanaan dan Pembangunan sebesar Rp1.275.000.000,00 merupakan utang belanja kegiatan Pelaksanaan Tata Ruang, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Study Ruang Terbuka Hijau Muara Sabak sebesar Rp275.000.000,00.
6. Utang pada Dinas PUPR sebesar Rp12.711.679.700,00 berupa Pekerjaan Eskalasi ruas jalan Simpang Pulau Rengas-Dusun Tuo-Jangkat sebesar Rp12.711.105.700,00 dan biaya perkara pengadilan sebesar Rp574.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp7.575.361.823.497,54 Rp6.017.292.023.437,23

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut.

Saldo Tahun 2016	Rp	6.017.292.023.437,23
Mutasi Tambah	<u>Rp</u>	<u>1.558.069.800.060,31</u>
Saldo Tahun 2017	Rp	7.575.361.823.497,54

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp4.286.145.484.565,36 Rp3.492.149.141.678,24

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp4.286.145.484.565,36 naik sebesar Rp793.998.342.887,12 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp3.492.149.141.678,24. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:

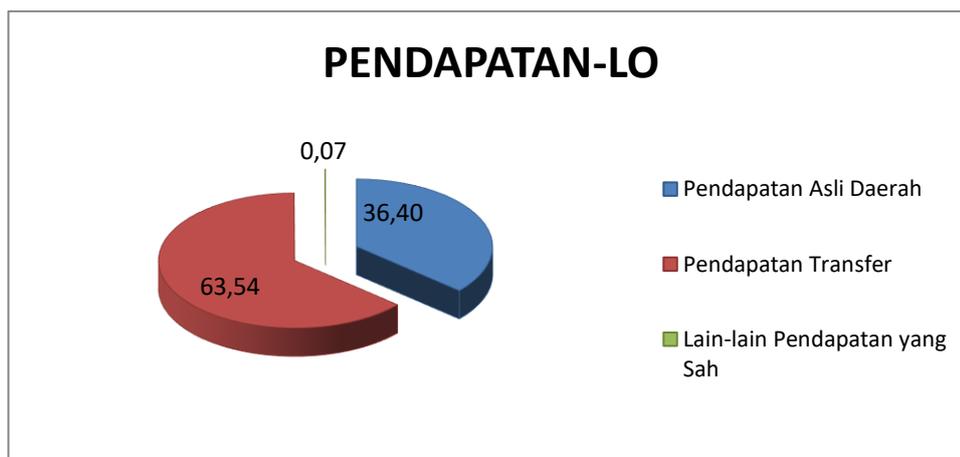
Tabel 5.67 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.560.050.184.265,36	1.285.135.945.576,74
2.	Pendapatan Transfer	2.723.260.588.950,00	2.159.679.608.454,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.834.711.350,00	47.331.587.647,50
Jumlah		4.286.145.484.565,36	3.492.149.141.678,24

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36,40% dan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan adalah sebesar 63,54% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 0,07% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2017



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 63,54% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.560.050.184.265,36 **Rp1.285.135.945.576,74**

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.560.050.184.265,36 naik sebesar Rp274.914.238.688,62 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp1.285.135.945.576,74. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2017 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.68 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	% thd PAD	Realisasi 2016	% thd PAD
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.316.162.467.485,16	84,37%	966.519.347.102,57	75,21%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.878.635.906,00	1,27%	19.067.502.125,00	1,48%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.270.584.180,63	1,88%	30.244.039.170,41	2,35%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194.738.496.693,57	12,48%	269.305.057.178,76	20,96%
Jumlah		1.560.050.184.265,36	100,00%	1.285.135.945.576,74	100,00%

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah – LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp1.316.162.467.485,16 **Rp966.519.347.102,57**

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp1.316.162.467.485,16 atau sebesar 36,18% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 naik sebesar Rp349.643.120.382,59 jika dibandingkan dengan TA 2016 sebesar Rp966.519.347.102,57.

Tabel 5.69 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	416.706.232.791,00	339.443.747.598,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	329.507.745.800,00	243.963.112.550,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	300.364.910.839,16	249.250.031.331,57
4.	Pajak Air Permukaan	1.227.053.782,00	1.193.160.472,00
4.	Pajak Rokok	268.356.524.273,00	132.669.295.151,00
Jumlah		1.316.162.467.485,16	966.519.347.102,57

5.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp19.878.635.906,00 Rp19.067.502.125,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 sebesar Rp19.878.635.906,00 atau sebesar 4,25% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 naik sebesar Rp811.133.781,00 dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp19.067.502.125,00.

Tabel 5.70 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	0,00
2	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	312.242.500,00	577.141.250,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	1.403.400.000,00	196.475.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	-	1.106.800.000,00
5	Retribusi iPemakaian Kekayaan Daerah Tanah/Bangunan	1.292.760.000,00	1.249.542.000,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	329.993.000,00	289.672.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan	1.455.950.000,00	1.964.865.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.904.975.000,00	2.941.877.000,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.552.971.677,00	2.932.449.070,00
10	Retribusi Izin Trayek	4.200.000,00	24.850.000,00
11	Retribusi Perpanjangan IMTA	505.768.200,00	333.631.800,00
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	3.859.907.251,00	3.845.007.925,00
13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	611.180.000,00	698.880.000,00
14	Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.575.000,00	43.000.000,00
15	Retribusi iPelayanan Jasa Kepelabuhan	45.000.000,00	38.500.000,00

16	Retribusi Tempat Rekreasi	3.172.342.000,00	2.769.368.000,00
17	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	7.500.000,00	-
18	Sewa Alat Berat	399.871.278,00	55.393.080,00
19	Sewa Gedung Sport Hall Indoor	-	-
20	Sewa Tempat di TMII	-	-
21	Sewa Aula Bandiklatda	-	-
22	Sewa kamar Asrama 1 dan 2	-	-
23	Sewa Ruang Belajar	-	-
24	Taman Hutan Kenali	-	50.000,00
Jumlah		19.878.635.906,00	19.067.502.125,00

5.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp29.270.584.180,63 **Rp30.244.039.170,41**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar TA 2017 sebesar Rp29.270.584.180,63 atau sebesar 3,22% turun sebesar Rp973.454.989,78 dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 sebesar Rp30.244.039.170,41.

**Tabel 5.71 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan-LO Periode 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Bagi Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta	626.827.425,00	1.310.476.233,00
2	Bagi Laba penyertaan pada BPD Jambi	27.968.261.014,63	25.193.367.803,41
3	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. JSP Jambi	250.000.000,00	500.000.000,00
4	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Simota Putra Parayuda	425.495.741,00	453.195.134,00
5	Bagi Laba atas Penyertaan Modal PT. Eraguna Bumi Nusa	-	1.800.000.000,00
6	Bagi Laba atas penyertaan Modal pada PT. JBC	-	987.000.000,00
Jumlah		29.270.584.180,63	30.244.039.170,41

5.4.1.1.d Lain-lain PAD Yang Sah – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp194.738.496.693,57 **Rp269.305.057.178,76**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp194.738.496.693,57 atau sebesar 27,69% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 turun sebesar Rp74.566.560.485,19 dibandingkan TA 2016 sebesar Rp269.305.057.178,76.

Tabel 5.72 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	1.552.676.984,66	938.368.163,50
2	Penerimaan Jasa Giro	5.991.200.949,26	5.598.475.037,38
3	Pendapatan bunga	39.669.093.747,62	20.917.736.042,93
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	23.712.080,00	666.317.980,00

5	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	904.720.421,00	395.699.504,30
6	Pendapatan Denda Pajak	19.545.188.420,00	29.829.473.962,58
7	Pendapatan Denda Retribusi	7.136.000,00	1.372.100,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	58.300,00	36.312.925.779,71
9	Pendapatan Zakat	2.380.356.451,17	4.259.839.511,35
10	Pendapatan BLUD	117.422.599.982,86	145.813.574.889,01
11	Pendapatan pengambilan gaji/tunjangan/Taspen	179.586.303,00	-
12	Pendapatan Pengembalian Setoran Pihak ke 3	10.196.733.768,00	-
	Lain-lain PAD yang Sah	(3.134.566.714,00)	24.571.274.208,00
13	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	-	-
14	Pendapatan dari setoran dealer dan kendaraan luar daerah	-	-
15	Pendapatan Uang Duka dari PT. Taspen	-	-
Jumlah		194.738.496.693,57	269.305.057.178,76

5.4.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp2.723.260.588.950,00 Rp2.159.679.608.454,00

Pendapatan Transfer-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.723.260.588.950,00. Naik sebesar Rp563.580.980.496,00 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.159.679.608.454,00 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.73 Pendapatan Transfer - LO Provinsi Jambi Periode 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.723.260.588.950,00	100,00	1.547.888.628.151,00	71,67
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	0,00	611.790.980.303,00	28,33
Jumlah		2.723.260.588.950,00	100,00	2.159.679.608.454,00	100,00

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

31 Desember 2017 31 Desember 2016
Rp2.723.260.588.950,00 Rp1.547.888.628.151,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.723.260.588.950,00 atau sebesar 75,93% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2017 naik sebesar Rp1.175.371.960.799,00 dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp1.547.888.628.151,00.

Tabel 5.74 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Bagi Hasil Pajak	186.374.450.163,00	219.290.388.270,00
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	204.146.304.551,00	176.500.909.423,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.397.912.161.000,00	1.070.452.478.000,00

4.	Dana Alokasi Khusus	934.824.673.236,00	81.644.852.458,00
Jumlah		2.723.260.588.950,00	1.547.888.628.151,00

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp,00 **Rp611.790.980.303,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2016 turun sebesar Rp611.790.980.303,00 dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp611.790.980.303,00.

5.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp2.834.711.350,00 **Rp47.331.587.647,50**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp2.834.711.350,00 turun sebesar Rp44.496.876.297,50 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp47.331.587.647,50. Realisasi Lain - lain Pendapatan yang Sah tersebut didalamnya termasuk pendapatan hibah bantuan mobil *ambulance* dan mobil jenazah dari Bank Jambi senilai Rp914.000.000,00 dan pendapatan hibah lainnya Jasa Raharja sebesar Rp1.470.960.000,00.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp2.834.711.350,00 **Rp47.331.587.647,50**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2017 sebesar Rp2.834.711.350,00 turun sebesar Rp44.496.876.297,50 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp47.331.587.647,50. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.75 Pendapatan Hibah Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan ke Dinas Kesehatan	-	45.929.987.647,50
2	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	2.834.711.350,00	1.401.600.000,00
Jumlah		2.834.711.350,00	47.331.587.647,50

5.4.3.2 Pendapatan Lainnya – LO

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**

Rp0,00

Rp0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2017 sebesar Rp0,00 dan pada tahun 2016 naik sebesar Rp0,00.

5.4.4 BEBAN

31 Desember 2017 **31 Desember 2016**
Rp3.592.663.168.207,45 **Rp2.705.107.906.898,02**

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp3.592.663.168.207,45 naik sebesar Rp887.555.261.309,44 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp2.705.107.906.898,02 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017
1	Beban Operasi	2.924.245.981.694,11
2	Beban Transfer	668.417.186.513,34
Jumlah		3.592.663.168.207,45

Beban Operasi Provinsi Jambi Tahun 2017 sebesar Rp2.924.245.981.694,11 terdiri dari:

Tabel 5.77 Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai	1.127.675.453.538,60
2	Beban Persediaan	246.640.129.458,51
3	Beban Jasa	458.216.934.616,00
4	Beban Pemeliharaan	36.550.911.561,00
5	Beban Perjalanan Dinas	140.893.533.093,00
6	Beban Bunga	0,00
7	Beban Subsidi	0,00
8	Beban Hibah	586.336.320.620,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	325.214.206.454,93
11	Beban Penyisihan Piutang	2.718.492.352,08
Jumlah Beban Operasi		2.924.245.981.694,11

Beban Transfer Provinsi Jambi Tahun 2017 sebesar Rp668.417.186.513,34 terdiri dari:

Tabel 5.78 Realisasi Beban Transfer Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Beban Transfer	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	517.370.012.944,34
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya	58.367.512.000,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	92.679.661.569,00
Jumlah Beban Transfer		668.417.186.513,34

5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp1.127.675.453.538,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	746.528.026.587,00	401.900.706.776,33
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	150.667.930.597,00	140.408.564.400,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH WKDH-LO	8.623.500.000,00	7.724.800.000,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21.472.461.264,00	19.757.352.306,00
5	Beban Belanja Pegawai BLUD	52.505.590.890,60	52.588.453.025,00
6	Beban Honorarium LPPK/TEPRA	287.000.000,00	295.500.000,00
7	Beban Tunjangan Profesi Guru	142.793.885.400,00	0,00
8	Beban Tunjangan Penghasilan Guru	4.726.500.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Khusus Guru	70.558.800,00	0,00
10	Beban Uang Lembur - LO	0,00	536.967.490,00
Jumlah		1.127.675.453.538,60	623.212.343.997,33

5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp246.640.129.458,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Beban Bahan Pakai Habis	84.766.324.517,71	101.105.879.768,49
2	Beban Persediaan Bahan/Material	423.331.760.021,33	37.460.900.586,88
3	Beban Cetak dan Penggandaan	17.144.526.458,00	19.840.301.188,00
4	Beban Makanan dan Minuman	35.040.597.074,00	13.416.117.859,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	4.816.851.845,00	3.596.706.900,00
6	Beban Pakaian Kerja	1.350.486.000,00	1.596.300.798,00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	2.725.377.750,00	2.993.416.700,00
8	Beban Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga	(322.535.794.207,53)	49.038.833.600,00
Jumlah Beban Persediaan		246.640.129.458,51	229.048.457.400,37

5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp458.216.934.616,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Beban Jasa Kantor	169.812.699.029,45	226.444.192.200,00
2	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	810.000.000,00	739.000.000,00
3	Beban Honorarium PNS	29.038.844.575,00	25.848.340.100,00
4	Beban honorarium Non PNS	93.688.296.500,00	43.786.504.000,00
5	Beban Premi Asuransi	3.074.093.893,55	2.728.828.858,25
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	6.048.772.966,00	3.259.621.026,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	13.710.846.000,00	25.000.000,00
8	Beban Sewa Alat Berat	1.082.000.000,00	0,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.617.843.100,00	6.550.175.076,00
10	Beban Jasa konsultasi	19.433.992.100,00	10.330.996.850,00

11	Beban kursus, pelatihan, Bimbingan teknis PNS	3.865.216.594,00	5.191.485.850,00
12	Beban Barang Dana BOS	112.034.329.858,00	0,00
Jumlah Beban Jasa		458.216.934.616,00	324.904.143.960,25

5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp36.550.911.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	17.872.756.024,00	17.014.900.490,00
2	Beban Pemeliharaan	18.678.155.537,00	18.032.272.629,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		36.550.911.561,00	35.047.173.119,00

5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan sebesar Rp140.893.533.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Beban Perjalanan Dinas	140.893.533.093,00	131.171.508.761,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		140.893.533.093,00	131.171.508.761,00

5.4.4.6 Beban Hibah

Beban Hibah sebesar Rp586.336.320.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	2.596.400.000,00
2	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	90.704.277.632,00	2.105.453.600,00
3	Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	23.994.202.988,00	20.500.000.000,00
4	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan dasar	471.637.840.000,00	605.921.971.300,00
Jumlah		586.336.320.620,00	631.123.824.900,00

5.4.4.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp325.214.206.454,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97.963.275.217,69	87.240.227.908,28
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.865.119.381,88	13.946.233.184,98
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.313.414.435,35	167.829.032.578,13

4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	(204.952.438,00)	0,00
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	508.430.858,00	7.488.000,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	768.919.000,00	848.074.469,43
Jumlah		325.214.206.454,93	269.871.056.140,82

**Tabel 5.86 Realisasi Beban Penyusutan OPD
Provinsi Jambi Periode 2017**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Pendidikan	8.059.445.947,24	3.014.941.799,49	146.197.665,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	1.698.341.820,77	429.370.242,20	80.866.231,37	0,00	0,00
3.	Rumah Sakit Daerah	29.741.988.873,70	2.179.688.688,53	104.973.390,55	0,00	0,00
4.	Rumah Sakit Jiwa	1.511.490.409,54	982.071.475,60	117.514.423,48	0,00	501.044.858,00
5.	Dinas Sosial	399.793.440,05	229.669.664,76	4.089.197,82	0,00	0,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana	2.881.106.908,35	37.679.295,86	7.378.544,17	0,00	0,00
7.	Badan Kesbangpol	367.576.066,67	14.278.278,83	1.676.425,00	0,00	0,00
8.	Satpol PP	276.421.906,91	24.744.952,24	3.313.971,25	0,00	0,00
9.	Dinas Pekerjaan Umum	9.613.933.629,16	1.087.434.906,76	185.543.528.657,57	0,00	0,00
10.	Dinas Sosnakertrans	430.162.322,39	109.221.377,69	0,00	0,00	0,00
11.	BPMPP	200.812.842,86	13.255.760,00	400.000,00	0,00	0,00
12.	Badan Ketahanan Pangan	163.392.211,30	12.517.100,00	1.376.287,50	0,00	0,00
13.	BLHD	1.290.784.954,28	113.407.617,82	12.792.894,44	0,00	0,00
14.	Dinas Perhubungan	1.914.519.797,95	574.587.947,94	5.046.237.027,79	0,00	0,00
15.	Dinas Kominfo	561.037.915,62	8.675.520,00	2.115.523,89	0,00	0,00
16.	Dinas Koperasi	544.834.273,58	158.162.533,33	9.858.261,24	0,00	0,00
17.	Badan Penanaman Modal Daerah	316.529.255,94	52.453.814,17	0,00	(204.952.438,00)	0,00
18.	Dispora	241.888.904,98	690.709.030,18	3.727.440,00	0,00	0,00
19.	Dinas Kebudayaan	900.310.387,62	214.569.532,34	11.992.484,20	0,00	0,00
20.	Dinas Perpustakaan	738.016.027,61	51.040.350,00	14.868.888,90	0,00	0,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.887.385.180,22	665.170.496,86	432.179.859,61	0,00	0,00
22.	Dinas Tanaman Pangan	3.088.469.153,73	1.104.875.800,05	154.417.749,90	0,00	0,00
23.	Dinas Perkebunan	1.041.129.132,28	40.590.440,00	1.981.574.859,99	0,00	0,00
24.	Dinas Kehutanan	1.486.670.481,93	78.950.621,00	106.621.026,26	0,00	0,00
25.	Dinas ESDM	375.260.707,96	18.833.909,90	1.409.675.717,25	0,00	0,00
26.	Dinas Perindag	1.003.852.333,81	285.698.248,90	3.230.300,00	0,00	0,00
27.	Bappeda	644.215.672,73	102.856.216,05	21.909.258,34	0,00	0,00
28.	Bakeuda	2.445.040.702,66	593.569.229,48	26.086.283,76	0,00	0,00
29.	Bakeuda SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Badan Kepegawaian Daerah	272.494.986,69	13.932.342,89	1.239.550,00	0,00	0,00
31.	Badan PSDM	980.091.670,49	360.263.654,93	32.221.937,00	0,00	0,00
32.	Balitbangda	295.470.921,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Inspektorat	516.952.705,93	87.657.817,54	499.250,00	0,00	0,00
34.	Sekretariat DPRD	2.454.148.721,12	539.764.901,00	931.500,00	0,00	0,00
35.	Biro Pemerintahan	30.793.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Biro Kesramas	91.389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
37.	Biro APSDA	41.095.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Biro APKS	53.620.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Biro Umum	6.606.965.861,21	803.720.769,68	76.446.125,00	0,00	0,00
40.	Biro Humas dan Protokol	(88.651.182,33)	0,00	(245.625,00)	0,00	0,00
41.	Biro PBMD	10.873.087.673,12	9.260.900.925,32	5.946.886.329,07	0,00	0,00
42.	Biro Hukum	54.039.933,33	0,00	0,00	0,00	7.386.000,00
43.	Biro Organisasi	115.135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Badan Penghubung	842.227.985,10	909.854.120,54	6.833.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	97.963.275.217,69	24.865.119.381,88	201.313.414.435,35	(204.952.438,00)	508.430.858,00

Tabel 5.87 Realisasi Beban Amortisasi per OPD Provinsi Jambi Periode 2017

(dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Amortisasi TA 2017	Beban Amortisasi TA 2016
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	5.016.000,00	2.926.000,00
3.	Rumah Sakit Daerah	17.650.000,00	14.740.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum	206.682.800,00	206.682.800,00
6.	Dinas Perhubungan	340.921.600,00	340.921.600,00
7.	Biro APKS	5.712.080,00	11.424.160,00
8.	BPKAD	0,00	7.488.000,00
9.	Biro PBMD	37.440.000,00	0,00
10.	Dinas Kominfo	117.496.520,00	234.964.000,00
11.	Biro Umum	0,00	13.196.576,09
12.	Biro Hukum	0,00	7.386.000,00
13.	Dinas Penanaman Modal	38.000.000,00	0,00
	Jumlah	768.919.000,00	839.729.136,09

5.4.4.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar Rp2.718.492.352,08 merupakan penyisihan piutang Provinsi Jambi yang terdapat pada 7 OPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Rincian Beban Penyisihan Piutang Per OPD Periode 2017

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	
		Realisasi 2017	Realisasi 2016
1.	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	(47.687.215,31)	102.567.467,31
2.	Rumah Sakit Jiwa	7.355.651,95	8.425.791,05
3.	Dinas Lingkungan Hidup	(33.424.808,50)	19.015.568,50
4.	Badan Keuangan Daerah	25.995.650,00	79.090.000,00
5.	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	1.845.884.073,94	130.011.656,18
6.	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	924.769.000,00	0,00
7.	Badan Penghubung Daerah	(4.400.000,00)	(3.450.000,00)
	JUMLAH	2.718.492.352,08	335.660.483,04

5.4.4.9 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Rp0,00.

5.4.4.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp517.370.012.944,34 yang merupakan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp58.367.512.000,00 yang merupakan beban transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.4.4.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Rp92.679.661.569,00 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) yang merupakan beban bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, beban bantuan keuangan kepada Partai Politik dan beban bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2017 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp693.482.316.357,91.**

5.4.6 POS LUAR BIASA

Jumlah Pendapatan Luar Biasa Tahun 2017 sebesar **Rp5.686.905.461,00.**

Jumlah Beban Luar Biasa untuk Tahun 2017 sebesar **Rp58.345.000,00.**

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2017 **Rp699.110.876.818,91.**

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2017 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2017 31 Desember 2016

Rp1.039.652.240.215,96 Rp1.024.493.058.877,95

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.039.652.240.215,96 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.039.652.240.215,96 dan Rp1.024.493.058.877,95 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2017	Tahun 2016
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	1.316.162.467.485,16	966.519.347.102,57
Penerimaan Retribusi Daerah	19.864.952.006,00	19.098.520.625,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.054.470.466,63	26.979.273.416,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.189.044.237,05	100.122.854.928,80
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	390.520.754.714,00	395.791.297.693,00
Dana Alokasi Umum	1.397.912.161.000,00	1.070.452.478.000,00
Dana Alokasi Khusus	934.827.673.236,00	81.644.852.458,00
Dana Penyesuaian	0	611.790.980.303,00
Pendapatan Hibah	1.658.460.000,00	1.401.600.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>4.141.189.983.144,84</i>	<i>3.273.801.204.526,78</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1.075.169.862.648,00	571.555.910.924,33
Belanja Barang	764.125.355.217,54	647.604.439.745,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	586.336.320.620,00	629.018.371.300,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	58.345.000,00	93.456.012,00
Bagi Hasil Pajak	517.348.197.874,34	399.535.722.420,50
Belanja Bantuan Keuangan	156.720.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Partai Politik	1.779.661.569,00	1.500.245.247,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>3.101.537.742.928,88</i>	<i>2.249.308.145.648,83</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.039.652.240.215,96	1.024.493.058.877,95

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2014</u>
(Rp885.794.535.971,32)	(Rp937.413.139.115,01)

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2017 defisit sebesar (Rp885.794.535.971,32). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp885.794.535.971,32) dan (Rp937.413.139.115,01) berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2017	Tahun 2016
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.552.676.984,66	115.825.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	15.650.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.552.676.984,66	131.475.000,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	2.800.947.111,00	35.137.090.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	103.928.668.183,09	76.909.913.057,80
Belanja Gedung dan Bangunan	106.016.827.183,89	106.425.067.817,18
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	658.315.309.836,00	717.103.508.077,03
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.285.460.642,00	1.969.035.163,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	887.347.212.955,98	937.544.614.115,01
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp885.794.535.971,32)	(Rp937.413.139.115,01)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp0,00	Rp0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Rp2.043.234.590,99	Rp1.960.820.827,99

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.043.234.590,99 dan sebesar Rp1.960.820.827,99 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2017	Tahun 2016
--	-------------------	-------------------

<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	217.507.576.671,00	171.730.996.674,00
Penerimaan Utang Pihak Ketiga	2.043.234.590,99	1.960.820.827,99
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>219.550.811.261,99</i>	<i>173.691.817.501,99</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	217.507.576.671,00	171.730.996.674,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>217.507.576.671,00</i>	<i>171.730.996.674,00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	2.043.234.590,99	1.960.820.827,99

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.043.234.590,99 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dan Penerimaan Utang Pihak Ketiga milik PT. WKS, PT. PKP dan Bank mandiri kelebihan transfer ke Kas Daerah sebesar Rp500.000,00. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

5.5.4 Saldo Akhir Kas	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
	Rp500.862.927.893,66	Rp319.968.964.277,68

Saldo Akhir Kas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp500.862.927.893,66 dan sebesar Rp319.968.964.277,68 dapat dirinci sebagai berikut:

	<i>(dalam rupiah)</i>	
	Tahun 2017	Tahun 2016
Kenaikan/Penurunan Kas	155.900.938.835,63	89.040.740.590,93
Saldo Awal Kas di BUD	286.475.207.572,23	197.434.466.981,30
Saldo Akhir Kas di BUD	442.376.146.407,86	286.475.207.572,23
Kas di Bendahara Penerimaan	102.067.000,00	50.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	351.550,00	0,00
Kas di Bendahara BLUD	36.175.461.224,80	33.493.706.705,45
Kas Di Bendahara BOS	22.208.901.711,00	0,00
Saldo Akhir Kas	500.862.927.893,66	319.968.964.277,68

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas

operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2017 sebesar Rp6.017.292.023.437,23 merupakan saldo akhir Tahun 2016.

5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp699.110.876.818,91.

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2017 adalah sebesar Rp858.958.923.241,40 yang terdiri dari:

a) Koreksi Nilai Persediaan (Rp203.500,00)

Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp203.500,00) terdapat pada Biro Pembangunan Kerjasama.

b) Koreksi Ekuitas Lainnya Rp559.603.733.892,00

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp559.603.733.892,00 terdapat pada 13 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	(1.800.171.469,00)	Penghapusan aset rusak berat dan Pencatatan Piutang klai SKTM 2016
2	Dinas Satpol PP dan PK	(387.527.500,00)	Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin ke Biro Umum
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.133.275.456,00)	- Penggabungan Aset dari KPID - Mengeluarkan BM dibawah kapitalisasi - Reklas PM ke TPTGR - Mutasi kurang PM ke Biro PBMD - Reklas ke Aset Rusak Berat - Mutasi Tambah dari Biro Humas
4	Dinas Kehutanan	(237.097.368,64)	- Penghapusan Aset Rusak berat - Jurnal kelebihan harga
5	Biro Pemerintahan	(36.626.400,00)	- Mutasi aset ke Dinsosdukcapil
6	Biro Kesramas	(569.206.507,36)	- Mutasi aset PM dari Biro PMBD - Penghapusan aset rusak berat
7	Biro Pembangunan dan Kerjasama	5.650.000,00	Mutasi tambah aset dari Biro PBMD
8	Biro Humas dan Protokol	(143.441.849,00)	Mutasi tambah aset ke Dinas Kominfo
9	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	595.987.589.744,82	- Mutasi tambah aset dari Bakorluh - Mutasi tambah aset dari Korpri - Mutasi tambah aset dari Eks BPKAD - Mutasi tambah aset dari Dispora - Mengeluarkan BM dibawah kapitalisasi

			- Mutasi Piutang eks BPKAD - Mutasi kurang ke Biro-biro - Hibah Tanah untuk Asrama Haji dan pengurangan dobel catat
10	Biro Hukum	72.400.000,00	Mutasi aset dari Biro PMBD
11	Biro Organisasi	50.145.000,00	- Mutasi Aset dari Biro Humas - Mutasi Aset dari Biro PMBD
12	KPID	(1.056.532.391,00)	Penggabungan Aset ke Kominfo
13	Dinas Pendidikan	(31.148.171.911,82)	Mencatat Saldo Dana BOS
	Jumlah	559.603.733.892,00	

c) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar Rp5.686.905.461,00

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Lancar sebesar Rp5.686.905.461,00 terdapat pada Dinas Pendidikan berupa kas di bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

d) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap Rp1.025.097.306.139,01

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Tetap terdiri dari:

- Penambahan dari pelimpahan kewenangan (P3D) Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp1.026.361.050.324,62.
- Penambahan Aset Tetap yang belum tercatat sebesar Rp2.258.549.195,00 pada Rumah Sakit Jiwa dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.74.850.000,00.

Tabel 5.90 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada RSJ dan Dinas Kesehatan
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Rumah Sakit Jiwa	938.806.195,00 1.319.743.000,00	- Alat Kantor - Bangunan Gedung Kantor
2	Dinas Kesehatan	74.850.000,00	Bangunan Gedung kantor Balai Labkes yang belum masuk neraca
	Jumlah (Rp)	2.333.399.195,00	

- Penambahan aset karena kesalahan aritmatika sebesar Rp5,96 pada Dinas PUPR.
- Pengurangan Aset Tetap karena nilai dibawah kapitalisasi sebesar (Rp3.107.415.950,21) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.91 Rincian Pengurangan Aset Tetap Karena Nilai di bawah Kapitalisasi
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	(27.676.819,67)	- Alat rumah tangga - Bangunan gedung kantor
2	Dinas Kesehatan	(11.120.000,00)	Alat rumah tangga
3	Badan Keuangan Daerah	(94.722.915,00)	Alat Kantor
4	Rumah Sakit Jiwa	(198.108.023,00)	- Alat kantor - Alat rumah tangga - Komputer - Alat Studio - Alat Kedokteran - Alat kesehatan
5	Dinas Perhubungan	(2.590.132.043,54)	- Jaringan Transmisi
6	Dinas PUPR	(95.841.354,00)	Alat rumah tangga
7	BPBD	(30.171.000,00)	Alat Keamanan dan perlindungan
8	Biro Umum	(43.365.000,00)	Alat rumah tangga
9	Dinas Kehutanan	(14.978.795,00)	- Alat kantor - Alat Studio

10	Dinas Perindag	(1.300.000,00)	Alat rumah tangga
	Jumlah	(3.107.415.950,21)	

- (e) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset sebesar Rp(330.077.436,36) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Rincian Pengurangan Aset Tetap Karena Rekalsifikasi Aset
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Badan Keuangan Daerah	(213.727.436,36)	- Reklas dari Alat kantor ke Aset lain-lain (rusak) - Reklas dari Alat studio ke Aset lain-lain (rusak) - Reklas dari Instalasi listrik ke Aset lain-lain (rusak)
2	Biro PBMD	(86.650.000,00)	Reklas dari Bangunan gedung kantor ke aset tetap renovasi
3	Dinas ESDM	(29.700.000,00)	Reklas dari Konstruksi dalam pengerjaan ke Aset lainnya
	Jumlah	(330.077.436,36)	

- (f) Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp(159.650.000,00) karena merupakan belanja barang dan jasa yang salah penganggaran.

Tabel 5.93 Rincian Pengurangan Aset Tetap Karena Salah Penganggaran
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	(149.950.000,00)	Belanja modal hanya pemeliharaan sehingga termasuk dalam belanja barang dan jasa
2	Dinas Penanaman Modal PTSP	(9.700.000,00)	Belanja modal hanya pemeliharaan sehingga termasuk dalam belanja barang dan jasa
	Jumlah	(159.650.000,00)	

e) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp8.194.151.540,13)

Pertambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.94 Rincian Pertambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	(494.501.985,76)	-Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu -Pengurangan akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga karena kesalahan nilai residu nilai perolehan printer
2	Dinas Kesehatan	84.044.652,25	-Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu -Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
3	Rumah Sakit Umum	54.526.410,67	-Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
4	Rumah Sakit Jiwa	(15.808.439,35)	-Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu -Pengurangan akumulasi penyusutan karena reklas aset ke aset rusak berat
5	Dinas Sosial Dukcapil	(8.125.446.672,18)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya mutasi dari Dinas Sosnakertrans
6	BPBD	(3.791.122.610,72)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya hibah barang dari BNPP yang belum tercatat di Buku Inventaris
7	Dinas PUPR	(20.509.870.829,41)	Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	8.015.593.847,18	-Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu -Pengurangan akumulasi penyusutan karena mutasi ke Dinas Sosdukcapil
9	Dinas Perhubungan	1.385.946.302,49	-Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
10	Dinas Kominfo	(1.529.423.032,00)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya mutasi aset dari KPID

No	OPD	Jumlah	Keterangan
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(44.014.285,71)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya hibah barang dari Perpustakaan Nasional yang belum tercatat di Buku Inventaris
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.797.016,22)	-Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya hibah barang dari KKP yang belum tercatat di Buku Inventaris -Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
13	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	(9.886.713.282,44)	-Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya mutasi aset dari Dinas Peternakan -Pengurangan akumulasi penyusutan karena aset yang dimutasikan ke Dinas Pendidikan
14	Dinas Peternakan	10.844.573.034,74	Pengurangan akumulasi penyusutan karena Penggabungan Aset ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
15	Dinas Perkebunan	368.097.494,29	Pengurangan akumulasi penyusutan karena aset dipindahkan ke Aset tetap renovasi dan mutasi kendaraan ke Biro Umum
16	Dinas ESDM	3.366.000,01	Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
17	Disperindag	14.150.000,00	Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan penghapusan aset kendaraan yang hilang
18	Bappeda	2.185,22	Pengurangan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya
19	Bakeuda	(14.305.842.432,61)	-Penambahan akumulasi penyusutan karena penggabungan aset dari Dispenda -Pengurangan akumulasi penyusutan karena reklas aset ke aset rusak berat dan mutasi aset ke Biro PBMD
20	Dinas Pendapatan Daerah	28.044.068.067,56	Pengurangan akumulasi penyusutan karena penggabungan aset ke Bakeuda
21	Set Korpri	1.359.252.343,11	Pengurangan akumulasi penyusutan karena penggabungan aset ke BPBMD
22	Biro Pemerintahan	21.587.233,33	Pengurangan akumulasi penyusutan karena mutasi ke Dinas Sosdukcapil
23	Biro Umum	(661.654.642,86)	Penambahan akumulasi penyusutan karena Mutasi dari OPD lain
24	Biro Humas	(41.043.900,00)	Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
25	Inspektorat	(36.259.000,00)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya barang hibah dari Kementerian Dalam Negeri
26	Dinas Kehutanan	(812.874.593,20)	Penambahan akumulasi penyusutan karena adanya barang hibah dari BPHP
27	Badan Kepegawaian Daerah	(5.357.248,12)	Penambahan akumulasi penyusutan karena kesalahan perhitungan penyusutan tahun lalu
28	Badan Koordinasi Penyuluhan	1.877.370.859,60	Pengurangan akumulasi penyusutan karena penggabungan aset ke BPBMD
	Jumlah	(8.194.151.540,13)	

f) Penyesuaian Aset Lainnya Rp12.245.686.143,78

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp12.245.686.143,78 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset sebesar Rp21.109.660.174,36 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95 Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Badan Keuangan Daerah	213.727.436,36	-Reklas dari Alat kantor ke Aset lain-lain (rusak) -Reklas dari Jaringan ke Aset lain-lain (rusak)
2	Biro PBMD	71.500.000,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan ke ATR
3	Dinas ESDM	29.700.000,00	Reklas dari KDP ke aset lain-lain
4	Dinas PUPR	18.520.043.433,00	Reklas dari Gedung dan Bangunan ke aset lain-lain
5	Rumah Sakit Jiwa	502.614.858,00	Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain (rusak)
6	Dinas Kominfo	1.081.947.976,00	Reklas dari Alat rumah tangga ke Aset lain-lain (rusak)
7	RSUD	19.400.000,00	Reklas dari Alat rumah tangga ke Aset lain-lain (rusak)

8	Dinas Koperasi UMKM	670.726.471,00	-Reklas dari Alat kantor ke Aset lain-lain (rusak) -Reklas dari Instalasi ke Aset lain-lain (rusak)
Jumlah		21.109.660.174,36	

- (b) Penambahan Aset Lainnya karena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp123.509.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah
1	Dinas Kominfo	12.400.000,00
2	Bakeuda	60.459.000,00
3	Dinas Kehutanan	35.500.000,00
4	Biro PBMD	15.150.000,00
Jumlah		123.509.000,00

- (c) Pengurangan Aset Lainnya karena mutasi antar OPD sebesar (Rp1.328.769.491,00);

Tabel 5.97 Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Mutasi antar OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosial Dukcapil	1.851.881.758,20	Mutasi tambah dari Dinas Nakertrans
2	Dinas Pendapatan Daerah	(3.126.879.371,22)	Mutasi ke Bakeuda karena penggabungan SKPD
3	Badan Keuangan Daerah	1.826.544.880,22	-Mutasi tambah dari penggabungan aset Dispenda -Mutasi kurang ke Biro PBMD
4	Badan Kordinasi Penyuluhan	(28.435.000,00)	Mutasi kurang ke Biro PBMD
5	Dinas Peternakan	(30.556.674.298,60)	Mutasi kurang ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
6	Dinas Tanaman Pangan	30.556.674.298,60	Mutasi tambah dari Dinas Peternakan Keswan
8	Dinas Nakertrans	(1.851.881.758,20)	Mutasi kurang ke Dinas Sosdukcapil
Jumlah		(1.328.769.491,00)	

- (d) Pengurangan Aset Lainnya karena Penghapusan aset lainnya sesuai dengan SK Penghapusan sebesar (Rp7.550.136.201,00) pada:

Tabel 5.98 Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Penghapusan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah
1	BPSDM	(2.373.267.147,00)
2	Dinas ESDM	(542.524.862,00)
3	Dinas Perkebunan	(454.735.182,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.862.170.851,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup	(1.317.438.159,00)
Jumlah		(7.550.136.201,00)

- (e) Pengurangan Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang telah dibayarkan pada Badan keuangan Daerah sebesar (Rp2.750.000,00);
- (f) Pengurangan Aset Lainnya dari piutang kekurangan volume belanja pada dinas PUPR sebesar (Rp105.827.338,58).

g) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp29.952.000,00

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp29.952.000,00 terdapat pada Badan Keuangan Daerah.

h) Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap (Rp638.949.817.761,84)

Pertambahan dan pengurangan perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap sebesar Rp638.949.817.761,84 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan mutasi masuk dan keluar aset tetap berupa Hibah Aset sebesar Rp23.311.393.891,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Berupa Hibah Aset
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Inspektorat	47.599.909,00	Hibah berupa computer, printer, laptop dan buku perundang-undangan dari Kemendagri
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	377.981.400,00	Hibah berupa buku dan kendaraan roda empat dari Perpustakaan Nasional RI
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	463.697.600,00	Hibah berupa computer, scanner dan kendaraan roda empat dari KKP
4	Dinas PUPR	4.912.849.800,00	Hibah berupa jalan desa dari Kementerian PU
5	Dinas Kehutanan	3.322.575.767,00	-Hibah berupa kendaraan roda dua dan alat keamanan dari BPHP -Hibah tanah ke Kabupaten Batanghari
6	BPBD	13.954.789.415,00	Hibah dari BNPP berupa alat berat, kendaraan bermotor, perahu karet, meubelair dan alat komunikasi.
7	Badan Pemberdayaan Perempuan	231.900.000,00	Hibah berupa kendaraan roda dua dari Kementerian PP
	Jumlah	23.311.393.891,00	

- (b) Mutasi masuk dan keluar Aset antar OPD sebesar (Rp.636.205.072.356,64) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset antar OPD
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	2.406.024.900,00	Mutasi Masuk dari Dispora dan Dinas Tanaman Pangan
2	Dinas Sosial DUKCAPIL	16.279.734.601,08	Mutasi Masuk dari Dinas Nakertrans dan Biro Pemerintahan
3	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	(16.243.108.201,08)	Mutasi keluar ke Dinas Sosdukcapi
4	Dinas Kominfo	2.578.016.874,00	Mutasi masuk dari KPID
5	Badan Koordinasi Penyuluhan	(3.444.851.490,00)	Mutasi keluar ke Biro PBMD
6	Dinas PUPR	2.484.226.538,00	-Mutasi masuk dari Dinas Perhubungan -Mutasi keluar ke Bakeuda
7	Dinas Perhubungan	(2.499.794.000,00)	-Mutasi keluar ke Dinas PUPR
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(1.545.600.000,00)	Mutasi keluar ke Biro PBMD
9	Dinas Pendapatan	(56.012.623.802,85)	Mutasi kurang ke Bakeuda
10	Biro Umum	5.117.637.500,00	Mutasi masuk dari DKP dan Biro PBMD
11	Dinas Tanaman Pangan	47.255.267.628,26	-Mutasi masuk dari Dinas Peternakan -Mutasi keluar ke Dinas Pendidikan
12	Dinas Peternakan	(49.548.805.033,26)	Mutasi keluar ke Dinas Tanaman Pangan

13	Badan Keuangan Daerah	(580.299.364.338,79)	-Mutasi masuk dari Dispenda -Mutasi keluar ke Biro PBMD
14	Dinas Perkebunan	(370.000.000,00)	Mutasi keluar ke Biro Umum
15	Korpri	(2.038.033.532,00)	Mutasi keluar ke Biro PBMD
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	(323.800.000,00)	Mutasi keluar ke Biro Umum
Jumlah		(636.205.072.356,64)	

(c) Reklasifikasi aset sebesar (Rp19.837.484.762,00) terdapat pada:

Tabel 5.101 Rincian Reklasifikasi Aset

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	RSUD	(19.400.000,00)	Reklas dari Aset tetap Peralatan Mesin ke Aset lainnya
2	Dinas Koperasi UMKM	(670.726.471,00)	Reklas dari Aset tetap Peralatan Mesin dan JJJ ke Aset lainnya
3	Rumah Sakit Jiwa	(502.614.858,00)	Reklas dari Aset tetap Peralatan Mesin ke Aset Rusak Berat
4	Dinas PUPR	(18.520.043.433,00)	Reklas dari Aset tetap Gedung Bangunan ke Aset lainnya
5	Dinas Kehutanan	(124.700.000,00)	Reklas dari PM kend. Roda 4 dan Roda 2, reklas dari PM ke TP-TGR
Jumlah		(19.837.484.762,00)	

(d) Pengurangan berupa penghapusan Aset sebesar (Rp1.753.729.085,52) yang terdapat pada:

Tabel 5.102 Rincian Pengurangan berupa Penghapusan Aset

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Kelautan Perikanan	(752.535.700,50)	Pengurangan Aset lain-lain
2	Dinas Perindag	(714.846.885,02)	Pengurangan Aset lainnya Rusak Berat dan Akumulasi Penyusutan PM kendaraan Roda 2 yang hilang
3	Dinas Kesehatan	(286.346.500,00)	Penghapusan gedung dan bangunan kantor
Jumlah		(1.753.729.085,52)	

(e) Pengurangan berupa Aset dibawah nilai Kapitalisasi sebesar (Rp4.464.925.448,68) yang terdapat pada:

Tabel 5.103 Rincian Pengurangan berupa Aset dibawah Nilai Kapitalisasi

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	RSUD	(1.129.029.744,71)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
2	Balitbangda	(400.000,00)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
3	Dinas Koperasi	(18.500.000,00)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
4	Bakesbangpol	(24.490.000,00)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
5	Dinas Pendidikan	(3.200.318.703,97)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
6	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	(2.250.000,00)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
7	Dinas Penanaman Modal PTSP	(89.937.000,00)	Kapitalisasi dari PM berupa Meubelair
Jumlah		(4.464.925.448,68)	

i) Beban Persediaan (Rp1.122.551.480,00)

Beban persediaan sebesar (Rp1.122.551.480,00) terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah.

j) Nilai Investasi Non Permanen (Rp165.976.040,56)

Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp(165.976.040,56) merupakan Pencatatan data Investasi non permanen lainnya KUPEM per 31 Desember 2017.

k) Pengakuan Atas Penyisihan Piutang Rp854.920.000,00

Pengakuan atas penyisihan piutang sebesar Rp854.920.000,00 merupakan Pencatatan mutasi piutang dari Badan Keuangan Daerah ke Biro PBMD.

l) Penyesuaian Kewajiban (Rp130.389.715.004,93)

Penyesuaian kewajiban sebesar (Rp130.389.715.004,93) terdapat pada:

Tabel 5.104 Rincian Penyesuaian Kewajiban

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	RSUD	(3.998.369.743,65)	Utang belanja operasional (utang jangka pendek lainnya)
2	Bappeda	(1.275.000.000,00)	Hutang kewajiban jangka pendek lainnya yang berupa pekerjaan tahun 2016-2017 yang sudah selesai tapi belum dibayarkan
3	Bakeuda	(787.331.310,00)	Mutasi keluar piutang ke biro PBMD
4	Bakeuda (SKPKD)	(105.462.712.132,28)	- Mengeluarkan hutang DBH 2016 yang sudah dibayar pada tahun 2017 - Mencatat hutang DBH yang belum tersalurkan tahun 2017 - Menyesuaikan hutang jangka panjang BOT dan PT. Jambi Sapta Manunggal Pratama
5	Dinas Pendapatan	52.157.881,00	Utang belanja jasa kantor
6	Dinas Pendidikan	(6.206.780.000,00)	Hutang kewajiban jangka pendek lainnya yang berupa pekerjaan tahun 2016-2017 yang sudah selesai tapi belum dibayarkan oleh Pemprov Jambi
7	Dinas PUPR	(12.711.679.700,00)	Mencatat hutang jangka pendek lainnya atas Pekerjaan Eskalasi ruas jalan Simpang Pulau Rengas-Dusun Tuo-Jangkat sebesar Rp12.171.105.700,00 dan biaya perkara pengadilan sebesar Rp574.000,00 yang sudah selesai dikerjakan akan tetapi belum dapat dibayarkan
	Jumlah	(130.389.715.004,93)	

m) Nilai Investasi Permanen Rp29.773.441.536,74

Nilai investasi permanen sebesar Rp29.773.441.536,74 merupakan penyesuaian penambahan nilai investasi jangka panjang per 31 Desember 2017.

n) Lain-lain Rp4.489.393.396,33

Koreksi ekuitas lain-lain sebesar Rp4.489.393.396,33 terdapat pada 3 OPD sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Inspektorat	20.565.567,00	Beban dibayar dimuka

2	Dinas Pendapatan Daerah	(67.588.690,00)	Piutang pendapatan 2016 dan piutang denda pajak
3	Dinas PUPR	4.536.416.519,33	Piutang Tahun 2017 atas temuan pemeriksaan
	Jumlah	4.489.393.396,33	

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2017 adalah sebesar **Rp7.575.361.823.497,54** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	6.017.292.023.437,23
2	Suplus/Defisit LO	Rp	699.110.876.818,91
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	858.958.923.241,40
4	Ekuitas Akhir	Rp	7.575.361.823.497,54

BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 8 Badan, 22 Dinas, dua BUMD, 5 Badan Layanan Umum dengan rincian sebagai berikut.

1. Badan

- 9) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 10) Badan Keuangan Daerah
- 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- 12) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 13) Badan Kepegawaian Daerah
- 14) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 15) Badan Penghubung Daerah
- 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Dinas

- 23) Dinas Pendidikan
- 24) Dinas Kesehatan
- 25) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 26) Dinas Perhubungan
- 27) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 28) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 29) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 30) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 31) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 32) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- 33) Dinas Perkebunan
- 34) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 35) Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
- 36) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 37) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 38) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 39) Dinas Kominfo
- 40) Dinas Lingkungan Hidup
- 41) Dinas Ketahanan Pangan
- 42) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 43) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- 44) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4. BUMD

- 1) Bank Jambi
- 2) PT Jambi Indoguna Internasional (PT JII)

4. Badan Layanan Umum Daerah.

- 6) Akademi Farmasi.

- 7) Akademi Analisis Kesehatan (AAK)
- 8) Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jambi
- 9) Rumah Sakit Daerah
- 10) Rumah Sakit Jiwa

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2017

Dalam TA 2017 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

6.4. Informasi Lainnya

Dalam TA 2017 terdapat perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp4.233.797.487.302,00 telah direalisasi sebesar Rp4.311.792.610.112,36 atau sebesar 101,84%, dan pada sisi belanja dan transfer dianggarkan sebesar Rp4.512.018.729.159,37 terealisasi sebesar Rp4.132.941.881.087,37 atau sebesar 91,60%. Dari angka defisit APBD yang ditargetkan sebesar Rp278.221.241.857,37 dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp178.850.729.024,99 atau sebesar -64,28%. Dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp278.221.241.857,37, maka terdapat SILPA sebesar Rp457.071.970.882,36;
- *Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL):* Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 sebesar Rp457.071.970.882,36, ini berarti ada kenaikan sebesar Rp178.850.729.024,99 dibanding dengan saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2016 sebesar Rp278.221.241.857,37 dan terdapat saldo SAL Tahun 2017 yang tidak digunakan sebesar Rp457.071.970.882,36;
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2017 sebesar Rp7.922.958.480.710,74 bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp6.230.703.051.277,51 naik sebesar 27,15%. Posisi Kewajiban pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp347.596.657.213,20 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp213.411.027.840,28 naik sebesar 62,87%. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp7.575.361.823.497,54 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp6.017.292.023.437,23 naik sebesar 25,89%;
- *Pada Laporan Operasional (LO):* Pendapatan LO Tahun 2017 sebesar Rp4.286.145.484.565,36 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp1.560.050.184.265,36, pendapatan transfer LO sebesar Rp2.723.260.588.950,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp2.834.711.350,00. Sedangkan Beban Tahun 2017 sebesar Rp3.592.663.168.207,45 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp2.924.245.981.694,11 Beban Transfer sebesar Rp668.417.186.513,34 sedangkan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional surplus sebesar Rp693.482.316.357,91. Nilai Surplus Kegiatan Non Operasional adalah Nihil. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp693.482.316.357,91. Nilai Pendapatan luar biasa adalah Rp5.686.905.461,00, Beban Luar Biasa Rp58.345.000,00 sehingga Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Defisit Rp5.628.560.461,00 sehingga Surplus/Defisit LO sebesar Rp699.110.876.818,91.

- *Pada Laporan Arus Kas: Saldo Arus Kas pada akhir Tahun 2017 sebesar Rp500.862.927.893,66 dibandingkan saldo arus kas pada akhir Tahun 2016 sebesar Rp319.968.964.277,68 sehingga terjadi kenaikan saldo akhir kas akhir tahun ini sebesar Rp180.893.963.615,98.*

- *Pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Ekuitas awal sebesar Rp6.017.292.023.437,23 Surplus/Defisit LO sebesar Rp699.110.876.818,91 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp858.958.923.241,40 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp7.575.361.823.497,54.*

Jambi, Juni 2018
Plt. GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR